

LAPORAN KINERJA 2018

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



DAFTAR ISTILAH

B

BBKSDA : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam

BBTN : Balai Besar Taman Nasional

BTN : Balai Taman Nasional

C

CA : Cagar Alam

CSR : *Corporate Social Responsibility*

E

E-PASS : *Enhancing Protected Area System in Sulawesi*

H

HC : *Health Certificate*

HLN : Hibah Luar Negeri

HLLN : Hibah Langsung Luar Negeri

HCVF : *High Conservation Value Forest*

I

IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

IKP : Indikator Kinerja Program

IKU : Indikator Kinerja Utama

IMF : *International Monetary Fund*

IPA : Izin Pemanfaatan Air

IPJLPB : Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

IUCN : *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*

IUPA : Izin Usaha Pemanfaatan Air

IUPSWA : Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam

IUPJWA : Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam

K

KEE : Kawasan Ekosistem Esensial

Kehati : Keanekaragaman Hayati

KK : Kawasan Konservasi

KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan

KPHK : Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi

KSDAE : Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

KPHL : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

L

LHK : Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LKj : Laporan Kinerja

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

M

MAP : Mata Anggaran Pendapatan

METT : *Management Effectiveness Tracking Tool*

MW : Megawatt

N

NGO : *Non-Governmental Organization*

P

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum

PEH : Pengendali Ekosistem Hutan

PHK : Pemutusan Hubungan Kerja

PIKA : Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

PKS : Perjanjian Kerjasama

PKTL : Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNS : Pegawai Negeri Sipil

PPKLH : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

PPOB : *Payment Point Online Bank*

R

RAPPAM : *Rapid Assessment and Prioritisation of Protected Area Methodology*

RM : Rupiah Murni

RMP : Rupiah Murni Pendamping

RPE : Rencana Pemulihan Ekosistem

S

SBSN : Surat Berharga Syariah Negara
SDG : *Sustainable Development Goals*
SDM : Sumber Daya Manusia
SK : Surat Keputusan
SM : Suaka Margasatwa
SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum
SPTNW : Seksi Pengelolaan Taman Nasional
Wilayah

T

T : Triliun
TB : Taman Buru
TN : Taman Nasional
TNBBS : Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
TNL : Taman Nasional Laut
TNMB : Taman Nasional Meru Betiri
TO : *Trekking Organizer*
TSL : Tumbuhan dan Satwa Liar
TWA : Taman Wisata Alam
TWAL : Taman Wisata Alam Laut

U

UPT : Unit Pelaksana Teknis

W

Wisman : Wisatawan Mancanegara
Wisnus : Wisatawan Nusantara
WKP : Wilayah Kerja Pertambangan
WRU : *Wildlife Rescue Unit*

CAPAIAN KINERJA



Sasaran Program/ Kegiatan 1



Meningkatnya Efektivitas
Pengelolaan Hutan Konservasi dan
Upaya Konservasi Keanekaragaman
Hayati **107%**

75,00%



Nilai indeks efektivitas
pengelolaan kawasan
konservasi minimal 70%
(kategori baik)



150%

Jumlah KPHK non TN yang
terbentuk dan beroperasi



Persentase peningkatan
populasi 25 jenis satwa
terancam punah prioritas
(sesuai The IUCN Red List of
Threatened Species) **41 %**

60,00%



Jumlah unit kawasan
ekosistem esensial yang
terbentuk dan
dioptimalkan
pengelolaannya



100%

Jumlah ketersediaan data dan
informasi sebaran
keanekaragaman spesies dan
genetik yang valid dan reliable
pada 7 wilayah biogeografi
(Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua)

Sasaran Program/ Kegiatan 2



Meningkatnya Penerimaan Devisa
dan PNPB dari Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Kawasan Konservasi
dan Keanekaragaman Hayati **139,51%**

Jumlah ketersediaan
data dan informasi
sebaran
keanekaragaman
spesies dan genetik
yang valid dan
reliable pada 7
wilayah biogeografi
(Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua)

150%



108,05%



Jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara ke
kawasan
konservasi

150%

Jumlah kemitraan
pengelolaan kawasan
konservasi (usaha
pariwisata alam,
pemanfaatan jasa
lingkungan , dan
pemanfaatan jasa
lingkungan
Geothermal)

Jumlah
kunjungan
wisatawan
nusantara ke
kawasan
knservasi



150%



Rantau Rasau_TN Berbak Sembilang
@Iskandar

95,39%

**REALISASI
ANGGARAN**



**RATIO
EFISIENSI**

1.15

Efisien



Landscape TN MaTaLaWa
© Balai TN MaTaLaWa

PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL KSDAE



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini pada dasarnya menggambarkan capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE dalam pelaksanaan program konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di tahun 2018 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang disusun pada akhir tahun 2017.

Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia menuntut sebuah tempat untuk melindungi dan melestarikan keragaman tersebut, diantaranya dalam bentuk kawasan konservasi. Sampai saat ini jumlah kawasan konservasi seluruh wilayah Indonesia mencapai 552 unit dengan luas mencapai lebih dari 27,14 juta ha. Menjaga keberadaan potensi keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistemnya merupakan salah satu mandat dari pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan terhadap kondisi pengelolaannya, untuk memastikan kawasan telah dikelola sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang ada. Untuk menilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi tersebut, pada tahun 2018 telah dilakukan evaluasi dan 75 unit diantaranya mendapatkan nilai indeks METT 70% atau lebih yang berarti pengelolaannya masuk dalam kategori baik.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE juga mendapatkan mandat untuk membentuk dan mengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) baik di kawasan taman nasional maupun kawasan non taman nasional. Sampai dengan tahun 2018 jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 103 unit. Melalui pembentukan KPHK ini, diharapkan akan semakin mendorong pengelola kawasan untuk mencapai tujuan pengelolaan sesuai mandat kawasannya. Pengelolaan kawasan konservasi juga perlu didukung dengan upaya konservasi

pada kawasan kawasan di sekitarnya (daerah penyangga). Beberapa kawasan diluar kawasan konservasi yang memiliki nilai ekosistem penting atau disebut Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) perlu ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Pada tahun 2018 terbentuk 6 unit KEE yang terdiri dari 3 Taman Kehati hasil kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah, 1 koridor satwa, serta 2 kawasan karst.

Selain pengelolaan kawasan, mandat penting yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah dalam pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya dalam peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species*). Pada tahun 2018 rata-rata peningkatan populasi sebesar 0,82% dari target yang ditetapkan sebesar 2% telah tercapai. Dalam rangka pengelolaan keanekaragaman hayati perlu didukung basis data yang memadai, baik keanekaragaman genetik, jenis, habitat, populasi, dan distribusinya. Sampai dengan tahun 2018 jumlah data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik tersedia untuk 7 wilayah biogeografi. Khusus di tahun 2018 telah dilakukan pengumpulan data dan identifikasi potensi *bioprospecting* (tanaman obat) di Ekoregion Maluku yang diwakili oleh Balai Taman Nasional Manusela.

Direktorat Jenderal KSDAE juga memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian nasional, melalui peningkatan penerimaan devisa dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang KSDAE. Pada tahun 2018 nilai ekspor pemanfaatan TSL mencapai Rp.13,16 Trilyun atau meningkat 59,33% dibanding nilai tahun 2017. Peningkatan ini selain karena ekspor jenis baru (pasak bumi, mahoni dan ikan Clarion Angel), juga terjadi karena adanya peningkatan nilai ekspor dari beberapa jenis TSL lainnya yang sebelumnya memang menjadi komoditas perdagangan seperti sonokeling, berbagai jenis ikan dan *mollusca*. Sektor lainnya yang berkontribusi sebagai penyumbang devisa dan PNBP adalah pariwisata alam. Jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi tahun 2018 mencapai lebih dari



7,4 juta orang, atau meningkat 20,04% dibanding tahun 2017. Peningkatan kunjungan wisata menunjukkan berbagai upaya pengembangan wisata alam yang dilakukan selama ini, termasuk peningkatan kualitas sarana prasarana wisata mendapatkan respon positif dari para wisatawan baik lokal maupun internasional.

Berbagai capaian yang dikemukakan di atas, sesungguhnya hanya sebagai gambaran singkat atas pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal KSDAE. Masih banyak hal yang harus dilakukan demi mewujudkan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang berkelanjutan. Namun demikian, secara umum, pembangunan bidang KSDAE pada tahun 2018 telah



*Pelepasliaran Orangutan Johnny
TN Bukit Baka Bukit Raya
© Heribertus*



*Wajah Tinabo dari Udara
Pulau Tinabo, TN Taka Bonerate
© Asri*

memberikan dampak bagi kemajuan negara dan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2018, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2019. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan semua pihak yang berperan serta dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.



Jakarta, Februari 2019
DIREKTUR JENDERAL KSDAE,

Dr. WIRATNO, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003



*Penyu dan Terumbu Karang di dive spot Table Coral City,
Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III
© Ayub Gerit Polii*

RINGKASAN

CAPAIAN KINERJA

Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan mandat untuk melaksanakan program konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE diukur melalui pencapaian 2 sasaran program dan 9 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja 2018, dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dibuat oleh Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang memuat berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) dalam rangka mendukung pencapaian 2 sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE.

Sasaran program pertama, meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya keanekaragaman hayati, yang diukur melalui 5 indikator kinerja, yaitu: (a) Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 100 unit, dan sampai akhir tahun telah tercapai 75 unit (atau 75%); (b) Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi ditargetkan sebanyak 60 unit, sampai dengan akhir tahun 2018 telah tercapai 103 unit (atau 150%); (c) Persentase peningkatan populasi 25 spesies satwa terancam punah prioritas (sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species*) sebesar 10% dari *baseline* data tahun 2013, dimana setiap tahun ditargetkan meningkat sebanyak 2%, namun pada tahun 2018 hanya tercapai 0,82% atau 41% dari target awal; (d) Jumlah unit kawasan ekosistem esensial yang

terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 10 unit, namun sampai akhir tahun 2018 hanya tercapai 60% dari target yang ditentukan yaitu 6 unit; dan (e) Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 7 paket dan telah terealisasi seluruhnya (100%).

Sasaran program kedua adalah meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 4 indikator kinerja, yaitu: (a) Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* ditargetkan sebesar Rp. 5 Triliun, dan sampai dengan akhir tahun 2018 realisasinya jauh melebihi target tersebut, yaitu mencapai 13,16 Triliun (atau 150%); (b) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun (atau sebanyak 450.000 orang per tahun), dan pada tahun 2018 target tersebut telah terealisasi 108,05% dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 486.240 orang; (c) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun atau sebanyak 4.000.000 orang per tahun, target tersebut juga terealisasi sepenuhnya dengan capaian yang jauh melebihi target kunjungan tersebut, yaitu lebih dari 6,9 juta wisatawan nusantara (150%); (d) Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit meliputi



Rafflesia Arnoldi tumbuh di dalam batang liana (tumbuhan merambat) dari genus *Tetrastigma*. *Rafflesia arnoldii* tidak memiliki daun sehingga tidak mampu berfotosintesis sendiri. *Rafflesia Arnoldi* bisa kita temukan di Kawasan TNKS
© Alain Compost

////////////////////////////////////

usaha pariwisata alam (100 unit), pemanfaatan jasa lingkungan (25 Unit), dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal (5 Unit), dengan target tahunan sebanyak 26 unit. Pada akhir tahun 2018 jumlah tersebut telah terealisasi 150%, melebihi target yang ditentukan dengan dikeluarkannya izin atas 71 kemitraan yang meliputi 45 unit usaha pariwisata alam dan 26 unit pemanfaatan jasa lingkungan air.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.042.022.621.000,-. Dari jumlah tersebut Rp. 938.048.840.000,- atau 45,94% diantaranya merupakan anggaran belanja non operasional untuk mendukung 4 kegiatan prioritas nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu Kesehatan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Ketahanan Energi, serta Pengembangan Wilayah. Sampai dengan akhir tahun 2018 total realisasi anggaran Direktorat Jenderal KSDAE mencapai Rp 1.947.883.386.312,- atau 95,39%, sedangkan khusus realisasi anggaran untuk prioritas nasional sebesar Rp. 885.070.455.152,- atau 94,35%. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal KSDAE, dilakukan dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja (109,34%) dengan realisasi anggaran (95,39%). Hasilnya menunjukkan rasio efisiensi sebesar 1,15 yang dapat diartikan penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran program pada Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 berjalan secara efisien.



*Vegetasi Mangrove di Sungai Sanjang
TN Berbak Sembilang
© Istimewa (SPTN 2 Sembilang)*



DAFTAR ISI

- 1.** Daftar Istilah
- 5.** Kata Pengantar
- 10.** Ringkasan Capaian Kinerja
- 13.** Daftar Isi
- 16.** BAB I Pendahuluan
- 22.** BAB II Perencanaan Kinerja
- 26.** BAB III Akuntabilitas Kinerja
- 94.** BAB IV Penutup
- 96.** Daftar Pustaka

DAFTAR GAMBAR

- 18.** Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE
- 18.** Pegawai Direktorat Jenderal KSDAE
- 19.** Komposisi PNS Per Jabatan
- 21.** Aset Ditjen KSDAE Tahun 2018
- 31.** Nilai METT Ditjen KSDAE Tahun 2018
- 32.** Nilai METT Ditjen KSDAE Tahun 2017
- 32.** Nilai METT Ditjen KSDAE Tahun 2015 dan 2016
- 42.** Jumlah Populasi 25 Spesies Prioritas
- 49.** Capaian Pembentukan KEE Tahun 2015-2018
- 64.** Perkembangan PNNP Pemanfaatan Jasa Lingkungan kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2014-2018
- 64.** Empat Sumber Terbesar PNNP Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2018
- 66.** Perbandingan Devisa Per-Komoditi Tahun 2017-2018
- 66.** Perbandingan Target dan Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL Tahun 2015-2018
- 67.** Devisa pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam tahun 2018
- 69.** Jumlah Wisman Tahun 2015-2018
- 70.** Sepuluh Kawasan Konservasi dengan Jumlah Wisatawan Mancanegara Terbanyak Tahun 2018
- 71.** Jumlah Wisman Tahun 2015-2018
- 72.** Sepuluh Kawasan Konservasi dengan Jumlah Wisatawan Nusantara Terbanyak Tahun 2018
- 73.** Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi tahun 2018
- 75.** Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA Tahun 2015-2018
- 77.** Perkembangan IUPA dan IPA Tahun 2015-2019
- 81.** Pagu dan Realisasi Kegiatan Prioritas Nasional
- 89.** Jumlah tenaga kerja pada usaha pemanfaatan wisata alam dan TSL
- 90.** Perbandingan Pagu dan Realisasi tahun 2014-2018
- 91.** Anggaran Per Kegiatan
- 91.** Anggaran Per Jenis Satuan Kerja

DAFTAR TABEL

- 27.** Capaian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018
- 37.** Kategorisasi Penilaian KPHK
- 40.** Capaian Peningkatan Populasi 25 Satwa Prioritas Tahun 2015-2018
- 41.** Perbandingan 25 Satwa Prioritas Terancam Punah dengan Baseline
- 53.** Data Ketersediaan Data 7 Wilayah Biogeografi
- 59.** Lokasi Uji Petik Jumlah Ketersediaan Data Tahun 2015-2018
- 60.** Jenis-jenis tumbuhan obat TNMB yang merupakan bahan baku obat-obat modern di Amerika Serikat
- 61.** Jenis-jenis jamu produk kelompok King Betiri
- 67.** Data Ekspor Pemanfaatan TSL Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 3 sasaran strategis dari mandat agenda pembangunan nasional. Strategi pencapaiannya ditetapkan melalui pelaksanaan 13 program untuk tahun 2015-2019. Salah satu program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE adalah Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Untuk memetakan keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka ditetapkan 2 sasaran program yaitu: (1) peningkatan efektifitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Pengukuran tingkat capaian sasaran program didasarkan pada 9 indikator kinerja, yaitu: (1) nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan; (2) KPHK non Taman Nasional yang terbentuk dan beroperasi; (3) peningkatan populasi 25 spesies prioritas; (4) nilai ekspor pemanfaatan TSL dan *bioprospecting*; (5) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; (6) jumlah kunjungan wisatawan domestik; (7) kemitraan pengelolaan kawasan konservasi; (8) kawasan ekosistem esensial yang terbentuk; dan (9) ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati.

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2018, Direktorat Jenderal KSDAE mendapat mandat untuk berperan serta dalam mensukseskan 4 Prioritas Nasional, dari 14 Prioritas Nasional yang menjadi mandat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keempat

prioritas nasional tersebut adalah: (1) Kesehatan, (2) Pariwisata dan Dunia Usaha, (3) Ketahanan Energi, dan (4) Pembangunan Wilayah. Pencapaian 4 prioritas nasional dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dilaksanakan melalui 8 kegiatan, yaitu: (1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Pengelolaan Taman Nasional dan (8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE. Pengukuran tingkat capaian kegiatan didasarkan pada indikator kinerja masing-masing kegiatan.

Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE diarahkan untuk memenuhi tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan KSDAE dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial

pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial

pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

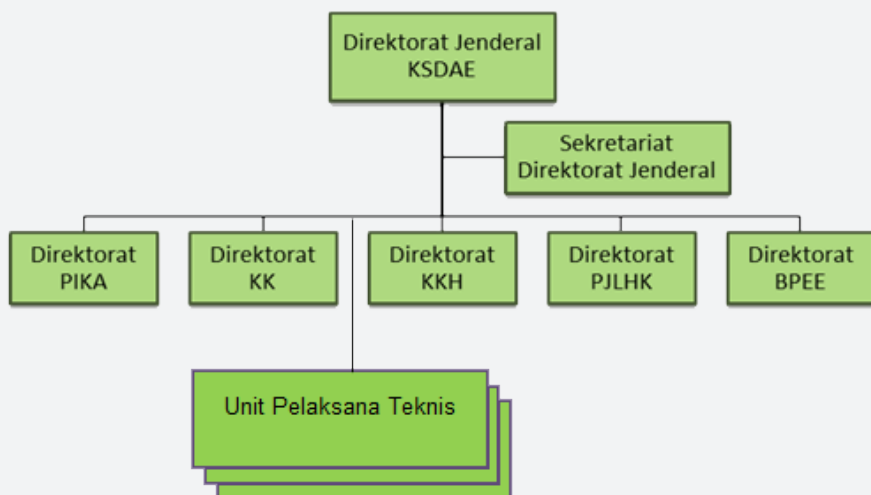
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Direktorat Jenderal KSDAE terdiri dari Sekretariat Jenderal dan 5 Direktorat. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis KSDA dan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki 74 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

yang terdiri atas Balai Besar (setingkat Eselon II) dan Balai (setingkat Eselon III), meliputi 8 UPT Balai Besar Taman Nasional, 8 UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, 18 UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan 48 UPT Balai Taman Nasional. Untuk menjalankan struktur organisasi tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki PNS sebanyak 6.664 orang yang sebaran terbanyak berkedudukan di UPT.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE

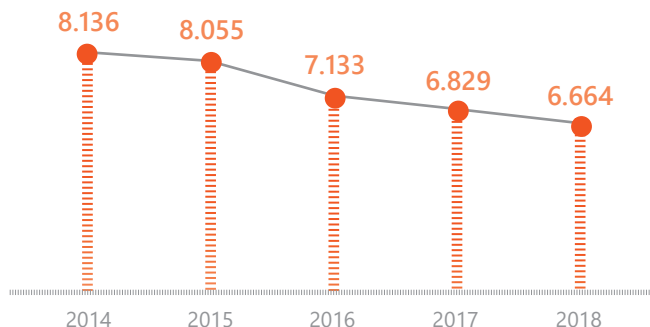


Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE

Pegawai Direktorat Jenderal KSDAE

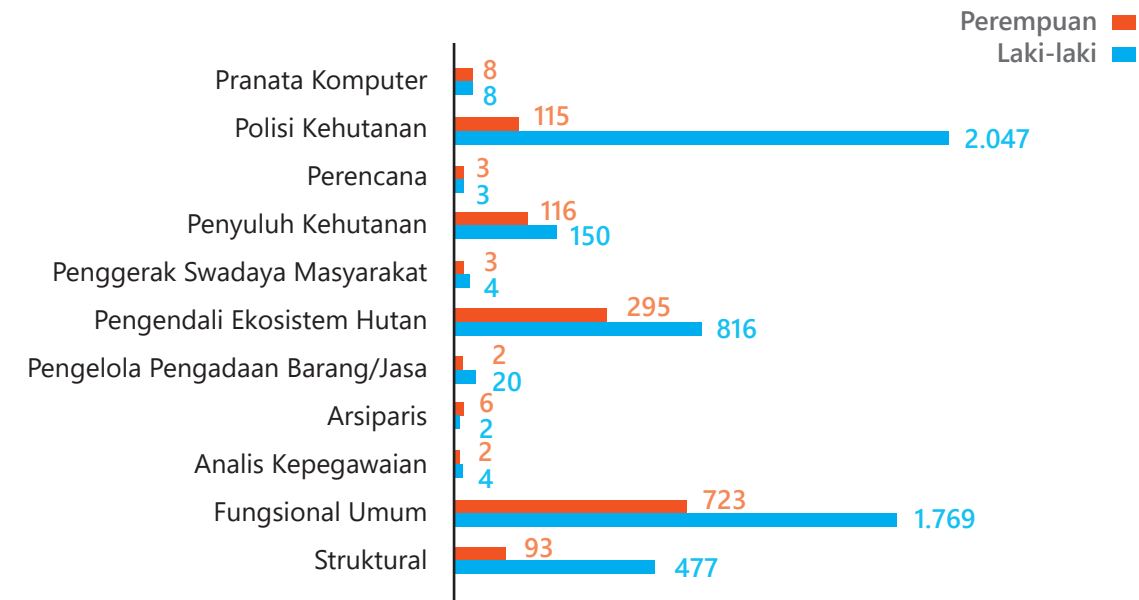


Jumlah PNS selama 5 tahun terakhir



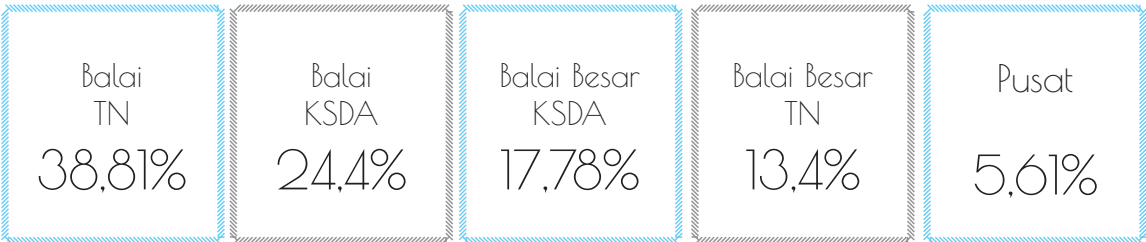
Gambar 2. Pegawai Direktorat Jenderal KSDAE

Komposisi PNS Per Jabatan



Gambar 3. KOMPOSISI PNS Per Jabatan

Sebaran PNS Per Lokasi



Sumber: Setditjen KSDAE, 2018



Rusa Timor diantara *Pakis Bianaya*, *Pakis Binaya* merupakan salah satu flora endemik yang terdapat pada lokasi puncak Binaya di kawasan TN Manusela
© Daryanto

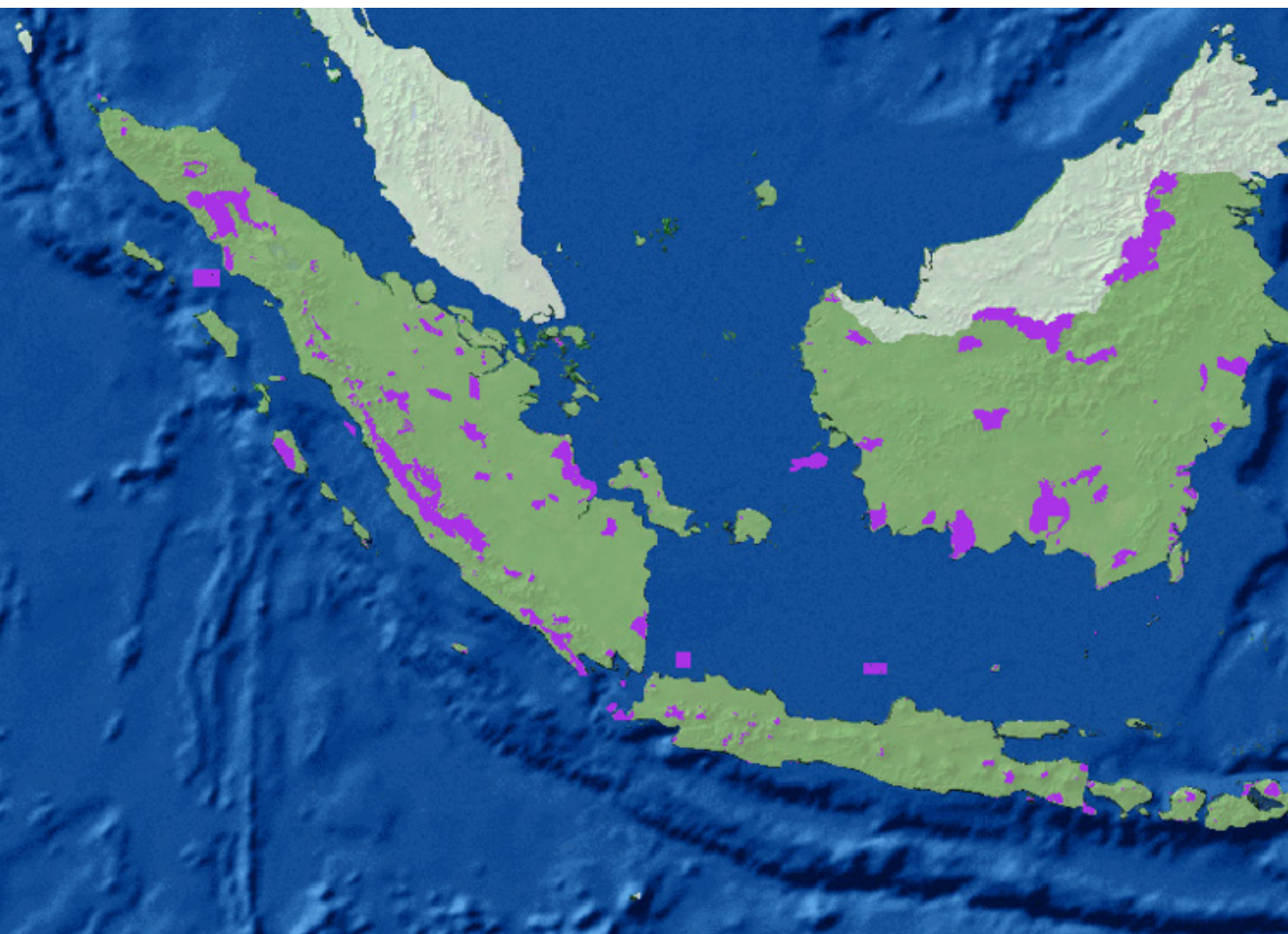
Kawasan Konservasi

Luas kawasan konservasi di Indonesia saat ini mencapai 27.140.384,06 Ha yang terbagi dalam 552 unit kawasan konservasi.

Rekapitulasi fungsi dan luas kawasan konservasi disajikan dalam data berikut.

CA		SM		TWA	
4,248,131.78 Ha		4,982,406.13 Ha		829,2776.66 Ha	
214 Unit		79 Unit		131 Unit	
TB		Tahura		TN	
171,250.00 Ha		371,124.39 Ha		16,232,132.17 Ha	
11 Unit		34 Unit		54 Unit	
				KSA/KPA	
				306,062.92 Ha	
				29 Unit	

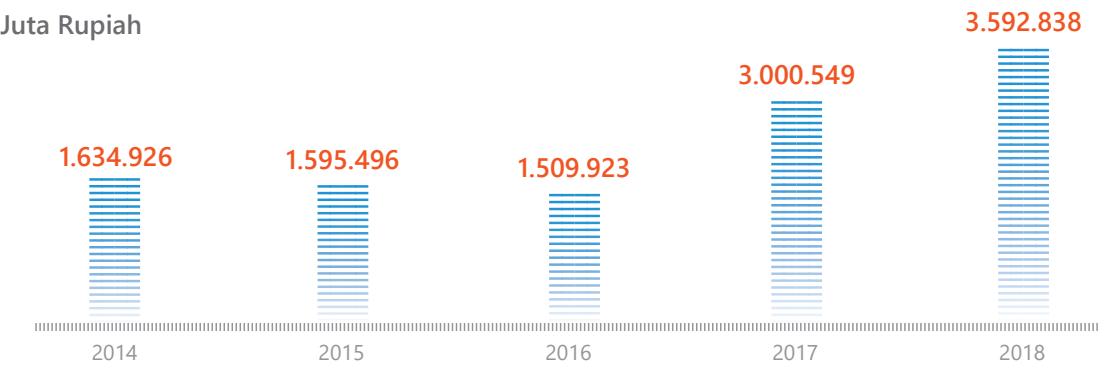
Sumber: Direktorat PIKA, 2018



Aset

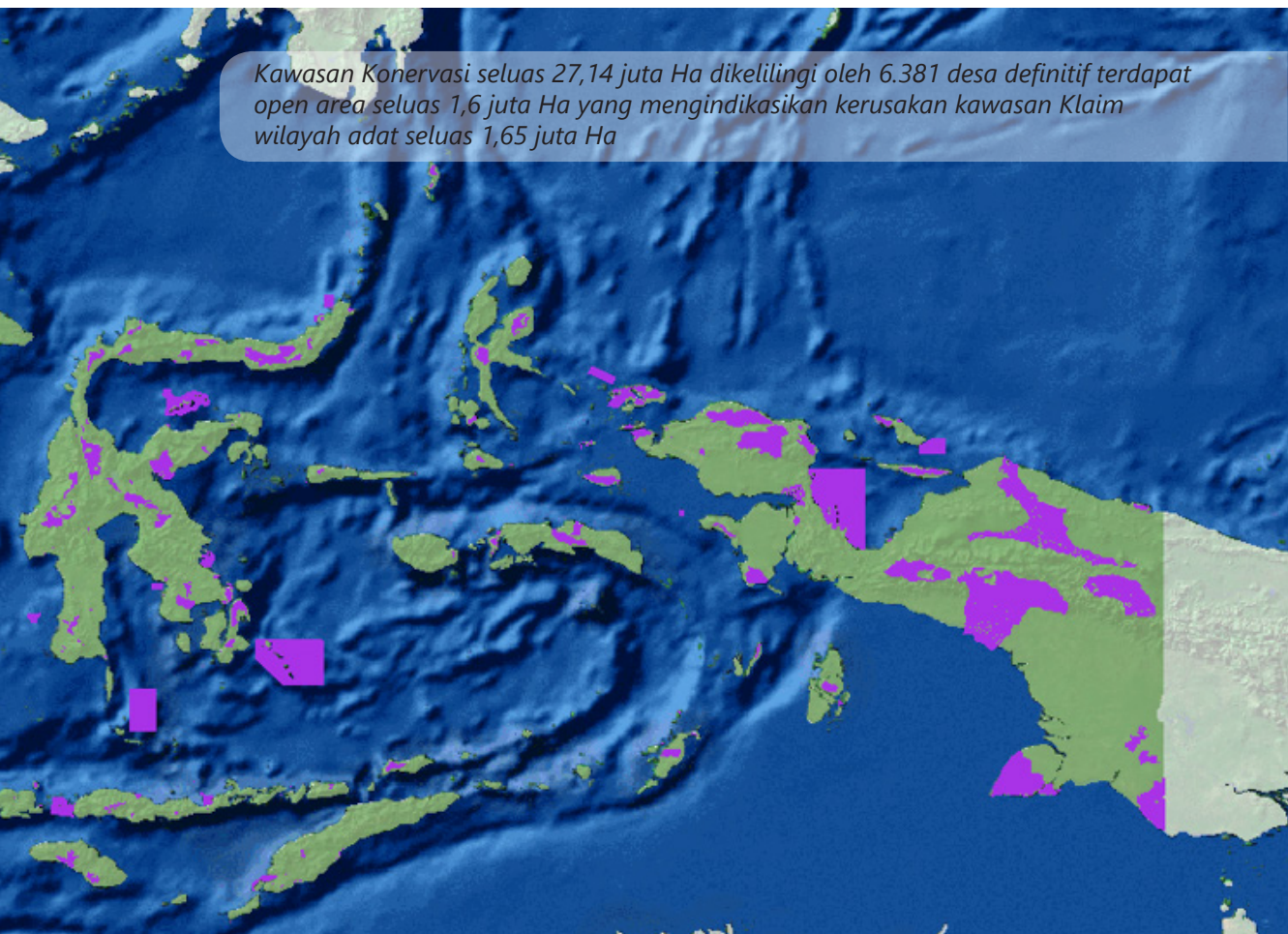
Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 sebesar Rp. 3.593.035.794.887.-.

Perkembangan aset Direktorat Jenderal KSDAE selama lima tahun disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 4. Aset Ditjen KSDAE Tahun 2018

Sumber: Setditjen KSDAE, 2018



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 berupa “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, pembangunan dilaksanakan dengan 7 misi, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan

masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan pembangunan bidang KSDAE :
Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia

Sasaran Strategis

- 01
- Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
- 02
- Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

8 KEGIATAN



Pemolaan dan Informasi Kawasan Konservasi



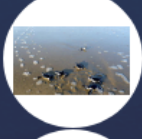
Pembinaan Kawasan Konservasi Ekosistem Esensial



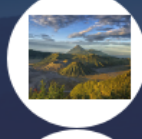
Pengelolaan Kawasan Konservasi



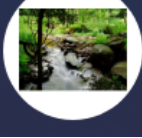
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati



Konservasi Spesies dan Genetik



Pengelolaan Taman Nasional



Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi



Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE

Direktorat Jenderal KSDAE menjadi penanggung jawab pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Program ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah: (1) Peningkatan

efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Tahapan upaya pencapaian sasaran dari Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, adalah sebagaimana diuraikan dalam milestone pada gambar berikut.

2015	Indikatif arahan rancang bangun hingga penetapan KPHK terselesaikan; Tersedianya informasi hasil self assesment METT oleh UPT KSDA dan TN; SDM, tools dan rancangan sistem IKA telah disiapkan; Rancangan lembaga pengelola KEE, koridor KK dan HCVF telah dikoordinasikan deng	Baseline data, serta hasil identifikasi dan inventarisasi telah tersedia.	Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi; Peningkatan PNBP dan penerimaan devisa dari ekspor TSL.
2016	Rancangan kelembagaan KPHK, serta sarana dan prasarana operasional KPHK telah tersedia secara memadai; Hasil assesment METT telah terverifikasi dan tersedia rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sesuai dengan isu dan kriterianya; Sistem dan jaringan IKA telah terbangun; Rencana aksi pengelolaan KEE, koridor KK & HCVF telah disusun.	Ketersediaan data hasil identifikasi, inventarisasi dan/atau sensus	Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi; Peningkatan PNBP dan penerimaan devisa dari ekspor TSL.
2017	KPHK beroperasi; Hasil assesment METT telah terverifikasi dan tersedia rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sesuai dengan isu dan kriterianya; Sistem dan jaringan IKA berfungsi; Rancangan penataan pengelolaan KEE, koridor KK & HCVF telah tersedia.	Pembinaan habitat, pembinaan populasi, restocking, pelepasliaran, monitoring populasi terlaksana	Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi; Peningkatan PNBP dan penerimaan devisa dari ekspor TSL.
2018	KPHK beroperasi; Hasil assesment METT telah terverifikasi dan tersedia rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sesuai dengan isu dan kriterianya; Data dan informasi keanekaragaman hayati yang valid dan reliable telah tersedia dalam platform yang accesible; Kelembagaan pengelola KEE, koridor KK & HCVF telah beroperasi.	Pembinaan habitat, pembinaan populasi, restocking, pelepasliaran, monitoring populasi terlaksana.	Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi; Peningkatan PNBP dan penerimaan devisa dari ekspor TSL.
2019	Operasional 100 Unit KPHK yang efektif (establish); 260 Unit KK memperoleh nilai METT dengan kategori baik (efektif); Sistem dan jaringan IKA yang stabil, data dan informasi yang up to date; Pengelolaan KEE, koridor KK & HCVF yang efektif.	Peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sebesar 10% dari baseline data tahun 2013.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi sebanyak 20 Juta Wisnus dan 1,5 Juta Wisman; Penerimaan devisa dari ekspor TSL sebesar Rp. 25 T.
			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati		Kelestarian Spesies dan Sumberdaya Genetik	Pemanfaatan Berkelanjutan

B. Rencana Kerja Tahun 2018

Dalam rangka meningkatkan kinerja (*performance*) dan akuntabilitas (*accountability*) penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE pada seluruh Satker, Direktorat Jenderal KSDAE menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang menjadi dasar penilaian kinerja tahunan yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2018. Terdapat 2 Sasaran Program/Kegiatan dengan 9 indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Sasaran Program/Kegiatan yang pertama

yaitu Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, diukur melalui Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (IKP/K) 1-4; sedangkan Sasaran Program/Kegiatan kedua yaitu Meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati yang diukur melalui IKP/K 5-9.



*Pulau Hoga sebagai salah satu obyek wisata unggulan
di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II.
TN Wakatobi
© Hendrawan*



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metode Pengukuran



$$\text{Rumus Capaian Kinerja : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Catatan : Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Jenderal KSDAE.

B. Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE

Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakikatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018. Terdapat 2 sasaran dan 9 indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat Jenderal KSDAE

yang tertuang dalam dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil pengukuran, capaian kinerja indikator kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018.

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 Juta Ha)	Unit	100	75	75,00
		Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	Unit	60	103	150,00
		Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>) sebesar 10% dari <i>baseline</i> data tahun 2013	%	2	0,82	41,00
		Jumlah unit kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 10 unit	Unit	10	6	60,00
		Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	paket	7	7	100,00
2	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i>	T	5	13,16	150,00
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 th	Orang	450.000	486.240	108,05
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan knservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 th	Orang	4.000.000	6.919.108	150,00
		Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 unit, pemanfaatan jasa lingkungan sebanyak 25 unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 unit)	Unit	26	71	150,00
Rata-rata capaian kinerja						109,34

“ SASARAN 1
*Meningkatnya
Efektivitas
Pengelolaan Hutan
Konservasi dan
Upaya Konservasi
Keanekaragaman
Hayati ”*

Gajah di HSA PLG KH Isau-Isau selain dipelihara untuk menjaga keberlangsungan hidupnya juga dilatih untuk mengamankan hutan dari gangguan pembalakan, penggembalaan liar dan gangguan kawasan lainnya.

HSA PLG KH Isau-Isau, Sumatera Selatan

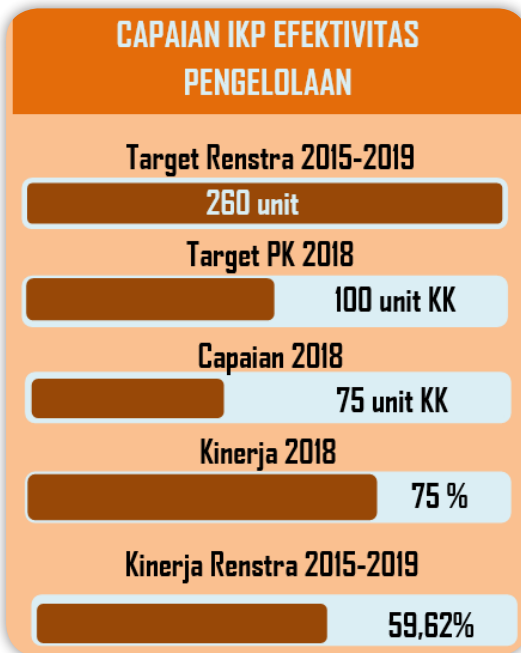
© Taufan Kharis (PEH)



Sasaran ini dicapai melalui 5 indikator kinerja kegiatan yaitu :

1. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 Juta hektar.
2. Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 60 Unit
3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species*) sebesar 10% dari *baseline* data tahun 2013
4. Jumlah unit kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolannya sebanyak 10 unit
5. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang *valid* dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Penjelasan atas capaian indikator kinerja disampaikan sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1

Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 Juta hektar)

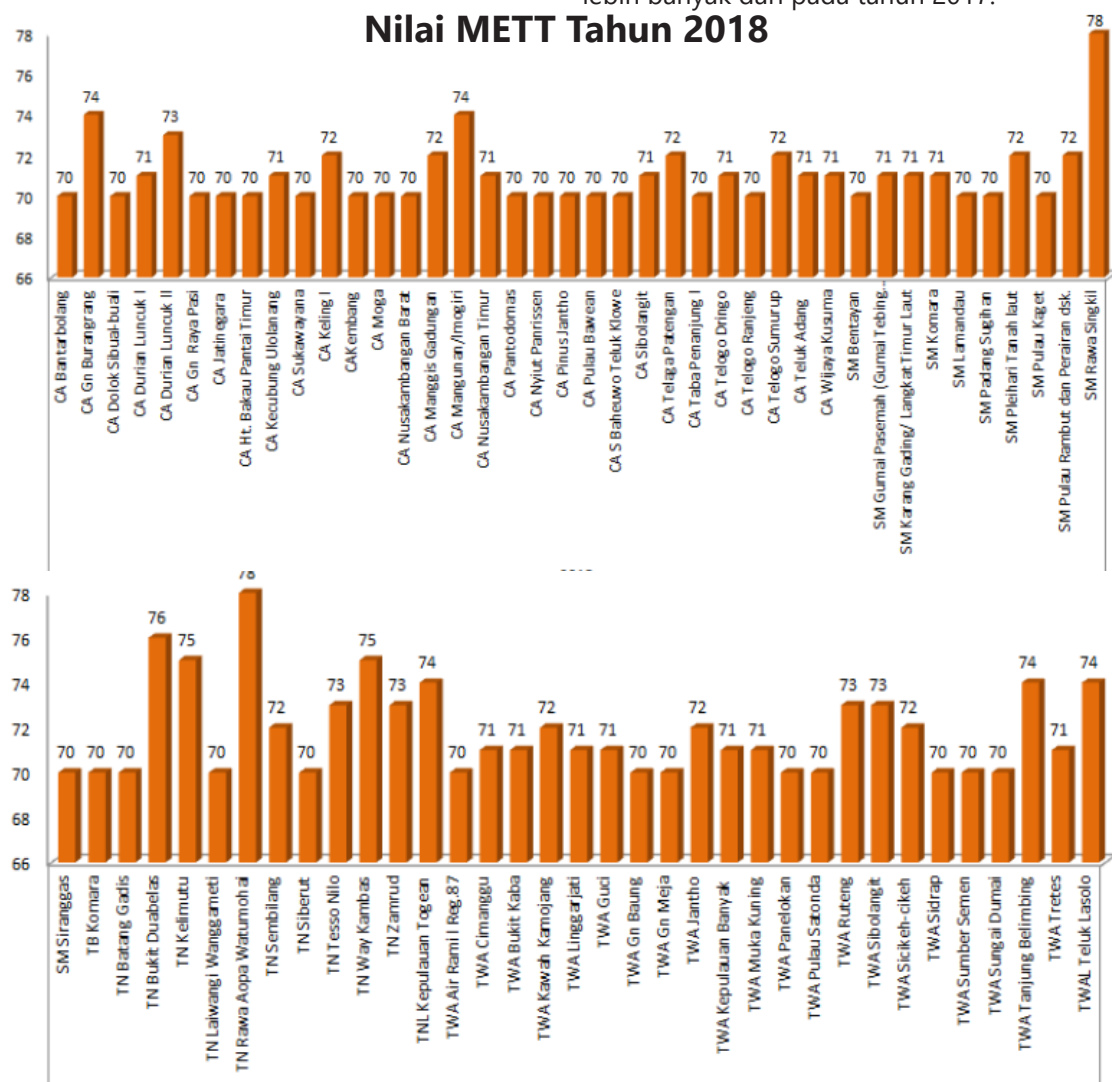
Pentingnya eksistensi kawasan konservasi sebagai benteng perlindungan spesies dan keanekaragaman hayati, serta mendukung kehidupan manusia, mendorong tekad pemerintah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan kawasan konservasi. Peningkatan kualitas tersebut perlu dimonitor dengan menggunakan metode yang sesuai yaitu dengan mengevaluasi pengelolaan kawasan konservasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan kawasan konservasi telah dilakukan. Penilaian efektivitas dimaksudkan untuk mengkaji seberapa

besar tingkatan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan, terutama terhadap perlindungan nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilai efektivitas dengan baik, upaya penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalam kawasan telah dilakukan, sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan tersebut.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia diinisiasi sejak tahun 2010 melalui metode *Rapid Assessment and*

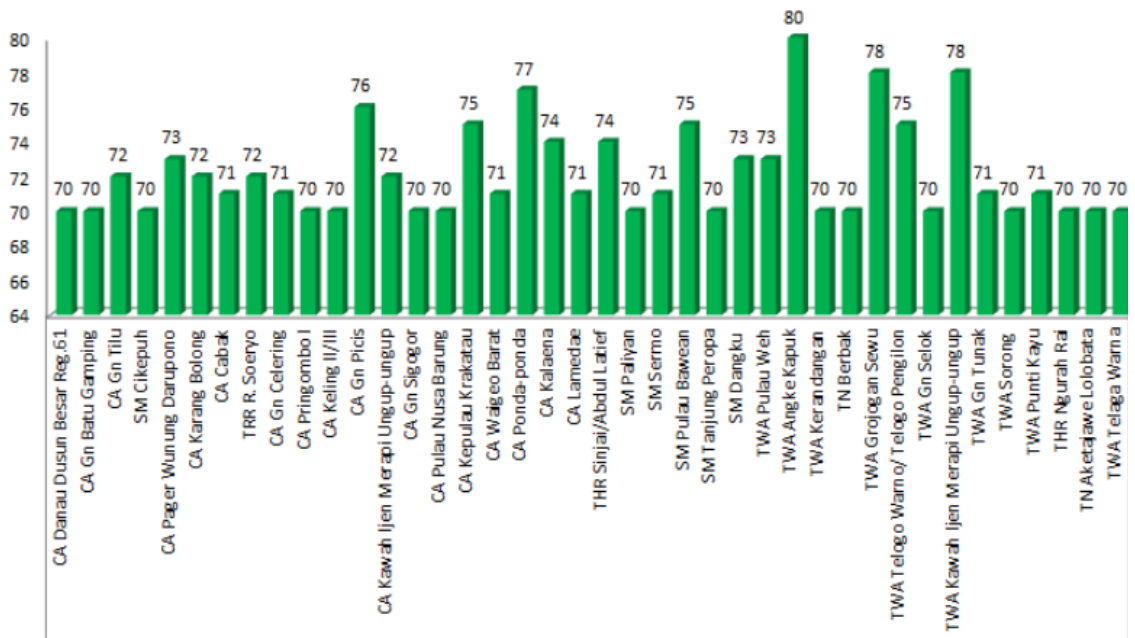
Prioritisation of Protected Area Methodology (RAPPAM) dan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Kemudian pada tahun 2015, Indonesia mengadopsi METT secara resmi menjadi kebijakan nasional sebagai salah satu indikator kinerja utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penilaian METT sebagai alat evaluasi pengelolaan kawasan konservasi terdiri 3 lembar penilaian yaitu: 1) Laporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi yaitu berisi detail penilaian dan informasi dasar tentang situs; 2) Data Ancaman Kawasan Konservasi, yaitu berisi 52 jenis ancaman yang dihadapi kawasan konservasi; dan Lembar Penilaian yang terisi dari 30 pertanyaan dalam format tabel, termasuk 3 kolom untuk mencatat detail dari penilaian.

Tahun 2018 kawasan konservasi dengan nilai indeks METT minimal 70% tercapai sebanyak 75 kawasan, yang terdiri atas 30 Cagar Alam, 11 Suaka Margasatwa, 1 Taman Buru, 10 Taman Nasional, 1 Taman Nasional Laut, 21 Taman Wisata Alam, dan 1 Taman Wisata Alam Laut. Jumlah kawasan yang mempunyai nilai indeks efektivitas $\geq 70\%$ pada tahun 2018 meningkat cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu sebanyak 35 kawasan. Target pada IKP ini berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2018 sebanyak 100 unit kawasan konservasi, sehingga capaian kinerjanya sebesar 75%. Persentase capaian kinerja tahun 2018 ini mengalami penurunan sebesar 10,11%. apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Hal tersebut disebabkan karena target dalam perjanjian kinerja tahun 2018 lebih banyak dari pada tahun 2017.



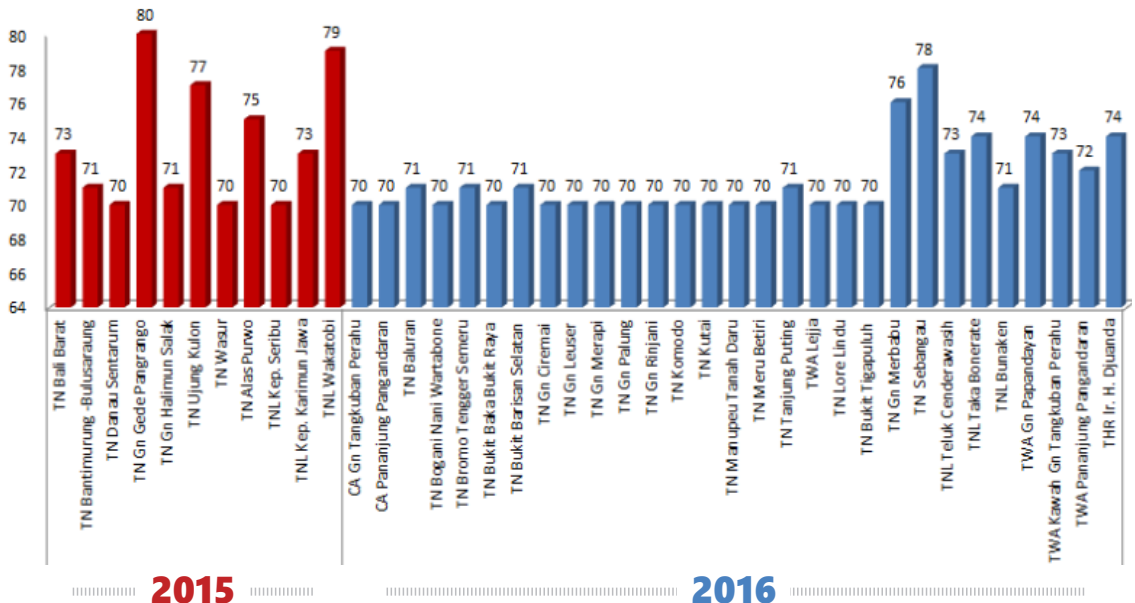
Gambar 5. Nilai METT Ditjen KSDAE Tahun 2018

Nilai METT Tahun 2017



Gambar 6. Nilai METT Ditjen KSDAE Tahun 2017

Nilai METT Tahun 2015 dan 2016



Gambar 7. Nilai METT Ditjen KSDAE Tahun 2015 dan 2016

Dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE target jumlah kawasan konservasi dengan nilai METT $\geq 70\%$ pada tahun 2018 sebanyak 50 kawasan, maka capaiannya sebesar 150%. Secara kumulatif sampai tahun 2018 capaian IKP ini sebanyak 155 kawasan, sehingga apabila dibandingkan dengan target Renstra selama 5 tahun sebanyak 260 unit KK maka capaiannya sebanyak 59,62%.

Untuk memenuhi target tersebut telah dilakukan kegiatan dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan di tingkat tapak sesuai dengan hasil rekomendasi tindak lanjut pada penilaian sebelumnya. Pada awal tahun Renstra, pencapaian jauh dari target yang ditentukan. Berdasarkan analisis hasil penilaian METT pada tahun 2015 dan 2017 terdapat unsur-unsur pengelolaan

kawasan yang efektif belum dilakukan, yang menyebabkan hasil penilaian METT rendah, misalnya: alokasi anggaran kurang memadai, distribusi pegawai tidak proporsional, masih banyak kawasan yang belum mempunyai dokumen perencanaan, pengelolaan belum fokus pada mandat kawasan, sebagian kawasan tidak menyusun rencana pengelolaan jangka pendek, dan keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam proses pengelolaan masih terbatas. Berdasarkan hasil evaluasi atas permasalahan tersebut, selanjutnya pada tahun 2018 UPT telah berupaya melakukan perbaikan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif, dengan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, sehingga efektivitas pengelolaan kawasan dapat berjalan dengan baik, yang diindikasikan dengan nilai METT yang meningkat.



Rangkong ini merupakan satwa endemik pulau Sulawesi dan sekaligus menjadi fauna identitas Sulawesi Selatan. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung merupakan salah satu kawasan konservasi yang menjadi habitat bagi keberadaan rangkong Sulawesi

© Kama Jaya Shagrir

CAPAIAN IKP BEROPERASINYA KPHK NON TN

Target Renstra 2015-2019

100 unit KPHK

Target PK 2018

60 unit KPHK

Capaian 2018

103 unit KPHK

Kinerja 2018

150 %

Kinerja Renstra 2015-2019

103 %

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2

**Jumlah KPHK non TN yang terbentuk
dan beroperasi sebanyak 60 Unit**

Pengelolaan kawasan konservasi, terutama non taman nasional terus diupayakan agar tercipta pengelolaan yang efektif dan efisien. Salah satu caranya yaitu dengan pengelolaan di tingkat tapak melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Pasal 17), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2014 (Pasal 28) dan PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008, KPH didefinisikan sebagai kesatuan wilayah hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien dan lestari.

Direktur Jenderal KSDAE dimandatkan untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), terutama untuk kawasan-kawasan non taman nasional. Saat ini, KPHK masih berada di bawah manajemen Balai/Balai Besar KSDA, dimana organisasi ini belum menjadi sub organisasi struktural. Di masa yang akan datang, KPHK diharapkan dapat berbentuk organisasi struktural, baik sebagai unit kerja mandiri maupun sebagai bagian dari organisasi Balai/Balai Besar KSDA.

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019 telah ditetapkan 100 unit KPHK non taman nasional yang harus operasional. Terkait hal tersebut, telah disusun petunjuk teknis melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016, tanggal 20 Juli 2016 untuk memberikan arahan atau pedoman bagi UPT dan pihak terkait dalam mempersiapkan pembentukan KPHK serta pengelola KPHK untuk mengelola kawasan secara efektif dan lestari.

Tahun 2018 target jumlah KPHK Non TN yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 60 unit, dengan realisasi sebanyak 103 unit sehingga capaian kinerja tahun 2018 untuk IKP ini sebesar 171,67% (pembatasan capaian kinerja maksimal 150%). Dengan adanya pembatasan capaian kinerja maksimal, maka apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan target sebesar 10 unit dan realisasi sebanyak 35 unit, maka capaian kinerja tahun 2018 dianggap tetap, meskipun secara kumulatif pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah KPHK sebanyak 22 unit.



Peta Sebaran KPHK Non TN di Indonesia

Keterangan :

- Batas Provinsi
- Kawasan Konservasi
- KPHK Non TN

No.	Nama KPHK	No.	Nama KPHK	No.	Nama KPHK	No.	Nama KPHK	No.	Nama KPHK
1	Pulau Weh	22	Hutan Bakau Pantai Timur	43	Dataran Tinggi Yang	64	Pamona	84	Gunung Mutis
2	Janthoi	23	Dangku Bentayan	44	Nusa Barung Watangan	65	Bakriang	85	Tuti Adagae
3	Lingga Isaq	24	Padang Sugihan	45	Kawah Ijen	66	Morowali	86	Ndeta Kilikima
4	Rawa Singkil	25	Gumai Pasemah	46	Pulau Saabi	67	Towuti	87	Wae Wuul
5	Pulau Banyak	26	Gunung Raya	47	Gunung Melintang	68	Mario	88	Teluk Maumere
6	Sicike-cike	27	Seblat	48	Gunung Nylut	69	Komara	89	Riung
7	Barumun	28	Bukit Kaba	49	Mandor Pasi	70	Mangollo	90	Kateri
8	Karang Gading	29	Pantai Panjang	50	Kelam Komplek	71	Peropa	91	Camplong
9	Sibolangit	30	Enggano	51	Kep. Karimata	72	Buton Utara	92	Ale Aisio
10	Sipirok	31	Kepulauan Krakatau	52	Muara Kendawangan	73	Lambusango	93	Watu Ata
11	Dolok Tinggi Raja	32	Jakarta	53	Lamandau	74	Bedugul Sangeh	94	Teluk Kupang
12	Dolok Surungan	33	Simpang Tilu	54	Tanjung Keluang	75	Kintamani	95	Tallabu
13	Holiday Resort	34	Burangrang T. Perahu	55	Pararawan	76	Gunung Tunak	96	Gunung Sahuwai
14	TB Pulau Pini	35	Guntur Papandayan	56	Kuala Lupak	77	Moyo	97	Walgeo
15	Sijaba Hutaginjang	36	Cilacap	57	Tanah Laut G. Kentawan	78	Semongkat	98	Sorong Klamono
16	Arau Hilir	37	Yogyakarta	58	Muara Kaman Sedulang	79	Taliwang	99	Boimalit-Maghilit
17	Lima Puluh Koto	38	Pati Barat	59	Tangkoko	80	Suranadi	100	G. Meja Sidei Kaironi
18	Rimbang Baling	39	Sablokare	60	Nantu	81	Sangiang	101	Arfak
19	Giam Siak Kecil Bukit Batu	40	Picis Gogor Ngilrip	61	Gunung Dako	82	Ruteng	102	Nabire Tanjung Wiay
20	Kerumutan	41	Pulau Sempu	62	Gunung Tinombala	83	Harlu	103	Cycloops Youtefa
21	Durian Luncuk	42	Baung Abang Tretes	63	Pangi Binangga				

Sebaran Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Non Taman Nasional di Indonesia

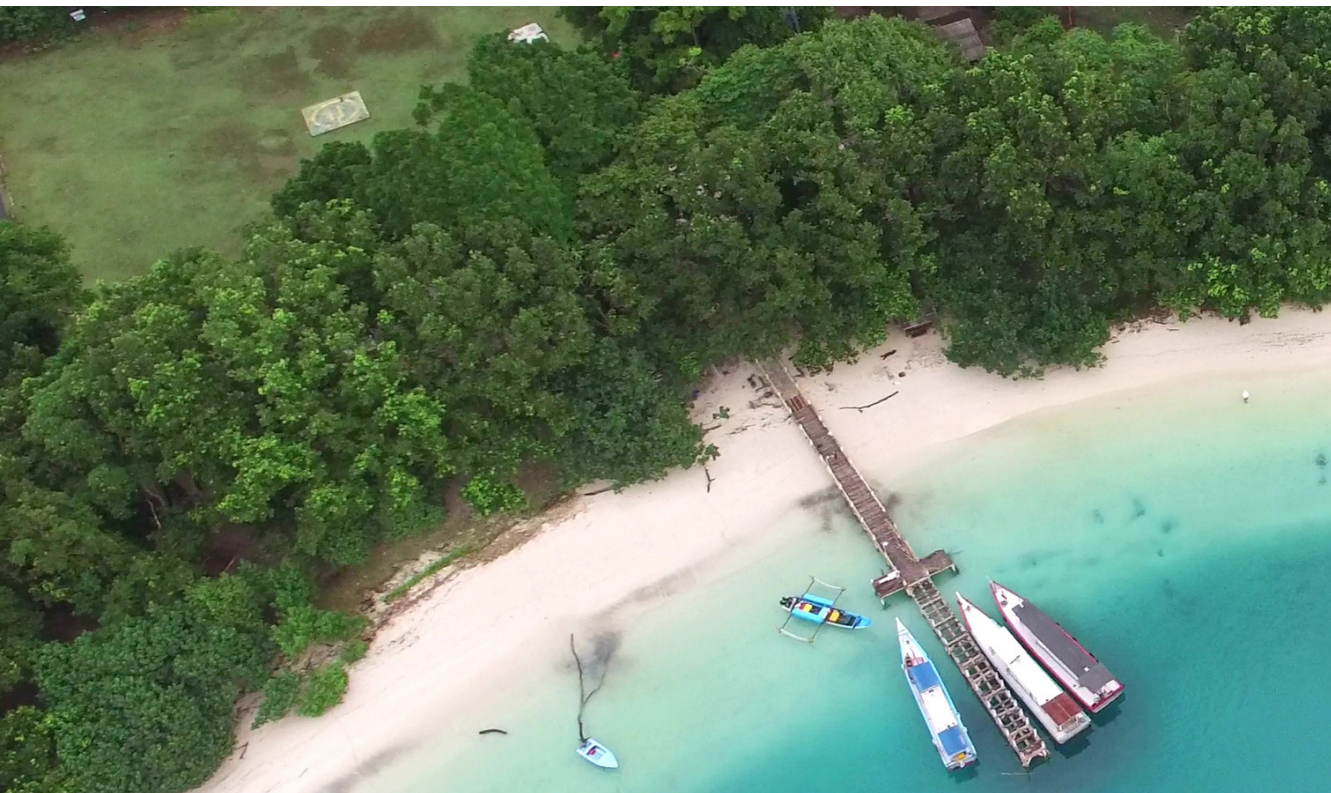
Sumber: Direktorat KK, 2018

Capaian operasionalisasi KPHK ini sangat bergantung kepada penyelesaian tahapan penetapan wilayah KPHK oleh Direktorat PIKA dan Direktorat Jenderal PKTL, sehingga jumlah capaiannya dapat terus bertambah seiring dengan penetapan unit KPHK Non TN. Sampai dengan akhir tahun 2018 telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK terkait pembentukan KPHK Non Taman Nasional sebanyak 112 SK, akan tetapi yang telah diproses ke tahap operasional hanya sebanyak 103 unit. Hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran untuk operasional KPHK yang terbatas, serta terdapat 3 unit KPHK yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga tidak dihitung ulang. Ketiga unit KPHK tersebut adalah KPHK Tambora, KPHK Jayawijaya, dan KPHK Morowali. Alasan ketiga KPHK tersebut tidak dihitung menjadi capaian karena KPHK Tambora sudah menjadi taman nasional, KPHK Jayawijaya tidak kondusif untuk dikelola menurut BBKSDA Papua, serta KPHK Morowali mendapatkan 2 (dua) SK yang terbit pada tahun 2013 dan tahun 2017.

Dalam Renstra tahun 2015-2019 target lima tahunan jumlah KPHK yang beroperasi sebanyak 100 unit, dan sampai dengan tahun keempat periode Renstra, telah beroperasi sebanyak 103 unit KPHK. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini telah

melebihi target yang ditetapkan selama lima tahun (103%).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 Tentang Petunjuk Teknis Operasional KPHK, syarat mutlak yang harus dipenuhi agar KPHK beroperasi yaitu 1) Wilayah KPHK; 2) Organisasi KPHK; 3) SDM; 4) Sarana dan Prasarana; dan 5) Ketersediaan Dana/Anggaran. Kawasan yang ditetapkan menjadi KPHK non TN sesungguhnya telah dikelola oleh UPT Direktorat Jenderal KSDAE, sehingga syarat mutlak operasionalisasi KPHK dapat dipenuhi relatif cepat. Untuk menentukan kesiapan operasional KPHK tersebut pada tahun 2018 Direktorat Konservasi Kawasan selaku penanggungjawab operasionalisasi KPHK telah menyusun pedoman penilaian operasional KPHK dan melakukan penilaian terhadap 35 unit KPHK mewakili region Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pedoman tersebut menilai kesiapan dari operasional KPHK, yang sebagian besar dilihat dari pemenuhan aspek-aspek yang bersifat manajemen dan administratif, dan bukan menilai kinerja ataupun efektivitas. Hal ini lebih dikarenakan penilaian atas kinerja ataupun efektivitas telah tersedia alatnya tersendiri yaitu METT.

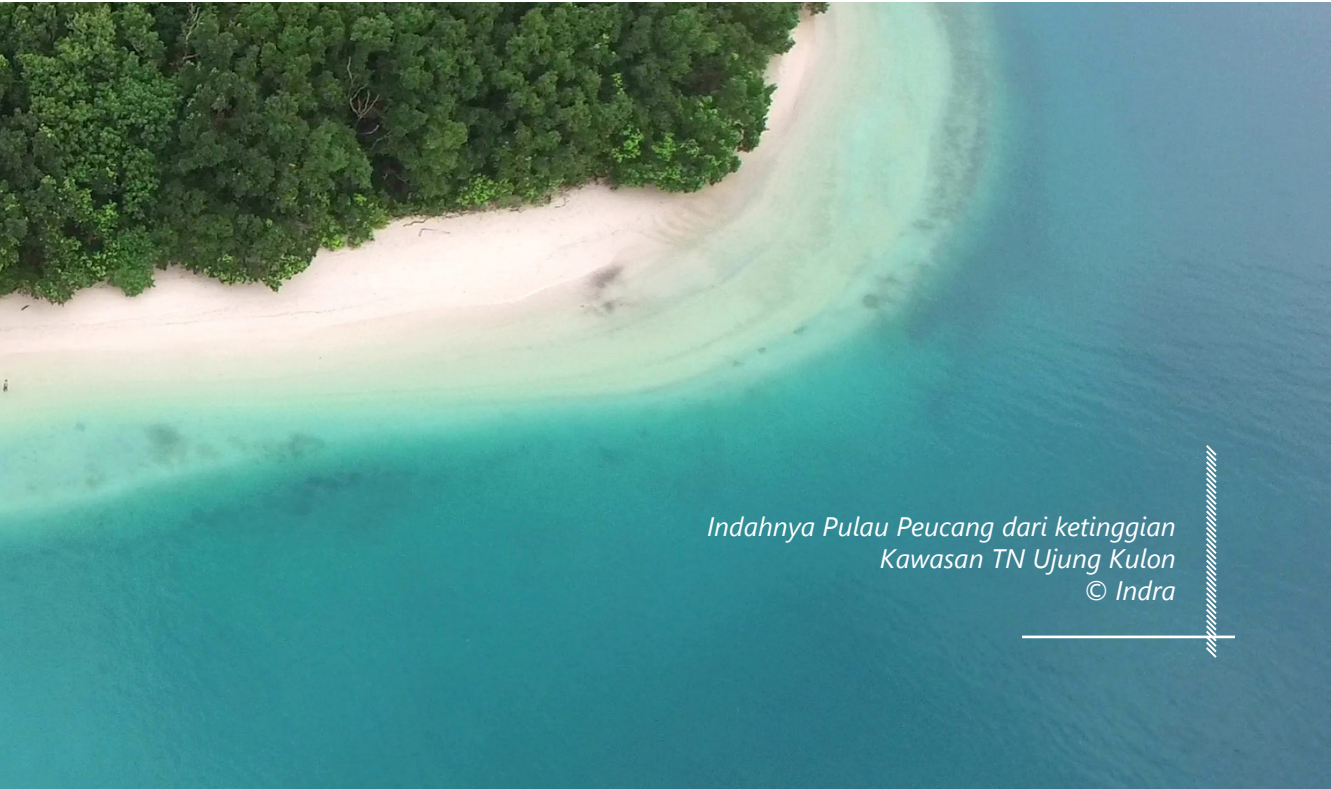


Dari penilaian terhadap KPHK, hasilnya dapat tersaji pada tabel berikut:
dibedakan menjadi tiga kategori sebagaimana

Tabel 2. Kategorisasi Penilaian KPHK

Kategorisasi	Upaya Tindak Lanjut
KATEGORI I "Operasional dengan perlu pendampingan dan pembinaan khusus"	1. Penetapan Kepala KPHK beserta sumber daya manusianya. 2. Pengalokasian sarana prasarana operasional KPHK. 3. Pemenuhan kelengkapan dokumen perencanaan. 4. Pelaksanaan kegiatan minimal (perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan).
KATEGORI II "Operasional dengan perlu pendampingan"	1. Pemenuhan SDM dan Sarpras sesuai standar, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi/ spesifikasinya. 2. Pemenuhan kelengkapan dokumen perencanaan. 3. Pengembangan peluang kerjasama dan investasi.
KATEGORI III "Operasional"	1. Peningkatan kapasitas pengelola. 2. Pengembangan kerjasama dan investasi.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut sebanyak 9 unit KPHK (26%) tergolong kategori III "operasional", sebanyak 25 unit KPHK (63%) masuk kategori II "operasional dengan pendampingan", dan sebanyak 1 unit KPHK (1%) mendapat kategori I "operasional dengan pembinaan intensif". KPHK yang menunjukkan nilai paling tinggi yaitu KPHK Tangkoko (BKSDA Sulawesi Utara), kemudian disusul oleh KPHK Dangku Bentayan (BKSDA Sumatera Selatan) dan KPHK Pangi Binangga (BKSDA Sulawesi Tengah).



Indahnya Pulau Peucang dari ketinggian
Kawasan TN Ujung Kulon
© Indra

MILESTONE PENCAPAIAN TARGET OPERASIONALISASI KPHK NON TN

2015

Buku Profil 9 KPHK Non TN Penetapan Tahun 2013 disusun

2016

1. 21 Unit KPHK Non TN ditetapkan pada bulan Juni
2. Petunjuk Teknis Operasional KPHK disahkan (Perdirjen Nomor P.3/2016)
3. Sosialisasi dan Bimtek Operasional KPHK (18 kali)
4. 28 Unit KPHK Non TN ditetapkan pada bulan September
5. Total 46 Unit KPHK Non TN mulai beroperasi sesuai Petunjuk Teknis

2017

1. Total 81 Unit KPHK Non TN telah beroperasi sesuai Petunjuk Teknis
2. 23 Unit KPHK Non TN ditetapkan pada bulan Agustus
3. Sosialisasi dan Bimtek Operasional KPHK (21 kali)

2018

1. 22 Unit KPHK Non TN ditetapkan pada bulan Maret
2. Sosialisasi dan Bimtek Operasional KPHK (14 kali)
3. Draft Perdoman Penilaian Operasional KPHK disusun
4. Buku Laporan Kemajuan Operasional KPHK s.d Tahun 2017 disusun
5. 35 Unit KPHK Non TN telah dinilai (uji petik)
6. Total 103 Unit KPHK Non TN telah beroperasi sesuai Petunjuk Teknis

2019

Rencana :
Penyelesaian Penilaian Kesiapan Operasional KPHK Non TN
Penyusunan Laporan Kemajuan Operasionalisasi KPHK s.d 2019



*Sari Goang merupakan gugusan pulau pulau kecil dengan batu karang yang berada di Teluk Awang yaitu sebelah timur TWA Gunung Tunak, BKSDA NTB
© Didikhm*

SUCCESS STORY KPHK TANGKOKO

KSDA Sulawesi Utara

Pantai TWA Batu Putih_KPHK Tangkoko
@Meldy Tamengge

Hasil PNPB 2018

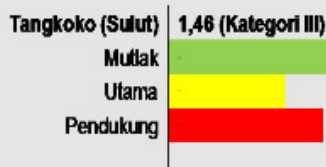


(YoY ▲ 25,7%)

Rp. 1.144.607.800

KPHK Tangkoko mendapatkan hasil penilaian paling tinggi pada tahun 2018, dan dalam forum Rapat Koordinasi Operasional KPHK Non TN (Desember 2018), KPHK Tangkoko juga diusulkan untuk menjadi unit KPHK Non TN Percontohan.

Hasil Penilaian KPHK Tangkoko



10 PKS

PKS dengan Lembaga Konservasi dan Lembaga Penelitian

Keunggulan KPHK Tangkoko

01

Memiliki 2 TWA (Batuangus dan Batuputih) yang sangat dirasa manfaatnya bagi Pemda dan masyarakat sekitar

02

Didukung oleh mitra (E-PASS) dalam pemenuhan berbagai *gap* pengelolaan

03

Memiliki hubungan baik dengan Walikota, Perangkat Daerah, Lembaga Konservasi setempat, dan masyarakat sekitar

04

Telah memulai pengelolaan berbasis *scientific* dengan menerapkan SMART Patrol dan kerjasama penelitian dengan Lembaga Peneliti maupun Perguruan Tinggi

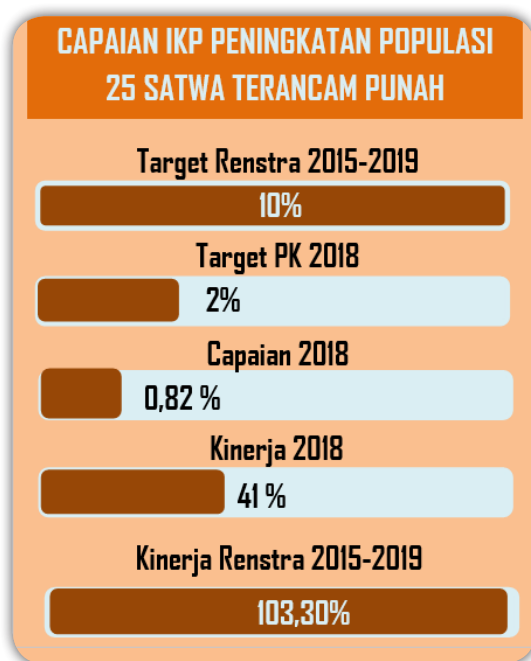
Pantai TWA Batuangus_KPHK Tangkoko
@BKSDA Sulawesi Utara



Data IKP ini diperoleh dari hasil monitoring populasi pada 272 site monitoring yang tersebar di UPT. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pada tahun 2018 rata-rata peningkatan populasi dari 25 satwa prioritas terancam punah adalah sebesar 37,10 %. Nilai ini diperoleh berdasarkan laporan yang masuk dari 231 site atau sebanyak 85% dari total 272 site monitoring yang ada. Ketidaklengkapan data ini disebabkan adanya penghematan anggaran pada sejumlah UPT sehingga kegiatan monitoring populasi tidak dapat dilakukan. Sebagian besar anggaran untuk

kegiatan monitoring ini bersumber dari dana PNBP yang umumnya dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga ketika terjadi kebijakan penghematan anggaran, kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan data tahun 2017 (sebesar 36,28 %) maka rata-rata populasi ke-25 satwa prioritas ini mengalami peningkatan sebesar 0,81%. Perbandingan rata-rata capaian peningkatan populasi 25 spesies prioritas selama tahun 2015-2018 disajikan pada tabel berikut



INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3

Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013

Tabel 3. Capaian Peningkatan Populasi 25 Satwa Prioritas Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Capaian peningkatan populasi satwa (%)	Persentase Peningkatan Populasi Dibandingkan Tahun Sebelumnya
1	2015	30,65	-
2	2016	30,84	3,95
3	2017	36,28	5,44
4	2018	37,1	0,82

Sumber: Direktorat KKH, 2018

Perkembangan populasi 25 spesies prioritas terancam punah berdasarkan *baseline* dapat dilihat dalam tabel berikut. Persentase peningkatan populasi satwa diberikan batasan

maksimal 150%, untuk menghindari adanya persentase peningkatan populasi yang terlalu tinggi.

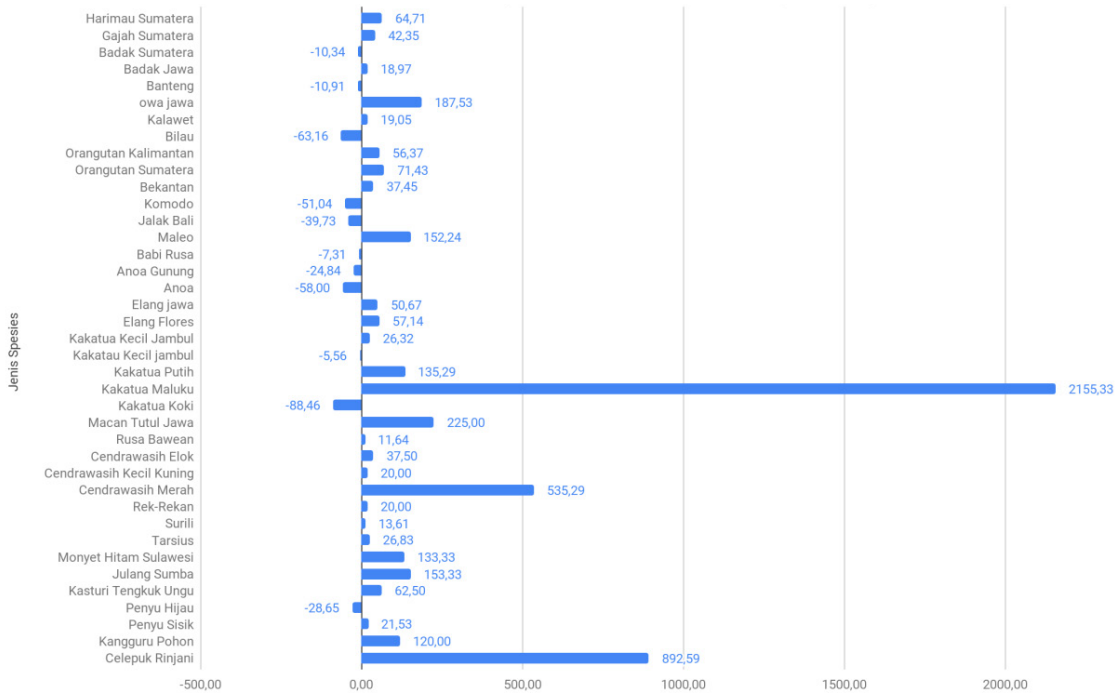
Tabel 4. Perbandingan 25 Satwa Prioritas Terancam Punah dengan Baseline

No	Satwa	<i>Baseline</i> Populasi	Populasi 2018	Penurunan/ Peningkatan	Persentase (%)
1	Harimau Sumatera	119	196	77	64,71
2	Gajah Sumatera	451	642	191	42,35
3	Badak	87	92	5	5,75
4	Banteng	394	356	-38	-9,64
5	Owa	447	1.107	660	147,65
6	Orangutan	3.146	4.933	1.787	56,8
7	Bekantan	2.475	3.402	927	37,45
8	Komodo	5.954	2.915	-3.039	-51,04
9	Jalak Bali	146	88	-58	-39,73
10	Maleo	1.204	3.037	1.833	150
11	Babi Rusa	616	571	-45	-7,31
12	Anoa	521	375	-146	-28,02
13	Elang	82	124	42	51,22
14	Kakatua	1.403	5.887	4.484	150
15	Macan Tutul Jawa	20	65	45	150
16	Rusa Bawean	275	307	32	11,64
17	Cendrawasih	48	148	100	150
18	Surili	184	218	34	18,48
19	Tarsius	82	104	22	26,83
20	Monyet Hitam Sulawesi	63	147	84	133,33
21	Julang Sumba	30	76	46	150
22	Kasturi Tengkuk Ungu	8	13	5	62,5
23	Penyu	7.163	7.334	171	2,39
24	Kanguru Pohon	10	22	12	120
25	Celepuk Rinjani	27	268	241	150

Sumber: Direktorat KKH, 2018

Sesuai dengan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 180/IV-KKH/2015, satwa prioritas terancam punah yang dimonitoring populasinya sejumlah 25 spesies. Akan tetapi pada perkembangannya sebagian dari 25 jenis satwa tersebut mempunyai lebih dari satu spesies, misalnya

jenis elang. Monitoring jenis elang dilakukan bukan hanya untuk jenis elang jawa, tetapi juga elang flores yang merupakan endemik Pulau Nusa Tenggara. Peningkatan/ penurunan populasi per-spesies disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 8. Jumlah Populasi 25 Spesies Prioritas

Sumber: Direktorat KKH, 2018

Sampai dengan tahun keempat periode Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019, capaian atas indikator peningkatan populasi 25 spesies prioritas terancam punah sudah mencapai 10,33%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 10% maka capaian kinerja untuk IKP ini sudah mencapai 103,33%. Dengan demikian target peningkatan populasi pada 25 spesies prioritas ini telah tercapai pada tahun keempat Renstra 2015-2018. Keberhasilan peningkatan populasi spesies di site monitoring yang dilihat dari penambahan individu baru, juga didukung dengan upaya konservasi yang lain sebagai intervensi pengelolaan.



Tiga ekor harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang termonitor di site monitoring TN Berbak-Sembilang

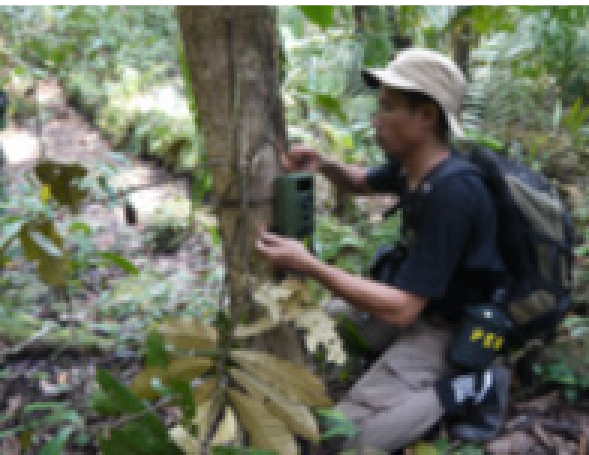
Berbagai upaya yang dilakukan untuk peningkatan populasi 25 satwa terancam



Kakatua Sumba
TN MaTaLaWa
© Dokumentasi Balai TN MaTaLaWa

punah prioritas yaitu sebagai berikut:

- 1** Inventarisasi/monitoring populasi (jumlah individu, jumlah sarang, jumlah kelahiran, jumlah kematian);
- 2** Pembinaan habitat (hektar atau unit);
- 3** Penyadartahuan (jumlah kegiatan/tahun/ UPT);
- 4** Perlindungan dan pengamanan (km.orang/ hari) dan (jumlah laporan kegiatan *illegal*);
- 5** Penanggulangan konflik (individu- persentase jumlah korban menurun);
- 6** Penyelamatan, rehabilitasi dan pelepasliaran (individu – jumlah individu yang diselamatkan atau yang dilepasliarkan).



Kegiatan inventarisasi/ monitoring dilakukan untuk memperoleh data populasi spesies, dengan teknik dan alat yang disesuaikan dengan jenis satwa, seperti contohnya penggunaan camera trap.

Kegiatan Pemasangan Camera Trap monitoring
Anoa BBKSDA Sulawesi Selatan

////////////////////



Kegiatan monitoring Komodo di Site monitoring
BTN Komodo

////////////////////

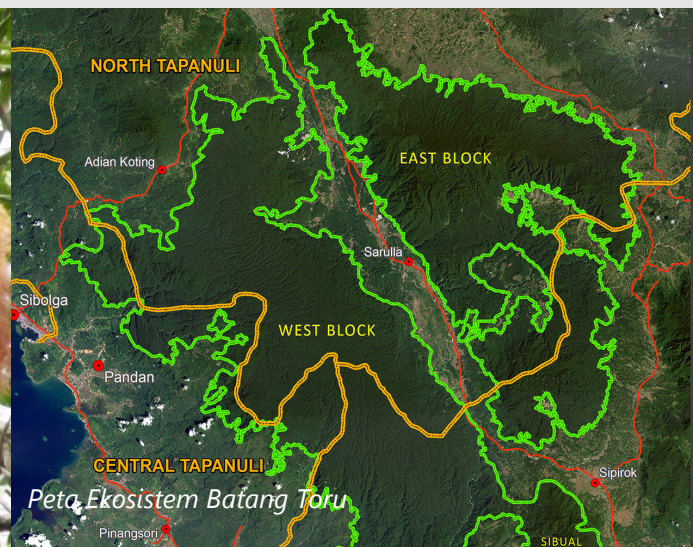
Setiap jenis satwa memiliki periode reproduksi yang bervariasi. Siklus reproduksi suatu spesies juga tergantung pada imbalan jenis kelamin (*sex ratio*) antara jantan dan betina pada suatu wilayah, struktur umur pada populasi tersebut, dan faktor eksternal lain seperti ada tidaknya gangguan luar, kerusakan habitat, ketersediaan pakan, dan lain sebagainya. Beberapa satwa prioritas tersebut bahkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk berkembangbiak, contohnya jenis badak, gajah dan orang utan. Badak betina memerlukan waktu hampir 3 tahun, sebelum bisa bereproduksi lagi termasuk waktu bunting selama 15–16 bulan, waktu bunting gajah yaitu 18–22 bulan, sementara untuk orang utan 9–11 bulan. Oleh karena itu, untuk beberapa jenis satwa, perhitungan kenaikan populasi sebaiknya dihitung pada awal tahun Renstra (sebagai *baseline*) dan akhir tahun renstra (2019) mengingat biologi reproduksi tiap satwa berbeda.

Adanya penurunan hasil estimasi populasi dari satwa prioritas yang dimonitoring, dapat terjadi selain karena kematian, juga karena tidak dijumpai satwa target secara langsung pada saat kegiatan monitoring dilaksanakan. Sebagai contoh di TN Wakatobi pada *site* monitoring penyu, petugas lapangan hanya menjumpai beberapa individu secara langsung ketika kegiatan monitoring dilakukan, padahal di lokasi tersebut dijumpai banyak tanda-tanda keberadaan penyu. Dalam monitoring satwa, metode inventarisasi satwa juga perlu diperhatikan. Menurut Santosa dkk.(2014) permasalahan penggunaan metode inventarisasi satwa diantaranya menyangkut sebaran satwa dalam habitatnya dan waktu aktif satwa, sehingga dalam inventarisasi satwa perlu diperhatikan penentuan lokasi, waktu dan lamanya pengamatan.

Orang utan Batang Toru



Orangutan Tapanuli
© Andayani_SOCP



- Orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) secara genetik berbeda dengan orangutan sumatera dan orangutan kalimantan.
- Perkiraan populasi 760 – 800 individu
- Lanskap Batangtoru memiliki luas sekitar 105.808 ha yang terdiri dari kawasan konservasi seluas 15.020 ha, hutan lindung 17.737 ha, HPT 1483 ha, HP 57.171 ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 14.397 ha. Hutan konservasi yang terdapat di kawasan Hutan Batang Toru adalah CA Dolok Sibual-buali, CA Dolok Sipirok, dan Suaka Alam (SA) Lubuk Raya (Kuswanda 2014). Lanskap Batangtoru berada di dalam 3 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga. Orangutan hanya terdapat di sebagian wilayah kawasan terutama di bagian Barat yaitu pada habitat dataran tinggi (Kuswanda 2006, Simorangkir 2009 dalam Kuswanda, 2014)

Penyelamatan Gajah di BKSDA Aceh



*Translokasi Gajah Septi
© BKSDA Aceh*

Gajah Liar diberi nama Septi berumur 20 tahun yang terisolasi di Desa Tangga Besi, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam ditranslokasi dengan menggunakan truck BKSDA Aceh.



Sebelum dilepasliarkan dilakukan pemasangan GPS Collar untuk memonitor pergerakan gajah liar Septi di alam liar



*Pemasangan GPS Collar
© BKSDA Aceh*



*Penggiringan Gajah
© BKSDA Aceh*

Septi dilepaskan di kawasan hutan lindung Bengkung dengan digiring oleh 4 ekor gajah jinak menuju kawasan hutan.



Ekosistem di luar kawasan suaka alam dan atau kawasan pelestarian alam sesungguhnya banyak yang mempunyai nilai secara ekologis, karena adanya keunikan dan kekayaan hayati didalamnya, sehingga menjadi nilai penting bagi suatu kawasan. Kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial (KEE). Karena wilayahnya diluar kawasan konservasi, pengelolaan ekosistem esensial ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja, tetapi harus melibatkan *stakeholder* terkait, antara lain pemerintah daerah, lintas Kementerian, LSM, perguruan tinggi dan sektor swasta. Pengelolaan KEE yang dilakukan secara terpadu bertujuan untuk menyamakan pandangan dan persepsi terhadap pengelolaannya, mensinkronisasikan program antar sektor, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal dan lestari dari keberadaan kawasan tersebut.

CAPAIAN IKP KEE YANG TERBENTUK DAN DIKELOLA

Target Renstra 2015-2019

48 UNIT

Target PK 2018

10 UNIT

Capaian 2018

6 UNIT

Kinerja 2018

60%

Kinerja Renstra 2015-2019

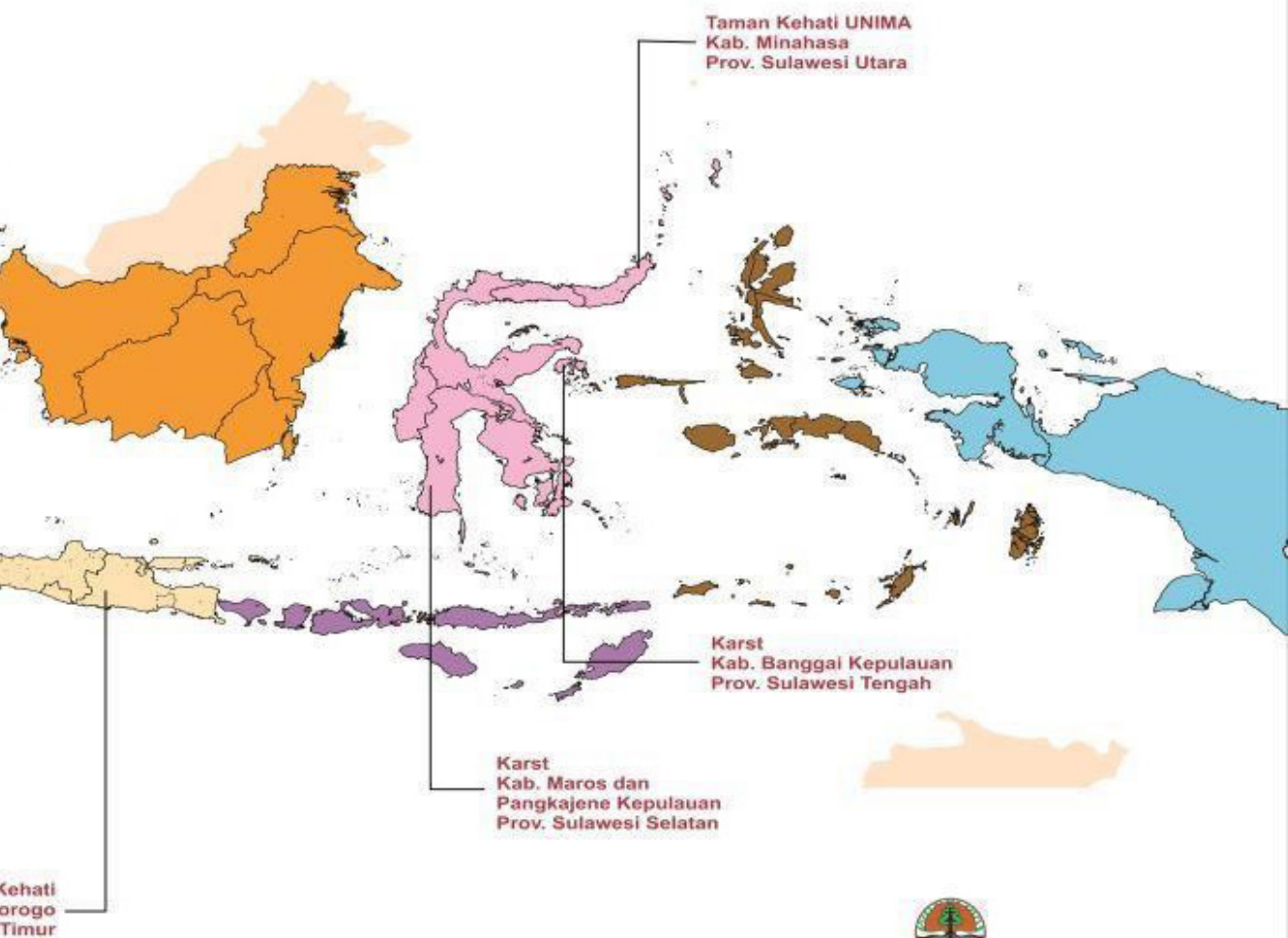
85,42%

KAWASAN EKOSISTEM



Jumlah unit kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 10 unit

OSISTEM ESENSIAL TAHUN 2018



DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Target jumlah unit KEE yang terbentuk pada tahun 2018 sebanyak 10 unit, dan sampai akhir tahun telah terealisasi 6 unit, sehingga capaian kinerjanya adalah 60%. Keenam unit KEE yang terbentuk tersebut terdiri atas 3 Taman Kehati, 1 koridor satwa, serta 2 kawasan karst. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017, capaian IKP ini mengalami penurunan kinerja sebesar 47,69%. Terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang terjadi pada tahun 2018 yang mempengaruhi capaian kinerja untuk IKP ini, yaitu:



Banyaknya pihak atau *stakeholder* yang terlibat. Proses penetapan KEE dan pembentukan kelembagaan KEE dan penyusunan rencana aksi harus melibatkan berbagai unsur/stakeholder terkait sehingga seringkali tidak bisa diselesaikan dalam 1 (satu) tahun berjalan.



Mitra kerja utama (Pemda) berada di luar Kementerian LHK yang kapasitas kelembagaan atau sumber dana, dan SDM untuk kegiatan ini masih sangat terbatas.



Dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 disebutkan bahwa UPT BKSDA melakukan koordinasi KEE bersama Pemerintah Daerah (BLH dan Dinas Kehutanan). Namun dalam pelaksanaannya kegiatan KEE belum menjadi prioritas baik di BKSDA maupun Pemerintah Daerah.

Jalak Bali
TN Bali Barat
© Wiryawan





SOLUSI TIDAK LANJUT



Kegiatan pembentukan kelembagaan KEE yang belum bisa tercapai pada tahun 2018 akan diusulkan kembali pada tahun 2019.



Melakukan peningkatan kapasitas SDM di daerah melalui pelatihan.

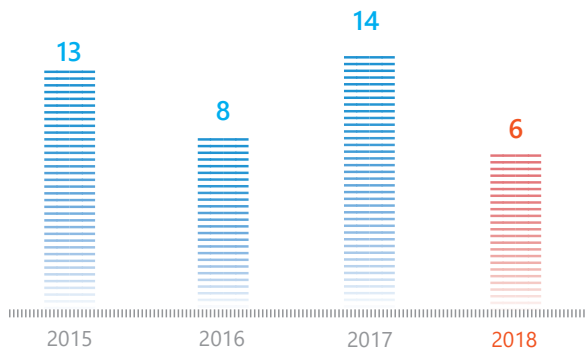


Melakukan sosialisasi tentang KEE kepada UPT, Pemda, LSM, dan stakeholder lainnya.



Mengusulkan KEE agar diintegrasikan sebagai kawasan lindung dalam tata ruang wilayah.

Di dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 jumlah unit KEE yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit. Sampai dengan tahun keempat Renstra, telah terealisasi sebanyak 41 unit atau sekitar 85,42%. Berikut adalah capaian pembentukan KEE selama empat tahun periode Renstra 2015-2019.



Gambar 9. Capaian Pembentukan KEE
Tahun 2015-2018

6 Kawasan Ekosistem Esensial yang terbentuk tahun 2018

Taman Kehati Universitas Negeri Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Pembangunan taman kehati ini merupakan kerjasama antara Universitas Manado dengan beberapa pihak terkait. Taman ini juga sebagai program CSR dari beberapa perusahaan swasta, dalam rangka pelestarian plasma nutfah ekosistem Sulawesi, serta untuk mengatasi masalah lingkungan dan sirkulasi hidrologis. Taman Kehati Universitas Manado telah memiliki pengelola berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 0884/UN41/HK/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang pembentukan tim pengelola Taman Kehati Universitas Negeri Manado.

1

Koridor harimau sumatera dan satwa liar lainnya di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan koridor harimau sumatera dan satwa lainnya di Kabupaten Solok Selatan dan Dharmasraya menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta *stakeholder* terkait dalam penyelamatan keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi, dan untuk menghindari terjadinya konflik satwa dengan manusia. Luas koridor tersebut 2.400 ha berupa areal Hak Guna Usaha Perkebunan Sawit PT. Tidar Kerinci Agung yang berbatasan langsung atau terhubung dengan Kawasan Konservasi (Taman Nasional Kerinci Seblat).

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan koridor harimau sumatera dan satwa lainnya di wilayah tersebut, telah terbentuk Forum Kolaborasi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat Nomor: 522.5/2867/DISHUT-2018 tanggal 31 Juli 2018. Ketua Forum kolaborasi adalah Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat, dengan anggota perwakilan dari: SKPD pemerintah provinsi Sumatera Barat, SKPD pemerintah kabupaten Solok Selatan, SKPD kabupaten Dharmasraya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batang Hari, KPHL Dharmasraya, Wali Nagari (masyarakat), Lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Perusahaan Sawit. Forum Kolaborasi mempunyai tugas antara lain: memfasilitasi proses penetapan koridor, menyusun kebijakan, melakukan perlindungan, pembinaan dan pengelolaan habitat harimau, monitoring populasi, memfasilitasi peningkatan kapasitas, pemahaman *stakeholder* serta membantu penyelesaian konflik/permasalahan di kawasan koridor harimau sumatera dan satwa liar lainnya.

2

Taman Kehati Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Taman Kehati Kabupaten Ponorogo telah memiliki kelembagaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Nomor 188.4/1085/405.26/2016 tanggal 22 November 2016 tentang pembentukan unit pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Ponorogo. Taman Kehati ini telah dibentuk menjadi UPT dan dikepalai oleh Kepala Seksi PPKLH dan membawahi 3 jabatan yaitu: Sarana dan Prasarana, Penanggung jawab Perawatan dan Pemeliharaan Taman, serta Penanggung jawab informasi dan edukasi.

3

4

Taman Kehati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Taman kehati seluas 10,093 Ha ini ditujukan untuk melindungi spesies tanaman lokal baik yang tumbuh secara alami maupun hasil pengkayaan jenis. Disamping itu taman kehati ini akan dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bandung. Kelembagaan Taman Kehati Kabupaten Bandung ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep.241-DLH/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang pembentukan tim koordinasi pengelolaan taman keanekaragaman hayati di Kabupaten Bandung. Forum pengelola terdiri dari berbagai unit kedinasan yang ada di Kabupaten Bandung dan diketuai langsung oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan. Dalam SK telah disebutkan susunan kepengurusan dan tugas pokok masing-masing jabatan yang diemban.

5

Karst Maros Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Kawasan karst merupakan kawasan fungsi lindung yang berada di luar kawasan suaka alam atau pelestarian alam, tetapi sangat rentan terhadap perubahan ekosistem, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi serta merupakan sumber air bawah tanah yang melimpah (Susanti, 2016). Salah satu kawasan karst yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan menjadi KEE melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 68 tahun 2016 tanggal 27 Januari 2017 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelola Kawasan ekosistem esensial pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

6

Karst Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan Kabupaten yang cukup unik karena sebagian besar wilayahnya adalah batuan gamping/karst. Berdasarkan hasil analisis penilaian fungsi karst di Kabupaten Banggai Kepulauan, didapatkan informasi bahwa 97,7% dari luas wilayah daratan merupakan ekosistem karst berfungsi lindung, yaitu sebesar 2.414,13 km². Pada tahun 2017, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial berupaya memfasilitasi Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan penataan dan pengelolaan kawasan karst. Atas dasar inilah maka Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan membentuk forum kelembagaan pengelolaan karst yang telah disahkan melalui surat keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 306 tahun 2018 tentang pembentukan tim pengelola karst Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 2 Agustus 2018.



INDIKATOR KINERJA PROGRAM 5

Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang *valid* dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)

Data dan informasi keanekaragaman hayati (kehati) perlu terus diupayakan untuk dilengkapi, baik keanekaragaman genetik, jenis, habitat, populasi, dan distribusinya untuk sebuah sistem basis data yang mampu menghimpun data dan informasi yang tersebar di berbagai kalangan. Manfaat adanya basis data kehati adalah dapat digunakan sebagai landasan dalam pengelolaan kehati yang ada di Indonesia. Kehati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya, termasuk eksistensi manusia. Peran langsung kehati diantaranya sebagai sumber pangan, kesehatan/obat-obatan,

sumber energi terbarukan, dan layanan jasa ekosistem. Pada tahun 2014 keanekaragaman jenis telah tercatat sebanyak 1.500 jenis alga, 80.000 jenis tumbuhan berspora, 595 jenis lumut kerak, 2.197 jenis paku-pakuan serta 30.000–40.000 jenis flora tumbuhan berbiji, 8.157 jenis fauna vertebrata (mamalia, burung, herpetofauna, dan ikan) dan 1.900 jenis kupu-kupu (LIPI, 2014).

Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang *valid* dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi tahun 2018 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 7 paket data, sehingga capaian kinerjanya 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan capaian sebanyak 14,29%. Pada tahun 2017 ketersediaan data dan informasi keanekaragaman spesies dan genetik hanya terealisasi 6 paket data, karena belum tersedia data untuk Ekoregion Maluku. Oleh karena itu pada tahun 2018, ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik pada tahun 2018 dilakukan melalui uji petik pada 1 (satu) wilayah biogeografi, yaitu ekoregion Maluku. Hasil kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun 2018 meliputi pengumpulan data dan informasi potensi tanaman obat serta identifikasi potensi *bioprospecting* di wilayahnya. Pemenuhan data potensi tanaman obat pada Ekoregion Maluku diwakili oleh Balai Taman Nasional Manusela. Hasilnya terdapat 19 jenis tanaman obat yang teridentifikasi di Desa Saunulu SPTN II Toheru (BTN Manusela, 2017).

Data dan informasi keanekaragaman hayati juga diperoleh dari berbagai sumber yang dikumpulkan dari berbagai daerah, baik ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun UPT Direktorat Jenderal KSDAE. Saat ini telah terkumpul beberapa buku profil keanekaragaman hayati daerah dari beberapa provinsi, dan data *bioprospeksi* (tumbuhan obat, anggrek, rotan, jenis tumbuhan dan satwa liar berprospek ekonomi tinggi) dari seluruh UPT Direktorat Jenderal KSDAE.

Tabel 5. Data Ketersediaan Data 7 Wilayah Biogeografi

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi <i>Bioprospecting</i> Lainnya
A. Ekoregion Sumatera			
1	BKSDA Jambi	-	Buku informasi satwa liar yang diperdagangkan di Jambi
2	BKSDA Sumatera Selatan	Laporan Identifikasi Potensi KSA/ KPA Bangka Belitung	Buletin Rimau Kito
3	BKSDA Aceh	Pengetahuan dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat di Sabang, Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam	Jenis tumbuhan anggrek epifit di kawasan CA Jantho, Kab. Aceh Besar
4	BBTN Gunung Leuser	Daftar jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Ketambe, kecamatan Badar - Aceh Tenggara	-
5	BBTN Bukit Barisan Selatan	Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di kawasan Hutan Krui TN BBS Lampung Barat	Seminar Nasional HUT Kebun Raya Cibodas ke 150 Buletin Siamang edisi 1
6	BTN Batang Gadis	Daftar Data Informasi Tanaman Obat sebagai Potensi Bioprospeksi di TN Batang Gadis	-
7	BTN Berbak dan Sembilang	Eksplorasi Tumbuhan Obat di TN Berbak	<i>Orchid of Jambi</i> (Anggrek Alam Jambi) Studi Keanekaragaman Jenis Kantong Semar di TN Berbak
8	BTN Bukit Tiga Puluh	Laporan Identifikasi Pemanfaatan TSL oleh Suku Talang Mamak di TN Bukit Tigapuluh (Suku Talang Mamak di desa Rantau Langsat Resort Siambul)	-
9	BTN Bukit Dua Belas	Buku Pengenalan Tumbuhan Obat TN Bukit Dua Belas Laporan Identifikasi Tumbuhan Obat di Kawasan TN Bukit Dua Belas Provinsi Jambi	-
B. Ekoregion Jawa			
10	BBKSDA Jawa Barat	Studi Potensi Tumbuhan Obat di CA dan TWA Pananjung Pangandaran Pemanfaatan Tradisional Tumbuhan Obat oleh Masyarakat Sekitar Kawasan CA Gunung Tilu, Jawa Barat Pemanfaatan Tumbuhan Berkhasiat Obat oleh Masyarakat Sekitar CA Gunung Simpang, Jawa Barat	-

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi <i>Bioprospecting</i> Lainnya
	BBKSDA Jawa Barat	Pembuatan Plot Sampel Permanen Tanaman Anggrek di CA Gunung Tilu	
11	BBKSDA Jawa Timur	Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di CA P. Sempu Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di SM Dataran Tinggi Yang Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di CA Gunung Sigogor Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Hutan Lindung Sigogor,	-
12	BKSDA Jakarta	-	Informasi Kawasan Konservasi SM Pulau Rambut Informasi Potensi Perairan SM Pulau Rambut Film Dokumenter Ramsar Site SM Pulau Rambut
13	BKSDA Jawa Tengah	-	Film Dokumenter Lembaga Desa Konservasi Pulau Untung Jawa
14	BKSDA Yogyakarta	Inventarisasi Tanaman Obat di Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul	-
15	BBTN Gunung Gede Pangrango	Tanaman Obat TN Gunung Gede Pangrango	-
16	BBTN Bromo Tengger Semeru	Penelitian Mahasiswa dengan judul "Etnobotani Masyarakat Suku Tengger : Studi Kasus di Desa Ranu Pane Wilayah <i>Enclave</i> TN Bromo Tengger Semeru, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang"	-
17	BTN Ujung Kulon	Daftar Jenis Tanaman Obat di TN Ujung Kulon	-
18	BTN Meru Betiri	Inventarisasi, Identifikasi dan Pemetaan Potensi Wanafarma Propinsi Jawa Timur : TN. Bromo Tengger Semeru, TN. Meru Betiri, TN Baluran dan TN Alas Purwo Buku Informasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna TNMB Hasil Penelitian Skripsi	Laporan Inventarisasi Anggrek TNMB

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi <i>Bioprospecting</i> Lainnya
19	BTN Gunung Ciremai	Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Taman Nasional Gunung Ciremai	Daftar Jenis Potensi Tanaman Hias di TN Gunung Ciremai Daftar Jenis Kantong Semar/ <i>Nepenthes</i> di TN Gunung Ciremai
20	BTN Alas Purwo	-	Seri buku informasi dan promosi pengelolaan bambu TN Alas Purwo Seri buku informasi dan promosi mangrove TN Alas Purwo Seri buku informasi dan promosi burung air TN Alas Purwo Panduan Lapang Mamalia TN Alas Purwo Panduan Lapang Herpetofauna (Amphibi dan Reptil) TN Alas Purwo
21	BTN Gunung Halimun Salak	Laporan Eksplorasi: Potensi Lamiaceae, Begoniaceae dan Rubiaceae sebagai bahan baku obat dan aspek konservasinya	Keragaman Bryophyta TN Gunung Halimun Salak Eksplorasi Keragaman Lumut (<i>Bryophyta</i>) di Resort Cidahu, Gunung Halimun Salak, TN Gunung Halimun Salak <i>A Photographic Guide to the Common Insects of Gunung Halimun Salak National Park</i> <i>Five Hundred Plants Species in Gunung Halimun Salak National Park, West Java</i> Jenis-jenis Anggrek TN Gunung Halimun Serangga TN Gunung Halimun Jawa Bagian Barat <i>Species dan Functional Diversity of Soil Microflora at Gunung Halimun National Park</i> <i>Mamals of Gunung Halimun national Park, West Java</i>
C. Ekoregion Sulawesi			
22	BKSDA Sulawesi Tengah		Laporan Hasil Kegiatan Identifikasi Potensi Anggrek di CA Gunung Dako Laporan Identifikasi Potensi Anggrek di CA Gunung Tinombala Kabupaten Parigi Moutong
23	BTN Lore Lindu	Statistik BTN Lore Lindu	-

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi <i>Bioprospecting</i> Lainnya
24	BBKSDA Sulawesi Selatan	Tanaman obat	Inventarisasi Anggrek di CA. Faruhumpenai
			Inventarisasi Anggrek di SM. Komara
			Inventarisasi Anggrek di TWA Malino
			Inventarisasi Rusa di SM Komara
			Monitoring Rusa di SM Komara
			Monitoring Rusa (<i>Cervus timorensis</i>) di SM Komara
			Inventarisasi Eboni di CA. Kalena
			Inventarisasi Eboni di CA. Kalena di CA Ponda-Ponda
			Inventarisasi Eboni di CA. Kalena di SM Komara
			Inventarisasi dan Identifikasi jenis satwa burung di SM Mampie
			Inventarisasi Maleo (<i>Macrocephalon maleo</i>) di Desa Kambunong, Kab. Mamuju
			Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			Inventarisasi <i>Macaca maura</i> di TWALejja
			Identifikasi jenis ikan Introduksi pada TWA Danau Matano
25	BTN Wakatobi	Identifikasi Tanaman Obat	Monitoring Burung Pantai
			Monitoring Mangrove
			Monitoring Lamun
			Monitoring <i>Cetacea</i>
			Monitoring Penyu
			Monitoring Karang
			Monitoring SPAGs
26	BTN Bogani Nani Wartabone	Identifikasi Potensi Tanaman Obat Indonesia di Bolonsio dan Toraut di Balai TN Bogani Nani Wartabone	-
27	BTN Bantimurung Bulusaraung	Laporan Identifikasi dan Sebaran Tanaman Obat di Dusun Pattiro, Desa Labuaja dan Dusun Pattunuang, Desa Samangki di TN Bantimurung Saraung	Identifikasi Anggrek Alam di TN Bantimurung Bulusaraung
		Identifikasi dan Pemetaan Tanaman Obat di Resort Pattunuang	Identifikasi Keragaman Kupu-Kupu (<i>Papilionoidea</i>) di TN Bantimurung Bulusaraung

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi <i>Bioprospecting</i> Lainnya
28	BTN Bunaken	Pemanfaatan tumbuhan obat di Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Potensi Spons <i>Petrosia sp</i> Sebagai Bahan Antikanker	-
D. Ekoregion Kalimantan			
29	BKSDA Kalimantan Tengah	Data potensi bioprospeksi Balai KSDA Kalteng, hasil inventarisasi dan identifikasi tanaman obat di TWA Bukit Tangkiling, TWA Tanjung Keluang, SM Lamandau dan CA Pararawen pada tahun 2011)	
30	BKSDA Kalimantan Selatan	-	Inventarisasi Tanaman Jenis <i>Rhododendron sp</i> di Pegunungan Meratus Inventarisasi Anggrek Alam di CA Gunung Kentawan Survey Anggrek Dilindungi di Pelaihari Tanah Laut Survei Anggrek Dilindungi di Meratus Hulu Sungai Tengah Identifikasi Anggrek di Calon Taman Nasional Meratus Hulu Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel Identifikasi Rotan Di Calon Taman Nasional Meratus Hulu Barabai
31	BKSDA Kalimantan Barat	Laporan identifikasi dan analisis tumbuhan obat dan TWA Bukit Kelam, Kabupaten Sintang	-
32	BTN Sebangau	Laporan Penelitian Flora Taman Nasional Sebangau (penelitian LIPI)	-
33	BTN Bukit Baka Bukit Raya	<i>Database</i> potensi keanekaragaman hayati tahun 2010 - 2014 TN BBR	-
34	BTN Gunung Palung	Daftar Jenis Tumbuhan Obat di Stasiun Penelitian Cabang Panti, Kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Kayong Utara, Skripsi Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Kalbar	-
E. Ekoregion Nusa Tenggara			
35	BTN Bali Barat	Buku Informasi Tumbuhan Obat di TN Bali Barat	Buku Informasi Keanekaragaman Hayati TN Bali Barat Burung-burung TN Bali Barat
36	BKSDA NTB	Tabel Data Potensi Tanaman Obat di SM dan TWA	-

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi <i>Bioprospecting</i> Lainnya
37	BTN Manupeu Tanah Daru Laiwangi Wanggameti	Kajian Etnobotani Dan Keragaman Jenis Tumbuhan Obat dalam Kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru	-
38	BTN Gunung Rinjani	Tanaman Obat Kawasan TNGR (draft)	Anggrek TN Gunung Rinjani Mushrooms Kawasan TN Gunung Rinjani
39	BTN Kelimutu	Kajian Potensi Tanaman Obat di Kawasan TN Kelimutu	Kajian Potensi Tanaman Obat di Kawasan TN Kelimutu
F. Ekoregion Papua			
40	BBKSDA Papua Barat	CA. Waigeo Timur CA. Pegunungan Arfak	CA. Teluk Bintuni CA. Peg. Kumawa
41	BTN Teluk Cendrawasih	Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman Obat Masyarakat Tradisional Isenebual Distrik Rumberopon, Kab. Teluk Wondama Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman Obat di Kampung Aisandami BPTN Wil II Wasior Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman Obat di Waprak Pulau Roswar, Distrik Roswar, Kab. Teluk Wondama	Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Anggrek di Kampung Yopanggar pada BPTN Wilayah II Wasior Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Anggrek di Kampung Waprak pada BPTN Wilayah III Ransiki Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Anggrek di Pulau Anggromeos pada BPTN Wilayah I Nabire
42	BTN Lorentz	-	Flora dan Fauna TN Lorentz Mengetahui Burung Langka <i>Macgregoria pulchra</i> Burung Migran Taman Nasional Lorentz
G. Ekoregion Maluku			
43	BTN Manusela	Survey tanaman obat di hutan mangga dua Resort Saunulu Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Tehoru BTN Manusela Tahun 2012 Survey tanaman obat di hutan mangga dua Resort Saunulu Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Tehoru BTN Manusela Tahun 2017	-

Target jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang *valid* dan *reliable* selama periode Renstra 2015-2019 sebanyak 7 paket yang terbagi atas 7 wilayah biogeografi. Sampai dengan tahun 2018, seluruh data dan informasi sebaran keanekaragaman hayati dan genetik pada 7 wilayah biogeografi tersebut

telah tersedia, sehingga capaian kinerjanya yaitu 100%. Pencapaian IKP ini dilakukan melalui serangkaian uji petik yang dilakukan di sejumlah lokasi. Beberapa lokasi yang menjadi lokasi uji petik pada masing-masing region selama tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Lokasi Uji Petik Jumlah Ketersediaan Data Tahun 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Ekoregion	Sulawesi, Kalimantan	Sumatera	Bali dan Nusa Tenggara	Maluku
Lokasi	BTN Bantimurung, BTN Bogani Nani Wartabone, SM Nantu	TN Bukit Dua Belas	TN Gunung Rinjani	TN Manusela

Dalam pencapaian setiap IKP akan selalu disertai dengan berbagai kendala. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKP ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik adalah menyangkut penyebaran data *bioprospecting* dan keanekaragaman hayati daerah pada berbagai institusi/lembaga dan belum terintegrasi dalam satu wadah. Oleh karena itu dalam rangka pengumpulan data dan informasi kehati, harus dilakukan dengan meminta data tersebut ke daerah, baik ke

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun UPT Direktorat Jenderal KSDAE. Beberapa upaya yang dilakukan untuk pencapaian IKP ini adalah Penyusunan Profil Kehati Daerah, melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya genetik dan monitoring pengelolaan SDG, dan membangun aplikasi profil kehati untuk mengetahui sebaran kehati di daerah serta sebaran *bioprospecting* sehingga bisa dipetakan dan dimanfaatkan informasi yang ada



Rusa Jantan
TN Bali Barat
© Phillipe Ganz

Wanafarma Meru Betiri

Wanafarma di kawasan TN Meru Betiri (TNMB) bukan hanya berarti pola tanaman yang memadukan tanaman hutan dengan tanaman obat, tetapi juga berarti ragam jenis tumbuhan obat di zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan TNMB serta interaksi masyarakat dalam pemanfaatan tumbuhan obat (Syarif dan Lindasari, 2018). Sebanyak 242 jenis tanaman di TNMB yang berkhasiat obat, 77 jenis diantaranya telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar TNMB (BTN Meru Betiri, 2019). Jenis-jenis tumbuhan obat yang terdapat di kawasan hutan TNMB dan merupakan bahan baku obat-obat modern di Amerika Serikat dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 7. Jenis-jenis tumbuhan obat TNMB yang merupakan bahan baku obat-obat modern di Amerika Serikat

No	Nama Tanaman	Suku	Kandungan Kimia yang dihasilkan	Pemanfaatan
1	Sambiloto (<i>Andrographis paniculata</i>)	Acanthaceae	Andrographolidae, Neoandrographloide	Bacillary dysentery
2	Pinang (<i>Areca catechu</i>)	Palmae	Arecoline	Anthelminthic
3	Umbi Uwi (<i>Dioscorea spp</i>)	Dioscoreaceae	Diosgenin	Contraceptive
4	Pule Pandak (<i>Rauwolfia serpentina</i>)	Apocynaceae	Ajmalicine, Rescinnamine, Reserpin	Circulatory disorders, tranquilizer, antiny pertensive

Sumber: Syarif dan Lindasari, 2018

Pemanfaatan tanaman obat di kawasan TNMB oleh masyarakat selain dipakai untuk kepentingan pribadi, juga terdapat usaha tumbuhan obat dalam bentuk produk jamu tradisional terutama di Desa Andongrejo.

Saat ini telah berkembang satu kelompok pengolah tumbuhan obat yaitu kelompok King Betiri. Beberapa produk jamu dihasilkan oleh kelompok King Betiri.

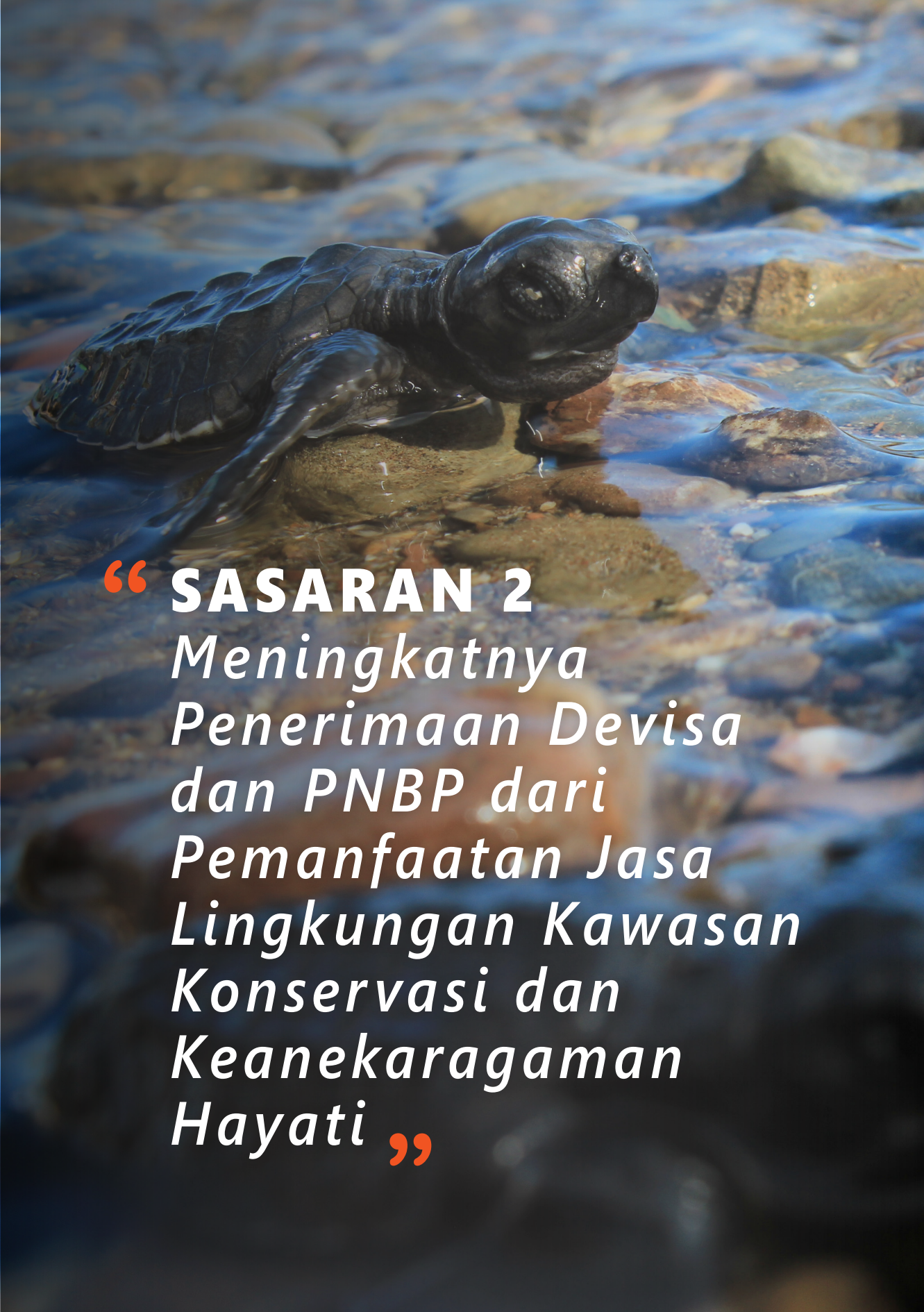
Tabel 8. Jenis-jenis jamu produk kelompok King Betiri.

No	Jenis Produk	Kandungan Bahan
1	Jamu kolesterol	Temulawak, kencur, kunir putih, sambiloto, pegagan, kumis kucing, lidah ayam, meniran, pala
2	Jamu lambung	Temulawak, kencur, kunir, daun patikan kebo, daun meniran, pegagan, daun dewa
3	Jamu asam urat	Temulawak, kencur, jahe, daun murbei, daun ungu, daun lidah ayam, daun meniran, pala
4	Sari singset	Kunir putih, bangle, kedawung, jati belanda, kemuning, lempuyang, gula
5	Sari pepet	Kunci pepet, kunir putih, delima, kayu ules, majaan, jungrahap
6	Kunci sirih	Kunci, sirih, gula
7	Pasga sari	Kapuk randu, pupus waru, patikan kebo, kapulaga, kencur
8	cabe puyang	Kunci pepet, kunir putih, kunci, delima putih, jungrahap, kayu ules
9	Madu jahe	Madu, jahe, daun pandan, gula
10	Brotowali	Brotowali, temulawak, sambiloto, temu ireng, cabe jawa, dlingu
11	Instan Jahe	Jahe, Gula putih
12	Instan Kunyit	Kunyit, Gula putih
13	Instan Temulawak	Temulawak, Gula putih
14	Instan Kencur	Kencur, kunyit, kunci, tepung beras

Sumber: Syarif dan Lindasari, 2018



Produk Jamu yang dihasilkan oleh Kelompok King Betiri
© BTN Meru Betiri



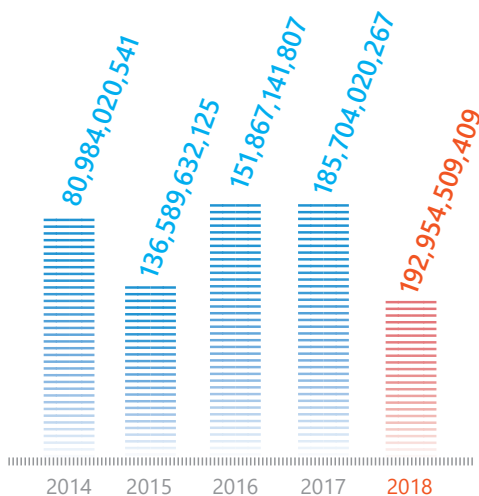
“ SASARAN 2
*Meningkatnya
Penerimaan Devisa
dan PNPB dari
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Kawasan
Konservasi dan
Keanekaragaman
Hayati ”*



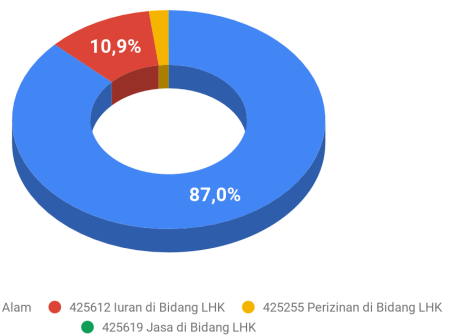
*Rilis Tukik ke laut/pantai merupakan agenda rutin BBKSDA NTT sebagai
bentuk kegiatan konservasi terhadap Penyu Sisik Semu.
Pantai Manikin Kupang, NTT
© Agung Jaya Ramli*

Pada tahun 2018, PNBP Direktorat Jenderal KSDAE yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati adalah sebesar Rp. 192.954.509.409,-. Besarnya PNBP tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,90% dari nilai PNBP tahun 2017. Angka PNBP tersebut hanya berasal empat jenis penerimaan yaitu pendapatan wisata alam sebesar Rp.167.942.351.135,- (87,04%) ,

pendapatan iuran di bidang LHK sebesar Rp. 21.094.153.074,- (10,93%), pendapatan perizinan di bidang LHK sebesar Rp. 3.873.019.000,- (2,01%), serta pendapatan jasa bidang LHK sebesar Rp. 43.000.000,- (0,02%). Peningkatan PNBP berasal dari Mata Anggaran Pendapatan (MAP) wisata alam disebabkan karena bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan konservasi.



Gambar 10. Perkembangan PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2014-2018



Gambar 11. Empat Sumber Terbesar PNBP Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2018

Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 untuk sasaran 2 sebesar 139,51%, yang terdiri atas empat IKP. Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 143,49%, maka capaian kinerja sasaran ini mengalami penurunan sebesar 3,98%. Fluktuasi capaian

kinerja disebabkan karena kenaikan maupun penurunan realisasi IKP maupun perbedaan target yang ditetapkan setiap tahunnya sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya.

CAPAIAN IKP NILAI EKSPOR PEMANFAATAN TSL DAN BIOPROSPECTING

Target Renstra 2015-2019

25 TRILIUN

Target PK 2018

5 TRILIUN

Capaian 2018

13,16 TRILIUN

Kinerja 2018

150%

Kinerja Renstra 2015-2019

133,11 %

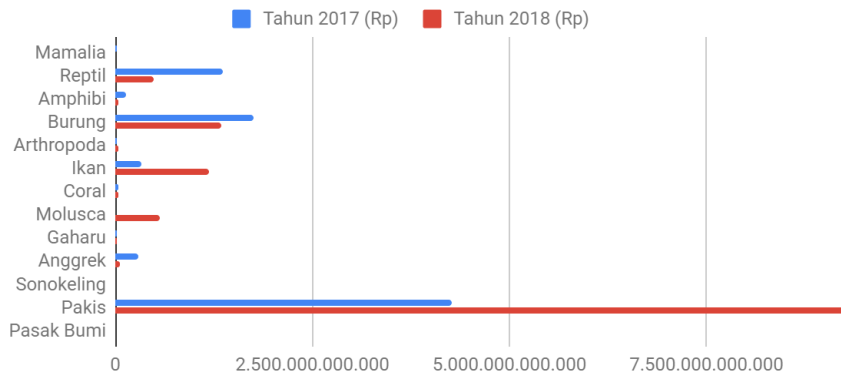
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 6

Nilai ekspor pemanfaatan satwa
liar dan tumbuhan alam serta
Bioprospecting

Kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan di wilayah kerja Direktorat Jenderal KSDAE di seluruh Indonesia baik pusat maupun BBKSDA/ BKSDA. Pada tahun 2018, nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* mencapai Rp.

13.162.172.774.826,- atau sebesar 263,24 % dari target tahunan (Rp. 5 Triliun/tahun). Dibandingkan dengan nilai ekspor TSL tahun sebelumnya, pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp 4,9 Triliun atau 59,33%. Peningkatan ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Peningkatan tertib pelaporan transaksi oleh para pemegang izin usaha pengedar TSL Luar Negeri, khususnya untuk komoditi ikan, *mollusca*, dan sonokeling, sehingga berdampak pada kenaikan pencatatan nilai devisa dari komoditi dimaksud.
- 2 Adanya beberapa penambahan jenis baru yang diekspor seperti pasak bumi, mahoni, dan ikan Clarion Angel.

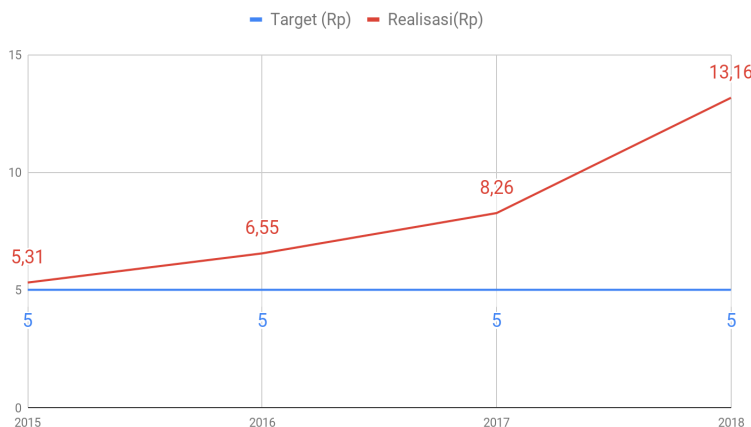


Gambar 12. Perbandingan Devisa Per-Komoditi Tahun 2017-2018

Sumber : Direktorat KKH, 2018

Selama kurun waktu 2015-2018, realisasi nilai ekspor pemanfaatan TSL dari tahun ke tahun selalu melebihi target yang telah ditetapkan

yaitu Rp 5 Triliun per tahun. Perbandingan capaian nilai ekspor TSL tersebut disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 13. Perbandingan Target dan Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL Tahun 2015-2018 (dalam Triliun Rupiah)

Sumber : Direktorat KKH, 2018

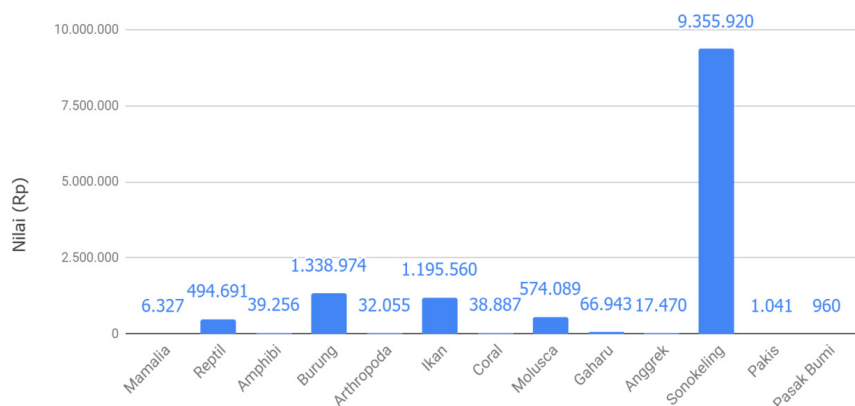
Nilai ekspor dihasilkan dari pemanfaatan 13 kelas komoditi yang terdiri atas 8 komoditi dari kelompok satwa dan 5 komoditi dari kelompok tumbuhan. Nilai ekspor terbesar berasal dari pemanfaatan kelompok tumbuhan sebesar Rp. 9,44 Triliun (71,74%), sedangkan pemanfaatan satwa sebesar Rp. 3,72 Triliun (28,26%). Sonokeling mendominasi perolehan nilai ekspor pemanfaatan TSL yaitu mencapai

sebesar 71,74% dari total nilai ekspor tahun 2018, dengan nilai Rp. 9,355 Triliun. Kelompok reptil menempati volume ekspor paling banyak, dengan jenis dominan yang diekspor sebanyak 5 jenis yaitu *Ptyas mucosus*, *Morelia viridis*, *Cuora amboinensis*, *Varanus salvator*, *Varanus timorensis*. Negara tujuan ekspor jenis reptil yaitu China, USA, Republik Ceko, Jepang, Taiwan.

Tabel 9. Data Ekspor Pemanfaatan TSL Tahun 2018

Sumber : Direktorat KKH, 2018

No	Komoditi	Nilai Devisa (Rp)	Volume (pcs)	Jumlah Pengedar	Negara Tujuan
1	Mamalia	6.326.600.000,000	60.808	25	Thailand, USA, Jerman
2	Reptil	494.691.392.477,000	2.031.576	100	Hongkong, Jepang, Singapura, Thailand
3	Amphibi	39.256.050.000,000	677.542	12	Perancis, Jepang
4	Burung	1.338.973.506.120,000	100.268	32	Bangladesh, Oman, Pakistan, Taiwan
5	Arthropoda	32.055.427.026,000	1.655.258	11	USA, Jerman, Singapura, Korea Selatan
6	Ikan	1.195.559.837.500,000	247.339	42	China, Taiwan, Jepang, Singapura
7	Coral	38.887.250.362,000	666.626	65	USA, Inggris, Jerman, Perancis
8	Molusca	574.089.000.000,000	7.050	5	USA, Belanda, Perancis, Kanada, Jerman, Belgia, Polandia, Inggris
9	Gaharu	66.942.700.500,000	904.078	43	Saudi Arabia, Singapura, Taiwan, Uni Emirat Arab
10	Anggrek	17.469.808.998,000	187.572	6	Jepang, Singapura, Korea Selatan
11	Sonokeling	9.355.920.201.843,000	84.230	89	China, Australia, Inggris, Jerman, Jepang, USA
12	Pakis	1.041.000.000,000	45.800	4	Taiwan, Jepang
13	Pasak Bumi	960.000.000,000	-	-	-



Gambar 14. Devisa pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam tahun 2018

Sumber : Direktorat KKH, 2018

CAPAIAN IKP KUNJUNGAN WISMAN KE KAWASAN KONSERVASI

Target Renstra 2015-2019

1.500.0000 ORANG

Target PK 2018

450.000 ORANG

Capaian 2018

486.240 ORANG

Kinerja 2018

108,05%

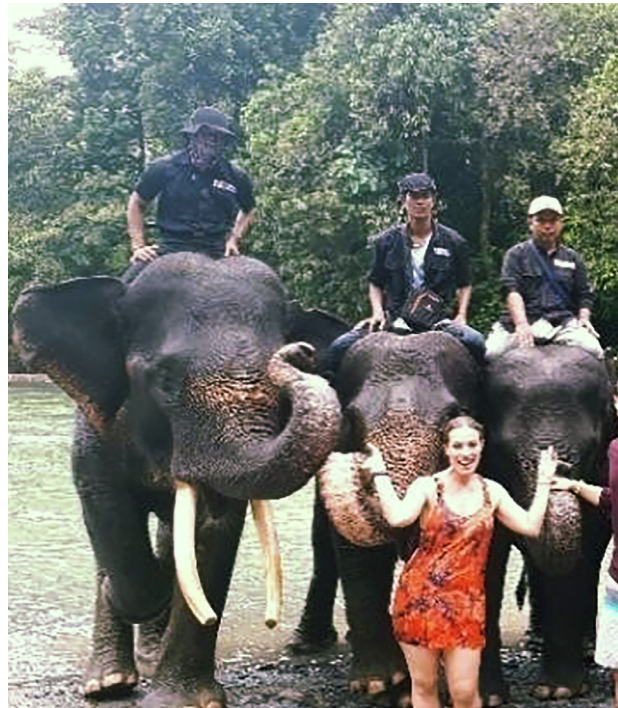
Kinerja Renstra 2015-2019

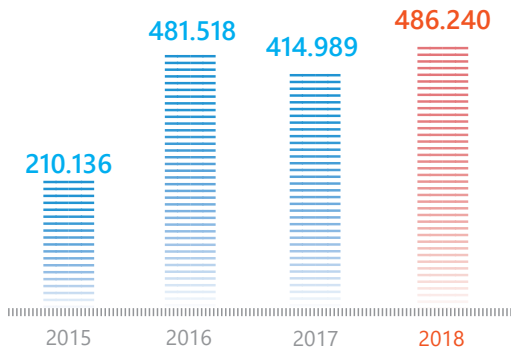
106,19%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 7

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun

Kawasan konservasi bukan hanya sebagai tempat perlindungan dan pengawetan kehati saja akan tetapi dapat dimanfaatkan keindahan alamnya maupun jasa lingkungan yang ada di dalamnya. Banyaknya objek dan daya tarik wisata alam di kawasan konservasi merupakan potensi yang besar untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Kunjungan wisatawan ini secara langsung berpengaruh terhadap besarnya pendapatan negara khususnya PNBPN. Pada tahun 2018, jumlah PNBPN yang berasal dari pendapatan wisata alam mencapai Rp. 167.942.351.135,-. Selain PNBPN, kegiatan wisata alam ini juga memberikan pemasukan bagi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tumbuhnya berbagai sektor ekonomi yang mendukung kegiatan wisata, serta penyerapan tenaga kerja karena meningkatnya kesempatan usaha di bidang jasa wisata alam, seperti jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, jasa cinderamata/souvenir, dan lain-lain sebagainya.





Gambar 15. Jumlah Wisman Tahun 2015-2018

Sumber : Direktorat PJLHK, 2018

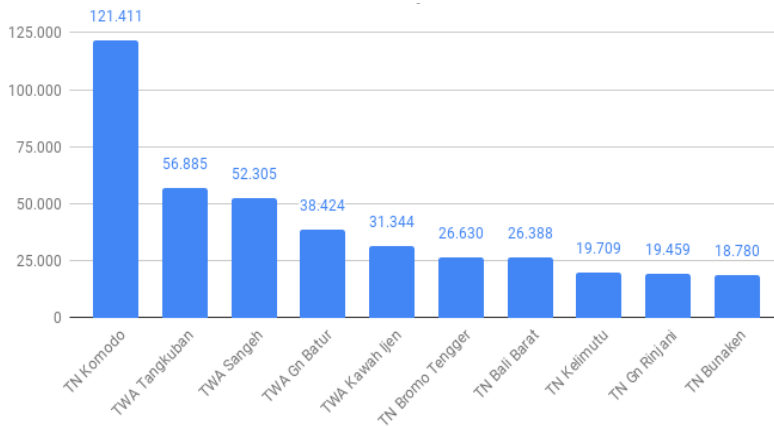
Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, tren jumlah pengunjung wisatawan mancanegara mengalami peningkatan, dengan rata-rata kunjungan mencapai 398.221 orang. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2018 sebanyak 486.240 orang, atau meningkat 17,17% dibandingkan tahun 2017, atau mengalami peningkatan 131,39% dibandingkan tahun 2015. Kunjungan wisman ke kawasan konservasi tahun 2018 merupakan tertinggi selama 3 tahun terakhir. Jika pada tahun 2018 target kunjungan wisman sebanyak 450.000 orang, maka capaian kinerja tahun ini adalah sebesar 108,05%. Secara total sampai dengan tahun keempat periode Renstra 2015-2019, jumlah kunjungan wisman mencapai 1.592.883 orang, yang berarti telah melebihi target selama lima tahun yaitu sebesar 1.500.000 orang, dengan capaian kinerja 106,19%. Keberhasilan pencapaian target ini didukung beberapa faktor penunjang, yaitu: 1). Meningkatnya *trend* masyarakat untuk wisata alam (*back to nature*); 2). Kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media sosial, elektronik, maupun cetak; 3). Gencarnya upaya promosi melalui media seperti media cetak maupun elektronik; 4). Adanya kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016.



*Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Tangkahan,
TN Gunung Leuser, Provinsi Sumatera Utara*

Dari sekian banyak lokasi obyek wisata alam yang masuk dalam wilayah kerja Direktorat Jenderal KSDAE, terdapat 10 kawasan

konservasi yang terbanyak dikunjungi oleh wisman, yaitu:



Gambar 16. Sepuluh Kawasan Konservasi dengan Jumlah Wisatawan Mancanegara Terbanyak Tahun 2018

Sumber : Direktorat PJLHK, 2018

Kunjungan wisatawan mancanegara di TN Komodo

TN Komodo menempati urutan pertama kawasan konservasi dengan jumlah wisman terbanyak. Apabila dibandingkan dengan kawasan wisata lainnya, terdapat perbedaan yang cukup besar jumlah kunjungan wisman ke TN Komodo. Selain menyaksikan perilaku satwa liar komodo yang merupakan kadal purba satu-satunya di dunia, TN Komodo juga menawarkan pesona keindahan alam lainnya, mulai keelokan alam bawah laut sampai dengan puncak bukit. Hal lain yang mendorong peningkatan jumlah wisman di kawasan ini adalah kunjungan kapal pesiar dari luar negeri yang mencapai 30 kali/tahun. Bahkan di tahun 2018 kawasan TN Komodo mendapat kunjungan dari delegasi *annual meeting International Monetary Fund (IMF)*, dengan rata-rata jumlah wisman sebanyak 500 - 600 orang per hari. Peningkatan kunjungan wisatawan baik wisman maupun wisnus tentu berpengaruh terhadap peningkatan perolehan PNBPN wisata alam TN Komodo tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 33.046.410.025,-



Kunjungan wisman di TN Komodo

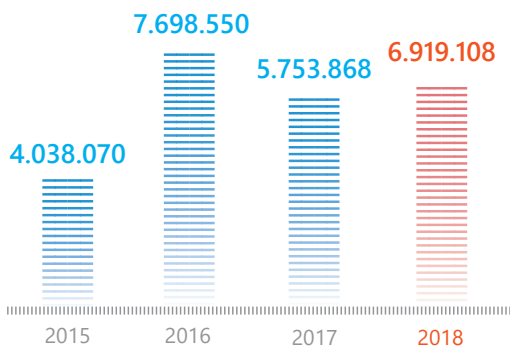
© Yusuf Jenata Hamzah





INDIKATOR KINERJA PROGRAM 8

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun

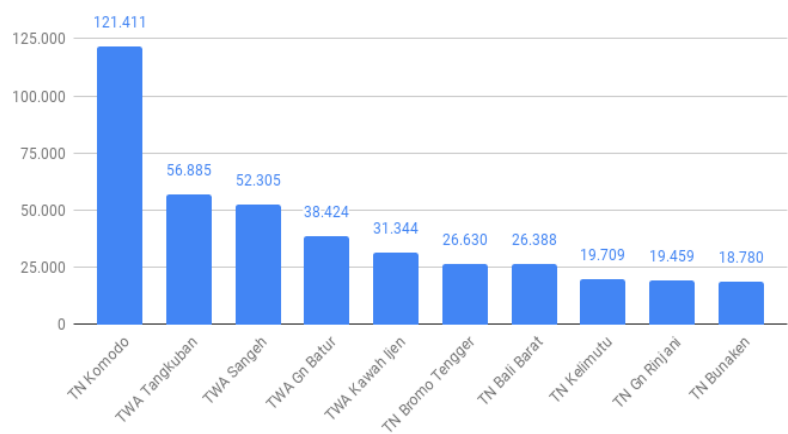


Gambar 17. Jumlah Wisman Tahun 2015-2018

Sumber : Direktorat PJLHK, 2018

Selain wisman, kehadiran wisnus juga memberikan andil yang cukup besar bagi pengembangan wisata alam di Indonesia. Jumlah pengunjung wisnus ke kawasan konservasi pada tahun 2018 mencapai 6.919.108 orang. Jumlah ini meningkat 20,25% dibandingkan jumlah pengunjung wisnus tahun 2017. Jika pada tahun 2018, jumlah wisnus ke kawasan konservasi hanya ditargetkan sebanyak 4.000.000 orang, maka artinya jumlah tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan, bahkan terealisasi sebesar 172,98%. Jika dibandingkan target kunjungan wisnus selama satu periode Renstra 2015-2019, yaitu sebanyak 20 juta orang, maka sampai dengan tahun keempat kunjungan wisnus juga telah melampaui target tersebut karena jumlahnya telah mencapai 24.409.596 orang (capaian kinerja 122,05%) dengan rata-rata kunjungan per tahun 6.102.399 orang. Gambaran perkembangan jumlah kunjungan wisnus dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan adanya fluktuasi, dengan jumlah kunjungan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan kunjungan terendah terjadi tahun 2015.

Sepuluh kawasan konservasi terbanyak yang dikunjungi oleh wisnus adalah sebagai berikut.



Gambar 18. Sepuluh Kawasan Konservasi dengan Jumlah Wisatawan Nusantara Terbanyak Tahun 2018
Sumber : Direktorat PJLHK, 2018

Dari kesepuluh kawasan konservasi dengan jumlah kunjungan wisnus terbanyak, Taman Wisata Alam (TWA) Tangkuban Perahu di Jawa Barat menjadi lokasi destinasi yang mampu menarik minat banyak wisnus terbanyak,selanjutnya kawasan TN Bromo

Tengger Semeru, dan dilanjutkan dengan Telaga Warna, Gunung Ciremai, Grojogan Sewu, Gunung Merbabu, Bantimurung Bulusaraung, Gunung Gede Pangrango, Angke Kapuk, dan Gunung Halimun Salak.

Tangkuban Perahu, Kawah Gunung nan Ramai Pengunjung

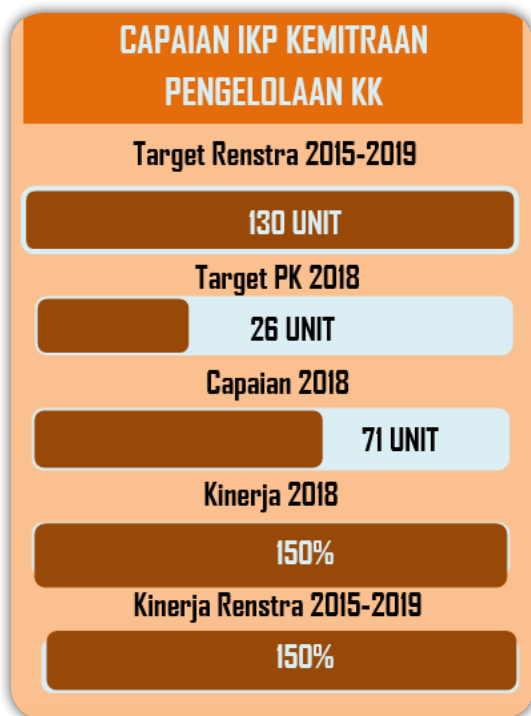
Kaldera Gunung Tangkuban Perahu menjadi daya tarik utama pada TWA Tangkuban Perahu, selain panorama pegunungan, hutan dan perkebunan yang dapat dinikmati apabila berada di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Legenda Sangkuriang dan puncak gunung yang datar dan memanjang menyerupai perahu terbalik menjadi ciri khas gunung ini. Udara dingin pada gunung dengan ketinggian 1.150-2.684 mdpl tidak menyebabkan berkurangnya minat pengunjung untuk datang dan menikmati keindahan TWA Tangkuban Perahu. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan ke Tangkuban Perahu mencapai 1.346.100 orang, yang terdiri atas 1.289.215 orang wisatawan nusantara dan 56.885 orang wisatawan mancanegara. Banyaknya wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menyebabkan TWA ini menjadi salah satu kawasan konservasi dengan kunjungan tertinggi di tahun 2018.



Kawah Gunung Tangkuban Perahu
© BBKSDA Jawa Barat



Aktivitas pengunjung di Tangkuban Perahu
© BBKSDA Jawa Barat

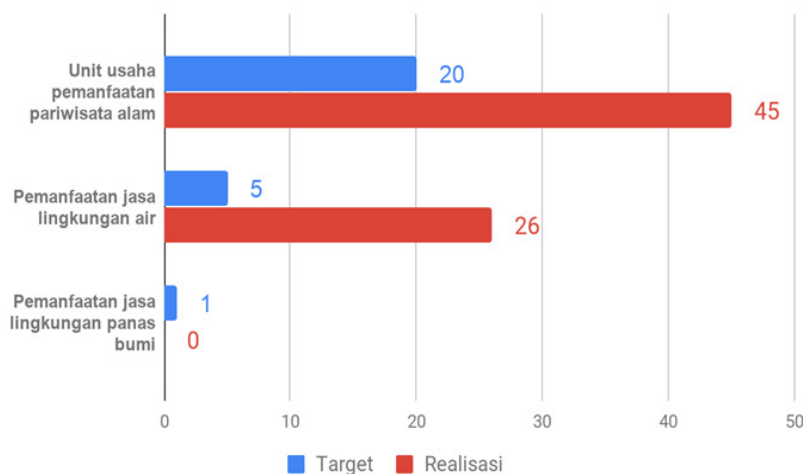


INDIKATOR KINERJA PROGRAM 9

Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 unit, pemanfaatan jasa lingkungan sebanyak 25 unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 unit)

Indikator kinerja program jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi, meliputi 3 IKK, dan pada tahun 2018 terdapat 2 IKK yang tercapai melebihi target yaitu IKK unit usaha pariwisata alam dan IKK pemanfaatan jasa

lingkungan air, sedangkan 1 IKK pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tidak dapat tercapai sesuai target.



Gambar 19. Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi tahun 2018

Sumber : Direktorat PJLHK, 2018

Selama tahun 2018, Direktorat Jenderal KSDAE telah menerbitkan 45 unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi, terdiri

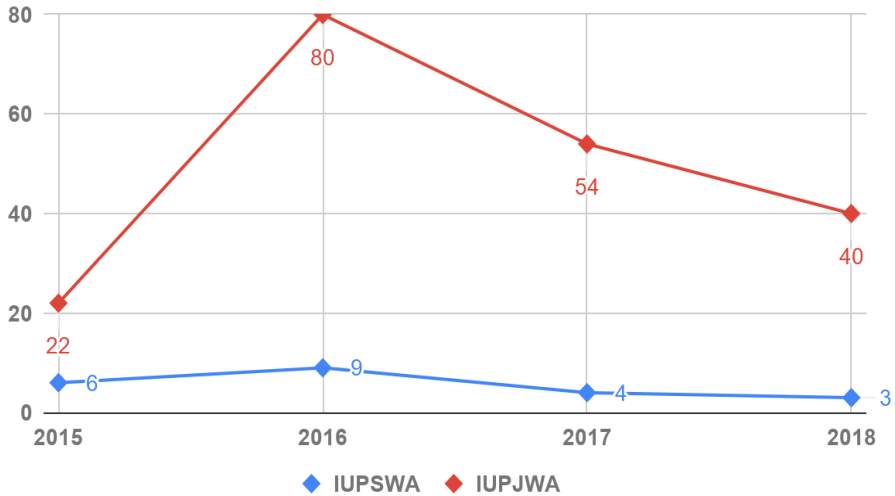
dari 3 unit Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan 42 unit Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA).

3 unit Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) yaitu sebagai berikut:

- 1** PT. Plengkung Indo di TN Alas Purwo
- 2** PT. Pusaka Suaka Kulon di TN Ujung Kulon
- 3** PT. Sura Parama Setia di TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup

42 unit Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yaitu sebagai berikut:

- 1** Perseorangan
 - 11** Unit IUPJWA di TN Gunung Rinjani
 - 2** Unit IUPJWA di TWA Gunung Tunak
 - 11** Unit IUPJWA di TN Bukit Barisan Selatan
 - 4** Unit IUPJWA di TN Kepulauan Seribu
 - 1** Unit IUPJWA di TN Wakatobi
- 2** Badan Usaha Milik Swasta
 - 6** Unit IUPJWA di TN Gunung Rinjani (CV. Nusantara Jaya, CV. Climb Mountain Rinjani, CV. Rudy Trekker, PT. BPW Lombok Network Holidays, CV. Green Rinjani, dan CV. Rinjani Fun Trekking).
 - 3** Unit IUPJWA di TWA Gunung Batur Bukit Payang (PT. Inter Global Geopark) untuk jenis kegiatan IUPJWA penyedia jasa transportasi, penyedia makanan dan minuman, serta pramuwisata.
 - 3** Unit IUPJWA di TWA Panelokan (PT. Inter Global Geopark) untuk jenis kegiatan IUPJWA penyedia jasa transportasi, penyedia makanan dan minuman, serta pramuwisata.
- 3** Koperasi
 - 1** Unit IUPJWA (Koperasi Serba Usaha Indonesia Kreatif Berkarya/ Kinarya) di TN Kepulauan Seribu.



Gambar 20. Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA Tahun 2015-2018

Sumber : Direktorat PJLHK, 2018

Selama tahun 2015-2018 jumlah izin unit usaha pemanfaatan pariwisata alam yang telah terbitkan sebanyak 220 izin, terdiri dari 198 IUPJWA dan 22 IUPSWA. Target selama lima tahun yang harus dipenuhi sebanyak 100 unit, dengan demikian sampai tahun keempat

periode Renstra indikator kinerja ini telah tercapai sebesar 220%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 13 unit atau sekitar 22,42%.

Ombak Moneytrees merupakan salah satu ombak favorit para peselancar di pantai Plengkung. Satu ombak hanya bisa dimanfaatkan satu peselancar. Terlihat para peselancar mengantri untuk mendapatkan ombak yang bagus.

Plengkung - Resort Pancur

© Dave



IUPJWA di Balai TN Gunung Rinjani

Balai TN Gunung Rinjani paling banyak terdapat IUPJWA yang terbit tahun 2018 yaitu sejumlah 16 IUPJWA. Meningkatnya IUPJWA di BTN Gunung Rinjani karena terdapat banyak *Trekking Organizer* (TO) dan pelaku wisata lainnya. BTN Gunung Rinjani juga telah meluncurkan aplikasi *booking online eRinjani* untuk pendakian Gunung Rinjani. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk membeli tiket masuk dengan melakukan pembayaran secara online, sehingga pengunjung bisa merencanakan pendakiannya dengan lebih baik. Selain itu aplikasi eRinjani juga terdapat fitur *Payment Point Online Bank* (PPOB) yang bisa digunakan untuk membayar tagihan listrik, membeli pulsa dan sebagainya.

Pasca gempa 29 Juli 2018 jalur pendakian Aik Berik di TN Rinjani kembali dibuka pada 19 November 2018, setelah sebelumnya ditutup. Hal ini semakin membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan, khususnya pelaku wisata dan para pendaki gunung. Jalur pendakian Aik Berik merupakan satu-satunya jalur pendakian yang dapat dibuka kembali di tahun 2018 ini, dengan pertimbangan kondisi jalur pendakian sudah relatif aman, potensi flora dan fauna serta bentang alam, sarana prasarana sepanjang jalur pendakian sudah ada dan dalam kondisi baik, termasuk ketersediaan air bersih. Sementara untuk jalur pendakian lainnya masih perlu dilakukan kajian ulang, karena perubahan kondisi jalur akibat gempa bumi yang terjadi, misalnya pada jalur Sembalun, Senaru, dan Timbanuh. Kegiatan pendakian Gunung Rinjani selama ini telah memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat baik sebagai pelaku wisata maupun aktivitas pendukung lainnya. Tercatat lebih 1.755 pemandu gunung (*guide* 499 orang dan *porter* 1.256 org) yang terdata dan telah diterbitkan KTA. Khusus untuk jalur Aik Berik saat ini terdata sejumlah 79 orang porter dan 50 orang guide. Pengunjung asing hanya bisa melakukan pendakian melalui *Trekking Organizer*.

4 SIMPLE STEPS FOR

eRinjani

download di playstore eRinjani atau anda akses di web erinjani.id



1 SIGNUP

Untuk pertamakali anda harus SignUp dengan memasukkan identitas diri seperti No.KTP/Password, Nomor HP dan Email



2 BOOKING

Pilih tanggal/hari kapan anda berencana untuk melakukan pendakian



3 PAYMENT

Pembayaran dilakukan melalui transfer pada menu pembayaran di aplikasi eRinjani.

4 NOTIFIKASI

Bukti pembayaran akan dikirim ke email anda, petugas TNGR akan mengecek bukti pembayaran tersebut di pintu jalur pendakian



ANDA SIAP UNTUK MENDAKI

Stay safe

website: tngr.menlhk.go.id booking online: erinjani.id

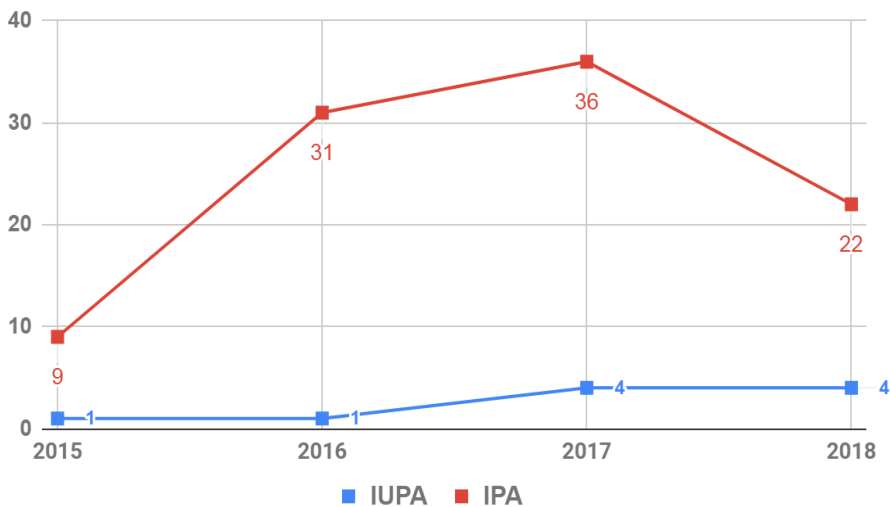
Aplikasi E-Rinjani
© BTN Gunung Rinjani

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Izin pemanfaatan jasa lingkungan air yang diterbitkan pada tahun 2018 sebanyak 26 unit dari target awal sebanyak 5 unit, sehingga capaian kinerjanya sebesar 520% (pembatasan nilai maksimal 150 %). Izin pemanfaatan jasa lingkungan air tersebut meliputi 4 Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan 22 Izin Pemanfaatan Air (IPA). Keempat IUPA tersebut diberikan kepada di CV. Sun Palung Borneo (TN Gunung Palung), CV. Tirta Mekar (TN Gunung Ciremai), PDAM Bone Bolango SPAM Tulabolo dan PDAM Bone Bolango SPAM Lombongo (TN Bogani Nani Wartabone). Sedangkan IPA yang diterbitkan sebanyak 22 unit yaitu di TN Kelimutu (3 unit), TN

Bantimurung Bulusaraung (1 unit), TN Bogani Nani Wartabone (2 unit), TN Bukit Barisan Selatan (14 Unit), TN Rawa Aopa Watumohai (1 unit), dan TN Meru Betiri (1 unit).

Jika dibandingkan tahun 2017, jumlah ijin pemanfaatan jasa lingkungan air yang dikeluarkan lebih sedikit, karena pada tahun 2017 mencapai 40 izin. Walaupun demikian secara umum, selama 4 tahun periode Renstra, capaian atas indikator ini setiap tahun telah melebihi target yang ditentukan.



Gambar 21. Perkembangan IUPA dan IPA Tahun 2015-2019

Sumber : Direktorat PJLHK, 2018





*Landscape di Resort Pemerihan
© Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan*

Pemanfaatan Jasling Air di TN Bukit Barisan Selatan

Sejak tahun 2015 masyarakat pemanfaat air di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang telah memiliki IPA sebanyak 35 kelompok, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.169 KK. Khusus tahun 2018 jumlah IPA yang diterbitkan di wilayah ini sebanyak 14 unit, dengan pemanfaat sebanyak 520 KK. Tingginya minat masyarakat untuk mengajukan IPA dikarenakan lokasi sumber air dan besaran potensi air yang teridentifikasi, serta adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan izin tersebut. Dengan demikian dengan pemberian izin ini, berarti TNBBS juga memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat sekitar, dari penyediaan air bersih bagi masyarakat. Apabila diasumsikan 1 KK harus mengeluarkan biaya penggunaan air sebesar Rp.30.000/bulan untuk kebutuhan sehari-hari, maka dengan adanya pemanfaatan air dari TNBBS ini, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tersebut, sehingga 1 KK dapat menghemat uang sebesar Rp360.000 setiap tahunnya. Jika pemanfaat air di sekitar TNBBS yang memiliki IPA sebanyak 1.169 KK maka setiap bulan kontribusi air bersih yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 35.070.000,- atau Rp. 420.840.000,- setiap tahunnya.



*Pemanfaatan Air di TN BBS
© BBTN Bukit Barisan Selatan*



Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Beberapa lokasi kawasan konservasi teridentifikasi memiliki potensi panas bumi yang cukup besar dan potensial dikembangkan. Lokasi target pemanfaatan

jasa lingkungan panas bumi tahun 2018 untuk pencapaian IKK ini adalah TWA Kawah Kamojang dan TWA Gunung Papandayan.

Tabel 10. Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi
2015	0
2016	1
2017	1
2018	0

Sumber: Direktorat PJLHK, 2018

Pada tahun 2018 terdapat 2 pengembang panas bumi yang telah beroperasi (eksisting) di kawasan konservasi yang mengajukan permohonan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan, yaitu: PT. Pertamina Geothermal Energy di TWA Kamojang dengan kapasitas terpasang 235 MW, dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. (sekarang bernama Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd.) di TWA Papandayan dengan kapasitas terpasang 270 MW. Namun, penerbitan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) terhadap 2 pemohon tersebut masih dalam proses penyelesaian karena menunggu diterbitkannya revisi Peraturan Menteri LHK Nomor: P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 sebagai konsekuensi diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada TWA Gunung Papandayan, tahapan penilaian sudah dilaksanakan, dan saat ini masih menunggu

keluarnya izin pemanfaatan tersebut, sedangkan untuk TWA Kawah Kamojang masih dalam proses peninjauan. Oleh karena itu sampai dengan akhir tahun 2018 indikator kinerja pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi belum tercapai.

Selain itu kedua kawasan tersebut, di kawasan TWA Gunung Ambang yang masuk Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Kotamobagu terdapat potensi Panas Bumi sekitar 225 MW. Pemegang izin kuasa WKP Kotamobagu yaitu PT. Pertamina Geothermal Energy tertarik untuk berinvestasi di lokasi tersebut. Untuk itu BKSDA Sulawesi Utara diharapkan segera mempersiapkan pra kondisi kawasan (menyusun Bloking dan Rencana Pengelolaan). Namun proses IPJLPB di lokasi ini disarankan menunggu selesainya Revisi UU Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



Penyu hijau salah satu dari 4 jenis penyu yang hampir setiap malam mendarat di pantai Sukamade. Telur penyu akan ditetaskan di tempat yang aman sampai menetas untuk dikembalikan ke laut. Penyu tidak akan pernah lupa dimana dia dilahirkan, jadi pasti akan kembali ke Sukamade untuk bertelur demi mempertahankan spesiesnya.

TN Meru Betiri

© Nugroho Dri Atmojo

////////////////////

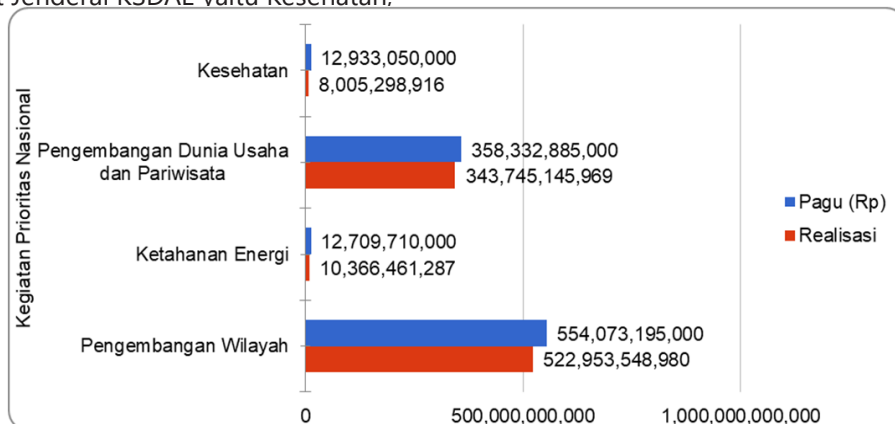
Capaian Kegiatan Prioritas Nasional dan Proyek SBSN

////////////////////////////////////

***Pagu dan Realisasi
Anggaran Kegiatan
Prioritas Nasional***

Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2018 mengalokasikan anggaran belanja non operasional untuk mendukung kegiatan prioritas nasional sebesar Rp. 938.048.840.000,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan untuk 4 prioritas nasional yang dimandatkan kepada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu Kesehatan,

pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Ketahanan Energi, serta Pengembangan Wilayah. Dari alokasi anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2018 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 885.070.455.152 (94,35%). Rincian pagu dan realisasi prioritas nasional disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 22. Pagu dan Realisasi Kegiatan Prioritas Nasional

Sumber : Aplikasi moneyv SMART-DJA, 2018

Alokasi anggaran terbesar ada pada Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah yaitu sebesar 59,07% dari total anggaran, dengan nilai Rp. 554.073.195.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai dua kegiatan prioritas yaitu pencegahan dan penanggulangan bencana, serta pembangunan pedesaan. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan pada seluruh kawasan konservasi, dan sampai dengan akhir tahun 2018 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 522.953.548.980,- (94,38%).

Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata merupakan prioritas nasional dengan alokasi anggaran terbesar kedua, yaitu sebesar Rp.358.332.885.000,- atau sekitar 38,20% dari total anggaran untuk kegiatan prioritas nasional. Kegiatan yang dilakukan pada prioritas nasional ini yaitu pengembangan Danau Toba, pengembangan Borobudur dan sekitarnya, pengembangan Mandalika, dan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan konservasi. Dari keempat prioritas nasional yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KSDAE, prioritas nasional ini merupakan yang paling besar realisasi anggarannya yaitu sebesar 95,93% atau Rp. 343.745.145.969,-. Hal ini disebabkan

karena untuk prioritas nasional ini dialokasikan khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata baik pada ketiga destinasi wisata prioritas (Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika) maupun pada kawasan konservasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kedua prioritas nasional lainnya yaitu kesehatan dan ketahanan energi, mempunyai alokasi anggaran yang hampir sama besarnya yaitu Rp. 12.933.050.000, atau sekitar 1,38% untuk kesehatan dan Rp. 12.709.710.000,- atau sekitar 1,35% untuk ketahanan energi. Prioritas kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan pengendalian penyakit tropis terabaikan/ *neglected tropical diseases* salah satunya *Schistosomiasis* yang ada di sekitar TN Lore Lindu. Realisasi anggaran untuk prioritas nasional kesehatan adalah yang paling kecil dibandingkan dengan realisasi ketiga prioritas nasional lainnya, yaitu hanya sebesar 61,90% atau Rp. 8.005.298.916,-. Hal tersebut terjadi karena adanya kejadian bencana alam (*force majeure*) sehingga beberapa kegiatan sebagai pelaksanaan kegiatan prioritas nasional Kesehatan di BBTN Lore Lindu, tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan tersebut antara lain pembuatan rancangan teknis penanaman, pengkayaan tanaman seluas 300

ha, pemeliharaan tanaman tahun berjalan, penyusunan RPE, dan penanaman. Sedangkan untuk kegiatan pengamanan kawasan telah dapat dilaksanakan di SPTNW I Mataeu dan SPTNW III Tongoa. Untuk prioritas nasional ketahanan energi digunakan untuk kegiatan proyek penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro) di kawasan konservasi sebesar 1.500 Kw, dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 10.366.461.287,- (81,56%). Sedikitnya anggaran yang digunakan untuk membiayai prioritas nasional ketahanan energi karena tidak semua kawasan konservasi memiliki potensi bagi pengembangan mini/mikro hidro, sehingga anggaran hanya dialokasikan pada UPT yang mempunyai potensi tersebut di kawasannya.



Penyus Sisik merupakan jenis penyu yang terancam punah. Spesies ini memiliki persebaran di seluruh dunia, salah satunya terdapat pada TN Teluk Cenderawasih
© Alain Compost



Capaian Prioritas Nasional

PN Kesehatan

KSDAE berkontribusi dalam pengendalian keong pembawa penyakit schistosomiasis yang ada pada daerah Lindu dan Poso, Sulteng

Capaian :



Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu = 0 Ha

Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu = 5 Ha



Pengamanan kawasan TN Lore Lindu = 66.105,29 Ha



PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

KSDAE berkontribusi dalam membangun sarana prasarana di sekitar Danau Toba, Borobudur dan Mandalika

Capaian :



Pembangunan sarpras ekowisata di kawasan Danau Toba = 7 Unit TWA dan 2 Unit TN

Pembangunan sarpras ekowisata di kawasan Borobudur dan sekitarnya = 4 Unit TWA dan 2 Unit TN



Pembangunan sarpras ekowisata di kawasan Mandalika = 7 Unit TWA dan 3 Unit TN



Pembangunan sarpras ekowisata di Kawasan Konservasi dan TN = 22 KSDA dan 38 TN

PN Ketahanan Energi

KSDAE berkontribusi dalam penyediaan energi berbasis air

Capaian :

210 Kwat energi listrik yang dihasilkan dari mini/mikro hidro di KSDA



10.090 Kwat energi listrik yang dihasilkan dari mini/mikro hidro di TN

PN Pengembangan Wilayah

KSDAE berkontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana dan pembangunan pedesaan

Capaian :



Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan di 26 KSDA dan 48 TN

181 dokumen Rencana Penataan dan Pengelolaan KK berbasis Masyarakat

78.427,97 Ha kawasan hutan dikelola oleh masyarakat

406 kelompok masyarakat disekitar KK yang diberdayakan

236 kejadian gangguan yang berhasil diturunkan di KK

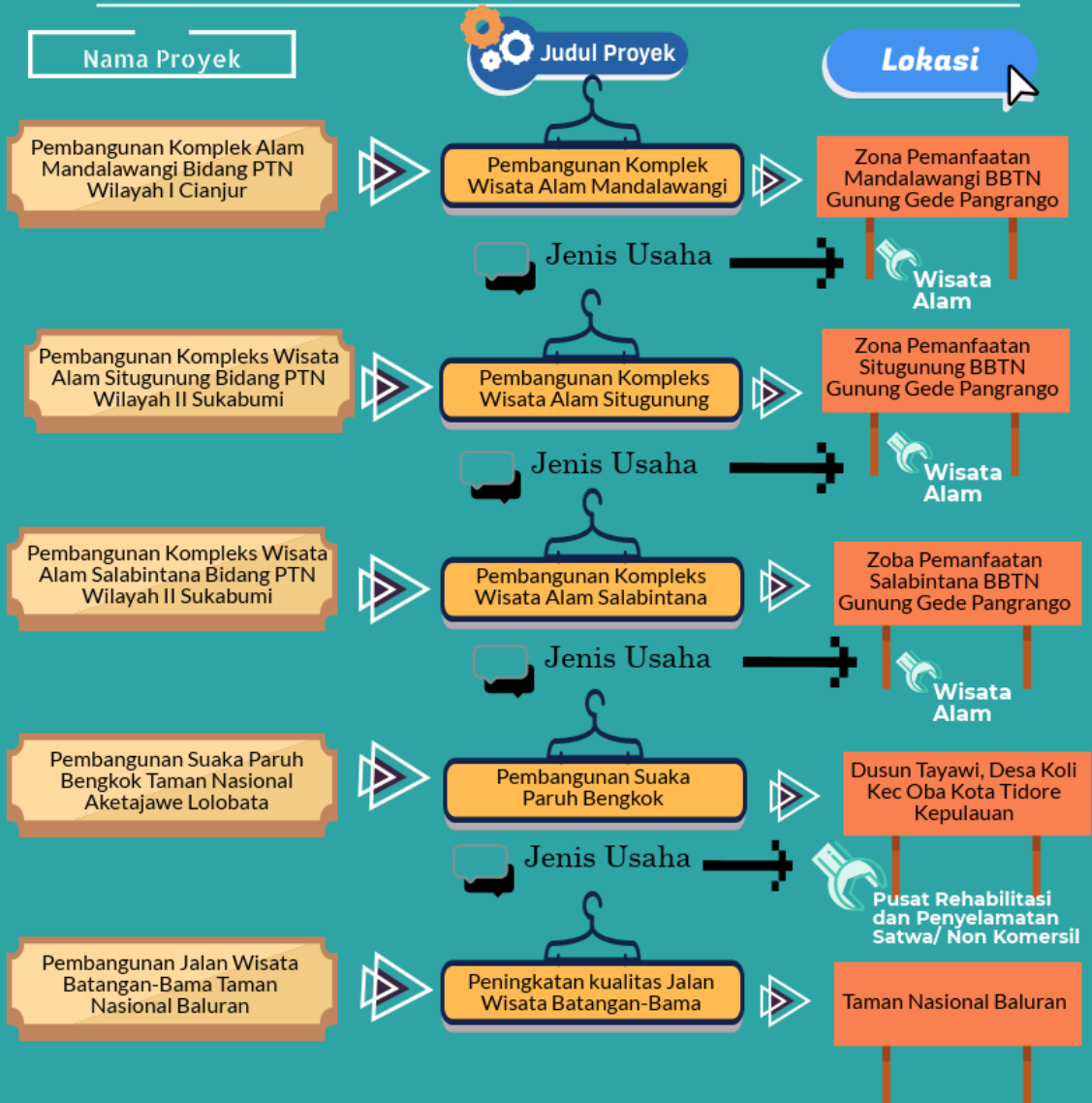
32.582,29 Ha kawasan yang berhasil dipulihkan

37,10% Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah

12 unit WRU yang beroperasi dan 64 sarpras WRU yang tersedia



PROYEK SBSN TAHUN 2018



Sumber Satker GGP, Aketajawe, Baluran



Anakan Kera Abu
TN Bali Barat
© Ganda Diarsa

////////////////

Capaian Aksi Tematik

////////////////////////////////

Pantauan Kantor Staf Presiden

Tahun 2018 Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan tiga aksi tematik yang dipantau langsung oleh Kantor Staf Presiden, baik yang terkait dengan program prioritas nasional maupun diluar tema program prioritas nasional. Tema aksi yang berkaitan dengan prioritas nasional yaitu Pariwisata dan Perhutanan Sosial, sedangkan tema diluar program prioritas nasional yaitu Kebijakan Kelautan Indonesia.

Tema: Pariwisata



Pemasangan Mooring Buoy di TN Komodo



Target

Mooring Buoy terpasang Kawasan TN Komodo



Capaian:

Tidak terlaksana

Pemenang lelang tidak menyanggupi sehingga dilakukan pelelangan ulang namun karena keterbatasan waktu tidak dapat dilaksanakan



Tema: Perhutanan Sosial

Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat

Target

Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi sebanyak 117 kelompok



Capaian:

Terlaksananya pengelolaan kolaboratif bersama masyarakat dalam pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) atau jasa lingkungan di 117 kelompok yang terdapat di 26 BBKSDA/BKSDA

Tema: Kebijakan Kelautan Indonesia



Kawasan Konservasi Non TN dengan Sarpras yang Layak Sebagai ODTWA Bahari

Target

Pembangunan sarana prasarana wisata pada kawasan Konservasi pesisir dan laut

Capaian:

BBKSDA Sumatera Utara (TWA Sibolangit, TWA Lau Debuk Debuk, TWA Sijaba Hutaginjang, TWA Sicike cike, dan KHDTK Aek Nauli); BKSDA Aceh (TWA Pulau Banyak dan TWA Pulau Weh); BKSDA NTB (TWA Kerandangan, TWA Suranadi, TWA Gunung Tunak, TWA Pulau Moyo, TWA Semongkat, TWA Danau Rawa Taliwang, dan TWA Pulau Satonda)

Taman Nasional dengan Sarpras yang Layak Sebagai ODTWA Bahari

Target

Pembangunan sarana prasarana wisata alam di 5 TN pesisir dan laut

Capaian:

TN Bali Barat, TN Kepulauan seribu, TN Komodo, TN Taka Bonerate, dan TN Wakatobi



Penataan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove

Target

Penataan dan Pengembangan KEE Mangrove di 3 wilayah



Capaian:

Penataan dan Pengembangan KEE Mangrove di Kab Cirebon, Kab Pemalang, Kab. Lombok Barat



KPHK pada Kawasan Konservasi Laut dan Pesisir Terbentuk dan Beroperasi

Target

Penetapan dan Operasionalisasi KPHK

Capaian:

KPHK Pulau Weh, KPHK Kepulauan Banyak, KPHK Hutan Bakau Pantai Timur, KPHK Pantai Panjang, KPHK Kepulauan Krakatau, KPHK Pulau Sempu, KPHK Pulau Saobi, KPHK Jakarta, KPHK Taliwang, KPHK Gunung Tunak, KPHK Moyo, KPHK Semongkat, KPHK Sangiang, KPHK Harlu, KPHK Riung, KPHK Teluk Maumere, KPHK Teluk Kupang, KPHK Tuti Adagae, KPHK Wae Wuul, KPHK Tanjung Keluang, KPHK Kuala Lupak, KPHK Tanah Laut-Gunung Kentawan, KPHK Morowali, KPHK Gunung Tinombala, KPHK Peropa, KPHK Gunung Sahuwai, KPHK Taliabu, KPHK Waigeo, KPHK Nabire-Tanjung Wiay, KPHK Cyclops Youtefa

Kawasan Konservasi TN dan Non TN di Pesisir dan Laut dengan Nilai Indeks METT Minimal 70%

Target

Nilai indeks METT minimal 70%

Capaian:

KSDA Jateng (12 KK), KSDA Sulsel (3 KK), KSDA NTT (1 KK), KSDA Riau (2 KK), KSDA Jambi (3 KK), KSDA Kalsel (2 KK), KSDA Papbar (1 KK), KSDA Sultra (1 KK), KSDA Bali (1 KK), TN Batang Gadis, TN Kepulauan Togean, TN Sembilang, TN Siberut,



Peningkatan Populasi Penyu Sisik, Penyu Belimbing dan Keanekaragaman Jenis Ikan di wilayah Laut dan Pesisir

Target

Data Populasi Penyu di TN Teluk Cenderawasih, TN Taka Bonerate, TN Kepulauan Seribu, TN Karimunjawa, TN Meru Betiri

Capaian:

TN Teluk Cenderawasih (Penyu Hijau sebanyak 4 ekor), TN Takabonerate (Penyu Sisik sebanyak 3 ekor), TN Kepulauan Seribu (Penyu Sisik sebanyak 5.241 ekor), TN Karimunjawa (Penyu Sisik sebanyak 35 ekor), TN Meru Betiri (Penyu Hijau sebanyak 1.946 ekor)

Usaha ekonomi produktif di desa penyangga

Target

Terciptanya usaha ekonomi produktif di daerah penyangga kawasan konservasi Non TN

Capaian:

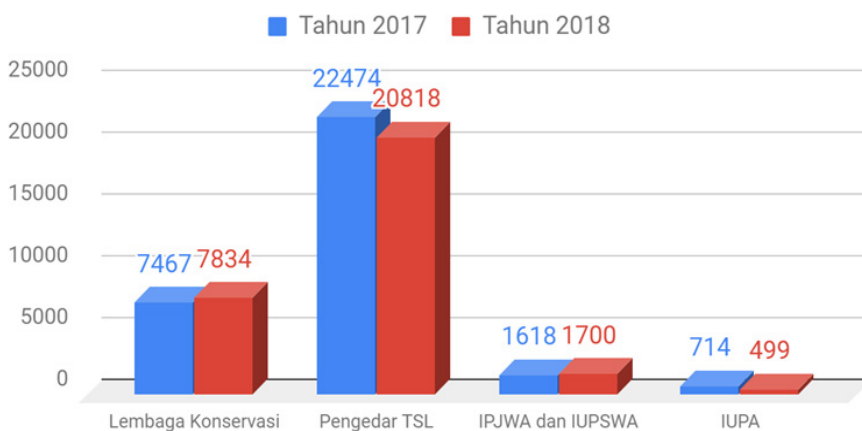
Pengembangan dan Pemanfaatan HNB atau Jasa ingkungan pada 26 KSDA pada 161 kelompok di 150 desa penyangga dengan melibatkan 4.054 masyarakat di sekitar kawasan konservasi



Penyerapan Tenaga Kerja

U saha dibidang pemanfaatan wisata alam dan pemanfaatan TSL bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pengusaha maupun pendapatan negara melalui PNBP, akan tetapi berdampak juga pada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dibidang pemanfaatan wisata alam dan pemanfaatan TSL selama tahun 2018 tercatat sebanyak 30.851 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 4,41%.

apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja ini antara lain disebabkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan akibat penghentian penerbitan *Health Certificate* (HC) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga perdagangan koral dalam dan luar negeri terhenti.



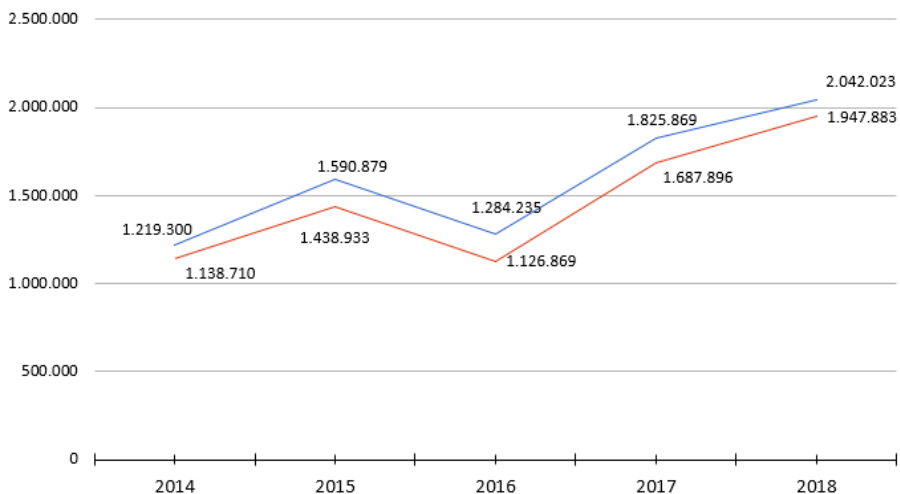
Gambar 23. Jumlah tenaga kerja pada usaha pemanfaatan wisata alam dan TSL

Sumber : Direktorat PJLHK dan KKH, 2018

Realisasi Anggaran 2018

Untuk membiayai program konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2018, dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.042.022.621.000,-. Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan, di mana alokasi anggaran yang paling tinggi adalah untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya Direktorat Jenderal

KSDAE yaitu sebesar 44,27%, dilanjutkan kegiatan Pengelolaan TN 30,40%, dan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati sebesar 17,85%. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, anggaran tahun 2018 untuk membiayai program ini mengalami peningkatan sebanyak 11,84%.

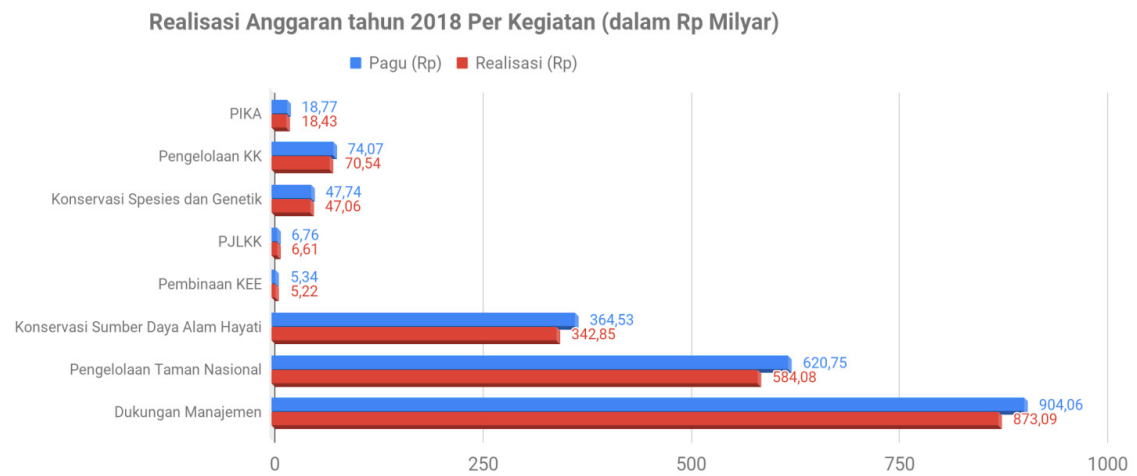


Gambar 24. Perbandingan Pagu dan Realisasi tahun 2014-2018
Dalam Juta Rupiah

Sumber : Setditjen KSDAE, 2018

Sampai dengan akhir tahun 2018, anggaran ini telah direalisasikan sebanyak Rp 1.947.883.386.312,- atau 95,39% (berdasarkan e-rekon Laporan Keuangan *unaudited*).

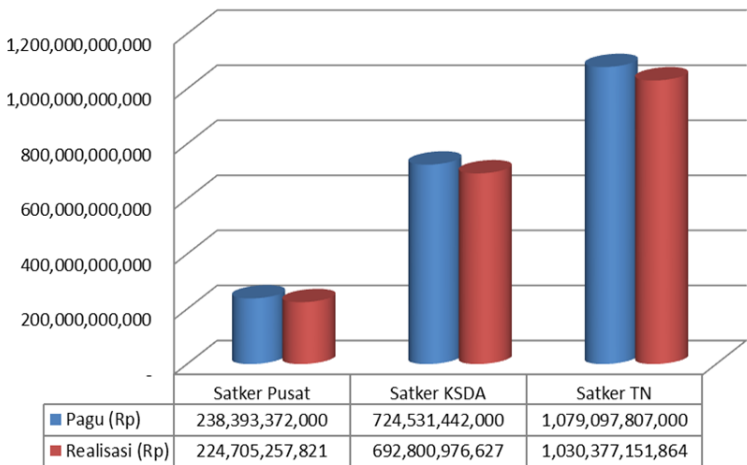
Penyerapan anggaran tertinggi pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik sebesar 98,57%, dilanjutkan kegiatan PIKA 98,19%, dan kegiatan Pembinaan KEE sebesar 97,75%.



Gambar 25. Anggaran Per Kegiatan
Sumber : Setditjen KSDAE, 2018

Jika dilihat dari jenis satker, anggaran program konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2018 digunakan untuk membiayai 6 satker pusat, 26 satker KSDA, dan 48 satker TN. Alokasi anggaran terbesar ada pada satker

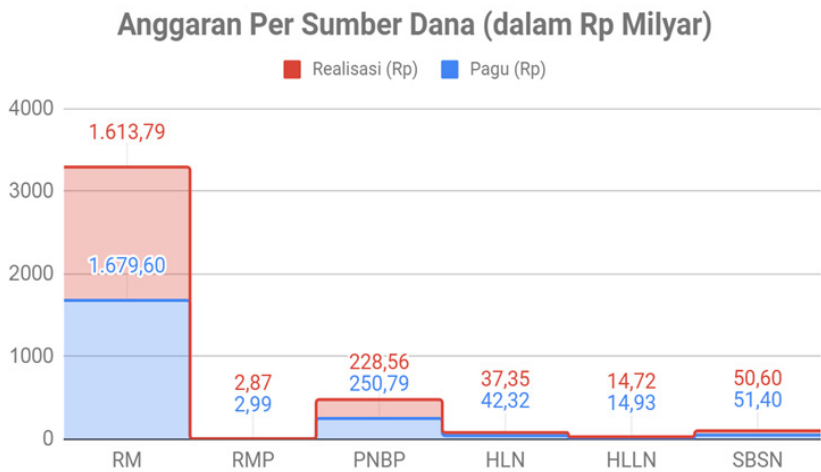
TN, selanjutnya satker KSDA, dan terakhir satker pusat. Realisasi menurut jenis terbesar menurut jenis satker adalah satker KSDA (95,62%), satker TN (95,49%) dan satker pusat (94,26%).



Gambar 26. Anggaran Per Jenis Satuan Kerja
Sumber : Setditjen KSDAE, 2018

Pada tahun 2018, terdapat enam jenis sumber dana yang digunakan untuk membiayai program konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dimana sumber dana tertinggi adalah RM 82,25%, selanjutnya PNBP 12,28%

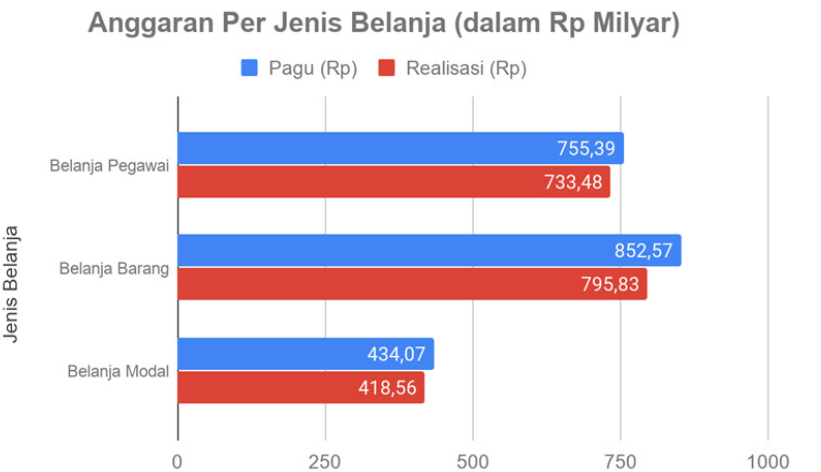
dan SBSN 2,52%. Sedangkan penyerapan anggaran tertinggi adalah pada sumber dana HLLN sebesar 98,61%, dilanjutkan SBSN sebesar 98,44%, dan RMP sebesar 96,14%.



Gambar 27. Realisasi Anggaran Persumber Dana
 Sumber : Setditjen KSDAE, 2018

Alokasi belanja barang merupakan alokasi tertinggi berdasarkan jenis belanja yaitu sebesar 41,75%, dilanjutkan belanja pegawai 41,75%, dan belanja modal 21,26%. Dengan

penyerapan anggaran tertinggi adalah pada jenis belanja pegawai 97,10%, dilanjutkan belanja modal 96,43%, dan belanja barang 93,35%.



Gambar 28. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja
 Sumber : Setditjen KSDAE, 2018

Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 dipengaruhi beberapa hal, antara lain:

1. Bencana alam mempengaruhi penyerapan anggaran BBTN Lore Lindu, BTN Gunung Rinjani, BKSDA Sulawesi Tengah, dan BKSDA NTB.
2. Terdapat sisa belanja pegawai berupa pembayaran belanja tunjangan kinerja, uang makan, tunjangan struktural.
3. Terdapat penyerapan sumber dana belanja modal yang tidak optimal, yaitu :
 - Pada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, pengadaan kendaraan bermotor yang berasal dari revisi anggaran BBTN Lore Lindu tidak cukup waktu untuk merealisasikan.
 - Sisa belanja modal yang tidak terserap karena tidak direvisi menjadi kegiatan atau belanja lainnya sebanyak Rp. 15,4 M.
 - Pada BKSDA NTB terjadi pemutusan kontrak senilai Rp. 1,2 M untuk pembangunan shelter, jalan dermaga, dan plaza di TWA Danau Rawa Taliwang.
 - Rehab kantor resort tidak terlaksana karena lokasi kantor resort pada lahan konsesi RAPP yang belum terdapat Berita Acara serah terima ke BTN Tesso Nilo.
4. Terdapat penyerapan sumber dana belanja barang yang tidak optimal, yaitu :
 - Pada BTN Manusela kegiatan pembangunan PLTMH senilai Rp. 1, 1 M tidak terlaksana karena adanya pemindahan lokasi sehingga tidak cukup waktu untuk pembangunannya.
 - Kegiatan pemulihan ekosistem pada BTN Manusela sebesar Rp. 700 juta, terkendala musim dan penyediaan bibit. Bibit yang tidak tumbuh akan diganti dengan jenis bibit yang lebih mudah tumbuh, akan tetapi pelaksanaannya tidak cukup waktu.
 - Kegiatan-kegiatan yang berasal dari sumber dana belanja barang tidak dilaksanakan, seperti pada BTN Gunung Rinjani dengan sisa sebesar Rp 1,6 M.
 - Terdapat sisa anggaran dari kegiatan karena tidak cukup waktu pelaksanaan berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat di BKSDA Kalteng, serta terdapat perubahan permintaan bantuan dari masyarakat, seperti pada BTN Tesso Nilo.
 - Lokasi penanaman di KSDA Kalteng dalam rangka pemulihan ekosistem berkurang luasannya karena lahan tidak layak untuk tanami (lokasi CA Tangkiling yang banyak bebatuan).

BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja Ditjen KSDAE tahun 2018 sebesar 109,34%, menunjukkan berbagai upaya pengelolaan hutan konservasi telah dilakukan secara efektif, sesuai dengan tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan. Kawasan konservasi memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat maupun pendapatan negara melalui PNPB dan devisa baik dari sektor wisata alam maupun pemanfaatan TSL.

Indikator kinerja program yang belum tercapai pada tahun 2018 dapat menjadi fokus capaian pada masa yang akan datang yaitu pengelolaan beberapa kawasan konservasi masih perlu ditingkatkan efektivitasnya sehingga tercapai nilai METT minimal 70%, serta populasi 25 jenis satwa terancam punah dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ketersediaan anggaran dan sumberdaya yang lain untuk pencapaian kedua IKP tersebut juga harus diperhatikan. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir periode Renstra 2015-2019, diharapkan seluruh sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat tercapai.



*Peristiwa geologis pertemuan lempeng Australia dan Lempeng
Pasifik telah membentuk morfologi pegunungan tengah Papua
yang unik dengan dinding-dinding tebing yang curam dan
cekungan-cekungan yang membentuk danau*

TN Lorentz

© Panji A. Nuariman



Daftar Pustaka

- BTN Manusela. 2017. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Survey Tanaman Obat di Hutan Mangga Dua Resort Saunulu SPTN Wilayah II Tehoru. BTN Manusela, Masohi.
- BTN Meru Betiri. 2019. Laporan Kinerja 2018 Balai Taman Nasional Meru Betiri. BTN Meru Betiri, Jember.
- Kuswanda W. 2014. Orangutan Batang Toru Kritis diambang Punah. Forda Press, Bogor.
- Santosa Y, Kartono AP, Rahman DA, Wulan . 2014. Panduan Inventarisasi Satwa Liar. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Jakarta.
- Susanti P.D. 2016. Karst: Kawasan Ekosistem Esensial Penyangga Kehidupan. Majalah Cerdas vol. 2 No 1. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Solo. ISSN: 2460-8440.
- Syarif NR, Lindasari IT. 2018. Wanafarma Meru Betiri: Keanekaragaman dan Pemanfaatan Tradisional Tumbuhan Obat. BTN Meru Betiri, Jember.
- [LIPI] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2014. Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2014. LIPI Press, Jakarta.

Lampiran 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. WIRATNO, M.Sc

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

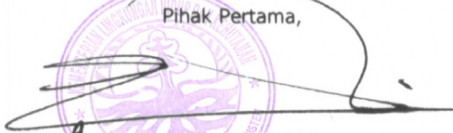
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2017

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Ir. WIRATNO, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 0034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
a.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar) Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 60 Unit Persentase peningkatan populasi 25 spesies satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 Jumlah unit kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 10 Unit Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)	100 unit 60 Unit 2% 10 Unit 7 paket
b.	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNPB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i>	Rp. 5 T
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	450.000 Orang
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.000.000 orang
		Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 unit, pemanfaatan jasa lingkungan sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 Unit)	26 Unit

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (x Rp. 1.000,-)
2.033.159.356

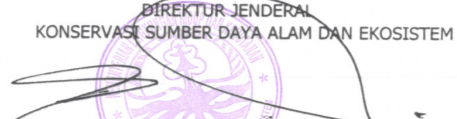
- Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**
1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi
 3. Konservasi Spesies dan Genetik
 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
 5. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial
 6. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
 7. Pengelolaan Taman Nasional
 8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Jakarta, Desember 2017

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.

DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM


Ir. WIRATNO, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003

Lampiran 2

Nilai METT Tahun 2015-2018

No	Fungsi	Nama KK	Provinsi	Nilai	Tahun Penetapan
1	TN	TN Bali Barat	Bali	73	2015
2	TN	TN Bantimurung -Bulusaraung	Sulawesi Selatan	71	2015
3	TN	TN Danau Sentarum	Kalimantan Barat	70	2015
4	TN	TN Gn Gede Pangrango	Jawa Barat	80	2015
5	TN	TN Gn Halimun Salak	Banten & Jawa Barat	71	2015
6	TN	TN Ujung Kulon	Banten	77	2015
7	TN	TN Wasur	Papua	70	2015
8	TN	TN Alas Purwo	Jawa Timur	75	2015
9	TNL	TNL Kep. Seribu	DKI Jakarta	70	2015
10	TNL	TNL Kep. Karimun Jawa	Jawa Tengah	73	2015
11	TNL	TNL Wakatobi	Sulawesi Tenggara	79	2015
12	CA	CA Gn Tangkuban Perahu	Jawa Barat	70	2016
13	CA	CA Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	70	2016
14	TN	TN Baluran	Jawa Timur	71	2016
15	TN	TN Bogani Nani Wartabone	Sulawesi Utara & Gorontalo	70	2016
16	TN	TN Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur	71	2016
17	TN	TN Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah	70	2016
18	TN	TN Bukit Barisan Selatan	Bengkulu, Lampung	71	2016
19	TN	TN Gn Ciremai	Jawa Barat	70	2016
20	TN	TN Gn Leuser	Aceh, Sumatera Utara	70	2016
21	TN	TN Gn Merapi	Jawa Tengah & DIY	70	2016
22	TN	TN Gn Palung	Kalimantan Barat	70	2016
23	TN	TN Gn Rinjani	Nusa Tenggara Barat	70	2016
24	TN	TN Komodo	Nusa Tenggara Timur	70	2016
25	TN	TN Kutai	Kalimantan Timur	70	2016

No	Fungsi	Nama KK	Provinsi	Nilai	Tahun Penetapan
26	TN	TN Manupeu Tanah Daru	Nusa Tenggara Timur	70	2016
27	TN	TN Meru Betiri	Jawa Timur	70	2016
28	TN	TN Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	71	2016
29	TWA	TWA Lejja	Sulawesi Selatan	70	2016
30	TN	TN Lore Lindu	Sulawesi Tengah	70	2016
31	TN	TN Bukit Tigapuluh	Riau, Jambi	70	2016
32	TN	TN Gn Merbabu	Jawa Tengah	76	2016
33	TN	TN Sebangau	Kalimantan Tengah	78	2016
34	TNL	TNL Teluk Cenderawasih	Papua Barat	73	2016
35	TNL	TNL Taka Bonerate	Sulawesi Selatan	74	2016
36	TNL	TNL Bunaken	Sulawesi Utara	71	2016
37	TWA	TWA Gn Papandayan	Jawa Barat	74	2016
38	TWA	TWA Kawah Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	73	2016
39	TWA	TWA Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	72	2016
40	THR	THR Ir. H. Djuanda	Jawa Barat	74	2016
41	CA	Danau Dusun Besar Reg.61	Bengkulu	70	2017
42	CA	Gunung Batu Gamping	DI Yogyakarta	70	2017
43	CA	Gunung Tilu	Jawa Barat	72	2017
44	SM	Cikepuh	Jawa Barat	70	2017
45	CA	Pager Wunung Darupono	Jawa Tengah	73	2017
46	CA	Karang Bolong	Jawa Tengah	72	2017
47	CA	Cabak	Jawa Tengah	71	2017
48	THR	R. Soeryo	Jawa Timur	72	2017
49	CA	Gunung Celering	Jawa Tengah	71	2017
50	CA	Pringombo I	Jawa Tengah	70	2017
51	CA	Keling II/III	Jawa Tengah	70	2017
52	CA	Gunung Picis	Jawa Timur	76	2017
53	CA	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Jawa Timur	72	2017
54	CA	Gunung Sigogor	Jawa Timur	70	2017
55	CA	Pulau Nusa Barung	Jawa Timur	70	2017
56	CA	Kepulau Krakatau	Lampung	75	2017
57	CA	Waigeo Barat	Papua Barat	71	2017
58	CA	Ponda-ponda	Sulawesi Selatan	77	2017
59	CA	Kalaena	Sulawesi Selatan	74	2017
60	CA	Lamedae	Sulawesi Tenggara	71	2017

No	Fungsi	Nama KK	Provinsi	Nilai	Tahun Penetapan
61	THR	Sinjai/Abdul Latief	Sulawesi Selatan	74	2017
62	SM	Paliyan	DI Yogyakarta	70	2017
63	SM	Sermo	DI Yogyakarta	71	2017
64	SM	Pulau Bawean	Jawa Timur	75	2017
65	SM	Tanjung Peropa	Sulawesi Tenggara	70	2017
66	SM	Dangku	Sumatera Selatan	73	2017
67	TWA	Pulau Weh	Aceh	73	2017
68	TWA	Angke Kapuk	DKI Jakarta	80	2017
69	TWA	Kerandangan	Nusa Tenggara Barat	70	2017
70	TN	Berbak	Jambi	70	2017
71	TWA	Grojogan Sewu	Jawa Tengah	78	2017
72	TWA	Telogo Warno/ Telogo Pengilon	Jawa Tengah	75	2017
73	TWA	Gunung Selok	Jawa Tengah	70	2017
74	TWA	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Jawa Timur	78	2017
75	TWA	Gunung Tunak	Nusa Tenggara Barat	71	2017
76	TWA	Sorong	Papua Barat	70	2017
77	TWA	Punti Kayu	Sumatera Selatan	71	2017
78	THR	Ngurah Rai	Bali	70	2017
79	TN	Aketajawe Lolobata	Maluku Utara	70	2017
80	TWA	Telaga Warna	Jawa Barat	70	2017
81	CA	Bantarbolang	Jawa Tengah	70	2018
82	CA	Gunung Burangrang	Jawa Barat	74	2018
83	CA	Dolok Sibual-buali	Sumatera Utara	70	2018
84	CA	Durian Luncuk I	Jambi	71	2018
85	CA	Durian Luncuk II	Jambi	73	2018
86	CA	Gunung Raya Pasi	Kalimantan Barat	70	2018
87	CA	Jatinegara	Jawa Tengah	70	2018
88	CA	Ht. Bakau Pantai Timur	Jambi	70	2018
89	CA	Kecubung Ulolanang	Jawa Tengah	71	2018
90	CA	Sukawayana	Jawa Barat	70	2018
91	CA	Keling I	Jawa Tengah	72	2018
92	CA	Kembang	Jawa Tengah	70	2018
93	CA	Moga	Jawa Tengah	70	2018
94	CA	Nusakambangan Barat	Jawa Tengah	70	2018
95	CA	Manggis Gadungan	Jawa Timur	72	2018
96	CA	Mangunan/Imogiri	DI Yogyakarta	74	2018
97	CA	Nusakambangan Timur	Jawa Tengah	71	2018
98	CA	Pantodomas	Jawa Tengah	70	2018

No	Fungsi	Nama KK	Provinsi	Nilai	Tahun Penetapan
99	CA	Nyiut Panrissen	Kalimantan Barat	70	2018
100	CA	Pinus Jantho	Aceh	70	2018
101	CA	Pulau Bawean	Jawa Timur	70	2018
102	CA	S Baheuwo Teluk Klowe	Bengkulu	70	2018
103	CA	Sibolangit	Sumatera Utara	71	2018
104	CA	Telaga Patengan	Jawa Barat	72	2018
105	CA	Taba Penanjung I	Bengkulu	70	2018
106	CA	Telogo Dringo	Jawa Tengah	71	2018
107	CA	Telogo Ranjeng	Jawa Tengah	70	2018
108	CA	Telogo Sumurup	Jawa Tengah	72	2018
109	CA	Teluk Adang	Kalimantan Timur	71	2018
110	CA	Wijaya Kusuma	Jawa Tengah	71	2018
111	SM	Bentayan	Sumatera Selatan	70	2018
112	SM	Gumai Pasemah (Gumai Tebing Tinggi)	Sumatera Selatan	71	2018
113	SM	Karang Gading/ Langkat Timur Laut	Sumatera Utara	71	2018
114	SM	Komara	Sulawesi Selatan	71	2018
115	SM	Lamandau	Kalimantan Tengah	70	2018
116	SM	Padang Sugihan	Sumatera Selatan	70	2018
117	SM	Pleihari Tanah laut	Kalimantan Selatan	72	2018
118	SM	Pulau Kaget	Kalimantan Selatan	70	2018
119	SM	Pulau Rambut dan Perairan dsk.	DKI Jakarta	72	2018
120	SM	Rawa Singkil	Aceh	78	2018
121	SM	Siranggas	Sumatera Utara	70	2018
122	TB	Komara	Sulawesi Selatan	70	2018
123	TN	Batang Gadis	Sumatera Utara	70	2018
124	TN	Bukit Duabelas	Jambi	76	2018
125	TN	Kelimutu	Nusa Tenggara Timur	75	2018
126	TN	Laiwangi Wanggameti	Nusa Tenggara Timur	70	2018
127	TN	Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	78	2018
128	TN	Sembilang	Sumatera Selatan	72	2018
129	TN	Siberut	Sumatera Barat	70	2018
130	TN	Tesso Nilo	Riau	73	2018
131	TN	Way Kambas	Lampung	75	2018

No	Fungsi	Nama KK	Provinsi	Nilai	Tahun Penetapan
132	TN	Zamrud	Riau	73	2018
133	TNL	Kepulauan Togean	Sulawesi Tengah	74	2018
134	TWA	Air Rami I Reg.87	Bengkulu	70	2018
135	TWA	Cimanggu	Jawa Barat	71	2018
136	TWA	Bukit Kaba	Bengkulu	71	2018
137	TWA	Kawah Kamojang	Jawa Barat	72	2018
138	TWA	Linggarjati	Jawa Barat	71	2018
139	TWA	Guci	Jawa Tengah	71	2018
140	TWA	Gunung Baung	Jawa Timur	70	2018
141	TWA	Gunung Meja	Papua Barat	70	2018
142	TWA	Jantho	Aceh	72	2018
143	TWA	Kepulauan Banyak	Aceh	71	2018
144	TWA	Muka Kuning	Kepulauan Riau	71	2018
145	TWA	Panelokan	Bali	70	2018
146	TWA	Pulau Satonda	Nusa Tenggara Barat	70	2018
147	TWA	Ruteng	Nusa Tenggara Timur	73	2018
148	TWA	Sibolangit	Sumatera Utara	73	2018
149	TWA	Sicikeh-cikeh	Sumatera Utara	72	2018
150	TWA	Sidrap	Sulawesi Selatan	70	2018
151	TWA	Sumber Semen	Jawa Tengah	70	2018
152	TWA	Sungai Dumai	Riau	70	2018
153	TWA	Tanjung Belimbing	Kalimantan Barat	74	2018
154	TWA	Tretes	Jawa Timur	71	2018
155	TWAL	Teluk Lasolo	Sulawesi Tenggara	74	2018

Lampiran 3

Matriks KPHK Non Taman Nasional yang Beroperasional Tahun 2015-2018

No	UPT	Nama KPHK	SK Penetapan KPHK	Tanggal	Luas (ha)	Realisasi Tahun
1	BKSDA Sumatera Barat	Arau Hilir	SK.982/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	105.375	2015
2	BKSDA Sumatera Selatan	Dangku Bentayan	SK.983/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	89.574	2015
3	BBKSDA Jawa Barat	Guntur-Papandayan	SK.984j/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	15.318	2015
4	BKSDA Kalimantan Barat	Gunung Melintang	SK.987/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	25.127	2015
5	BBKSDA Riau	Kerumutan	SK.981/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	120.000	2015
6	BBKSDA Sulawesi Selatan	Towuti	SK.989/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	185.000	2015
7	BKSDA Sulawesi Utara	Nantu	SK.990/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	31.215	2015
8	BKSDA Aceh	Rawa Singkil	SK.980/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	102.500	2015
9	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Ruteng	SK.986/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	32.248	2015
10	BBKSDA Papua Barat	Bolmalit-Maghlit	SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	9.194	2016
11	BBKSDA Papua Barat	Sorong-Klamono	SK.456/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	2.990	2016
12	BBKSDA Papua Barat	Gunung Meja Sidei Kaironi	SK.457/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	968	2016
13	BBKSDA Papua Barat	Arfak	SK.458/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	68.325	2016
14	BBKSDA Papua Barat	Waigeo	SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	264.073	2016
15	BKSDA Sulawesi Tengah	Pamona Bancea Tomata	SK.462/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	35.125	2016
16	BKSDA Sulawesi Tengah	Pangi Binangga	SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	70.997	2016
17	BKSDA Sulawesi Tengah	Gunung Tinombala	SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	38.608	2016
18	BKSDA Sulawesi Tengah	Gunung Dako Pinjan Tanjung Matop Dolongan	SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	21.659	2016
19	BKSDA Kalimantan Selatan	Kuala Lupak	SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	4.008	2016

No	UPT	Nama KPHK	SK Penetapan KPHK	Tanggal	Luas (ha)	Realisasi Tahun
20	BBKSDA Riau	Giam Siak Kecil-Bukit Batu	SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	99.858	2016
21	BKSDA Jawa Tengah	Pati Barat	SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	1.426	2016
22	BKSDA Jawa Tengah	Cilacap	SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	982	2016
23	BKSDA Kalimantan Tengah	Pararawen	SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	5.855	2016
24	BKSDA Kalimantan Tengah	Sei Lamandau	SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	61.425	2016
25	BKSDA Bali	Bedugul-Sangeh	SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	3.635	2016
26	BKSDA Bali	Kintamani	SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	2.649	2016
27	BBKSDA Sumatera Utara	Barumun	SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	36.261	2016
28	BBKSDA Sumatera Utara	Sicike Cike	SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	6.144	2016
29	BKSDA Bengkulu	Enggano	SK.723/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	9.281	2016
30	BBKSDA Jawa Timur	Kawah Ijen	SK.725/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	2.575	2016
31	BBKSDA Jawa Timur	Dataran Tinggi Yang	SK.726/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2017	20 September 2016	12.865	2016
32	BBKSDA Papua	Cycloops Youtefa	SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2017	20 September 2016	33.289	2016
33	BKSDA DKI Jakarta	Jakarta	SK.731/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	242	2016
34	BKSDA Sulawesi Tenggara	Lambusango	SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	28.595	2016
35	BKSDA Sulawesi Tenggara	Peropa	SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	44.012	2016
36	BKSDA Kalimantan Barat	Muara Kendawangan	SK.737/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	147.614	2016
37	BKSDA Kalimantan Barat	Gunung Nyiut	SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	91.759	2016
38	BBKSDA Jawa Barat	Simpang Tilu	SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	23.356	2016
39	BBKSDA Jawa Barat	Burangrang Tangkuban Perahu	SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	4.772	2016
40	BKSDA Sumatera Selatan	Padang Sugihan	SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	88.148	2016
41	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Harlu	SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	3.681	2016
42	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Gunung Mutis	SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	12.315	2016

No	UPT	Nama KPHK	SK Penetapan KPHK	Tanggal	Luas (ha)	Realisasi Tahun
43	BKSDA Aceh	Pulau Weh	SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	6.481	2016
44	BKSDA Aceh	Lingga Isaq	SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	86.634	2016
45	BKSDA Sulawesi Utara	Tangkoko	SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	8.545	2016
46	BKSDA DI Yogyakarta	Yogyakarta	SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	632	2016
47	BKSDA Sulawesi Tengah	Morowali	SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	216.908	2017
48	BKSDA Sulawesi Tengah	Bakiriang	SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	17.479	2017
49	BBKSDA Riau	Bukit Rimbang Bukit Baling	SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	142.156	2017
50	BKSDA Bengkulu	Bukit Kaba	SK.469Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	15.133	2017
51	BKSDA Kalimantan Timur	Muara Kaman Sedulang	SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	65.445	2017
52	BKSDA Maluku	KPHK Gunung Sahuwai	SK.729/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	32.476	2017
53	BKSDA Maluku	Taliabu	SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	13.114	2017
54	BKSDA Lampung	Kepulauan Krakatau	SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	13.365	2017
55	BKSDA Jambi	Durian Luncuk	SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	111	2017
56	BKSDA Jambi	KPHK Hutan Bakau Pantai Timur	SK.736/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	4.872	2017
57	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Moyo	SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	30.945	2017
58	BKSDA Nusa Tenggara Barat	KPHK Gunung Tunak	SK.742/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	2.225	2017
59	BBKSDA Sumatera Utara	Karang Gading- Langkat Timur Laut	SK.410/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	13.474	2017
60	BBKSDA Sumatera Utara	Sibolangit	SK.411/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	596	2017
61	BBKSDA Sumatera Utara	Sipriok	SK.412/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	15.330	2017
62	BBKSDA Sumatera Utara	Dolok Tinggi Raja	SK.413/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	408	2017
63	BBKSDA Sumatera Utara	Dolok Surungan	SK.414/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	22.241	2017
64	BBKSDA Sumatera Utara	Holiday Resort	SK.415/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	2.100	2017
65	BBKSDA Sumatera Utara	Pulau Pini	SK.416/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	8.325	2017

No	UPT	Nama KPHK	SK Penetapan KPHK	Tanggal	Luas (ha)	Realisasi Tahun
66	BBKSDA Sumatera Utara	Sijaba Hutaginjang	SK.417/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	416	2017
67	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Semongkat	SK.418/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.783	2017
68	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Taliwang	SK.419/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	6.608,20	2017
69	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Suranadi	SK.420/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	448	2017
70	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Sangiang	SK.421/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	11.546	2017
71	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Tuti Adegae	SK.422/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	7.700	2017
72	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Ndeti Kilikima	SK.423/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.847	2017
73	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Wae Wuul	SK.424/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.485	2017
74	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Teluk Maumere	SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	9.013	2017
75	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Riuang	SK.426/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	11.829	2017
76	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Kateri	SK.427/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	7.945	2017
77	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Camplong	SK.428/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.015	2017
78	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Ale Aisio	SK.429/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	9.825	2017
79	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Watu Ata	SK.430/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	4.899	2017
80	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Teluk Kupang	SK.431/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	67.628	2017
81	BBKSDA Papua	Nabire-Tanjung Wiay	SK.432/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	4.462	2017
82	BKSDA Aceh	Jantho	SK.123/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	19.487	2018
83	BKSDA Aceh	Pulau Banyak	SK.124/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	205.720	2018
84	BKSDA Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	SK.125/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	10.829	2018
85	BKSDA Bengkulu	Seblat	SK.126/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	8.139	2018
86	BKSDA Bengkulu	Pantai Panjang	SK.127/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	1.559	2018
87	BKSDA Sumatera Selatan	Gumai Pasemah	SK.128/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	46.123	2018
88	BKSDA Sumatera Selatan	Gunung Raya	SK.129/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	44.996	2018

No	UPT	Nama KPHK	SK Penetapan KPHK	Tanggal	Luas (ha)	Realisasi Tahun
89	BKSDA Jawa Tengah	Sablokare	SK.130/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	292	2018
90	BBKSDA Jawa Timur	Nusa Barung-Watangan-Curah	SK.131/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	7.655	2018
91	BBKSDA Jawa Timur	Pulau Sempu	SK.132/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	977	2018
92	BBKSDA Jawa Timur	Pulau Saobi	SK.133/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	437	2018
93	BBKSDA Jawa Timur	Baung-Abang-Tretes	SK.134/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	266	2018
94	BBKSDA Jawa Timur	Picis-Sigogor-Nglirip-Manggis	SK.135/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	245	2018
95	BKSDA Kalimantan Barat	Kepulauan Karimata	SK.136/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	190.745	2018
96	BKSDA Kalimantan Barat	Kelam Komplek	SK.137/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	1.334	2018
97	BKSDA Kalimantan Barat	Mandor Pasi	SK.138/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	6.064	2018
98	BKSDA Kalimantan Tengah	Tanjung Keluang	SK.139/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	2.478	2018
99	KSDA Kalimantan Selatan	Tanah Laut-Gn Kentawan	SK.140/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	8.404	2018
100	BKSDA Sulawesi Tenggara	Mangolo	SK.141/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	4.567	2018
101	BKSDA Sulawesi Tenggara	Buton Utara	SK.142/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	91.025	2018
102	BBKSDA Sulawesi Selatan	Mario	SK.143/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	5.334	2018
103	BBKSDA Sulawesi Selatan	Komara	SK.144/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	10.196	2018

Lampiran 4

Matriks Peningkatan Populasi 25 Satwa Terancam Punah Prioritas

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
1	Harimau Sumatera	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Tambling – TNBukit Barisan Selatan	28	40	12	42.86
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Pegunungan Bendahara (Kabupaten Aceh Tenggara dan Langkat) luas 68.880 Ha - TN Gunung Leuser	5	12	7	140.00
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	TERMA - TN Way Kambas	9	58	49	150.00
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	TN Berbak	15	24	9	60.00
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Resort Talang Lakat, SPTN Wilayah II Belilas - TN Bukit Tiga Puluh	7	12	5	71.43
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	SM Barumon -KSDA Sumatera Utara	7	8	1	14.29
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Sihayo-Roburan Dolok (Resort 1 dan 2) - TN Batang Gadis	2		-4	-66.67
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Pagargunung-Alahankae (Resort 3 dan 4) - TN Batang Gadis	2			
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Sibanggor-Sipotinjak (Resort 5) - TN Batang Gadis	2			
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Pegunungan Bendahara (Kabupaten Aceh Tenggara dan Langkat) luas 68.880 Ha - TN G. Leuser	5	6	1	20.00
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	SM Dangku, sumpal, simpang Bondon, jalan asamera sambar, Pakerin, BPP, SBB, Sei Anton, Dawas, Sako Suban, Camp Pisang 1, Sei Petaling 1 (luas 28.236 Ha) - KSDA Sumatera Selatan	7	7	0	0.00
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Hutan Lindung Register 39 Batu Tegi - KSDA Bengkulu-Lampung	1	2	1	100.00

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	TWA Seblat (eks HPKH PLG seblat) kabupaten Bengkulu Utara - KSDA Bengkulu-Lampung	8	8	0	0.00
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	TB Semidang Bukit Kabut - KSDA Bengkulu-Lampung	12	6	-6	-50.00
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Hamparan HL Raja Mandara, Kecamatan Padang Guci, Kabupaten Kaur - KSDA Bengkulu-Lampung	2	3	1	50.00
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	CA Danau tes - KSDA Bengkulu-Lampung	1	0	-1	-100.00
		<i>Panthera tigris sumatrae</i>	PT. REKI Harapan Rain Forest, Kabupaten Batanghari - KSDA Jambi	6	8	2	33.33
2	Gajah Sumatera	<i>Elephas maximus sumatrensis</i>	TERMA - TN Way Kambas	39	111	72	150.00
		<i>Elephas maximus sumatrensis</i>	Way Haru - Way Canguk – TNBukit Barisan Selatan	21	25	4	19.05
		<i>Elephas maximus sumatrensis</i>	Lanskap Kabupaten Aceh Tengah-Bener Meriah-Bireuen - KSDA Aceh	41	62	21	51.22
		<i>Elephas maximus sumatrensis</i>	Site monitoring 1 dan site monitoring 2 - TN Tesso Nilo	128	148	20	15.63
		<i>Elephas maximus sumatrensis</i>	Sikundur (Kabupaten Langkat) - TN G. Leuser	23	25	2	8.70
		<i>Elephas maximus sumatrensis</i>	SM Padang Sugihan, jalur 21, jalur 6, jalur7, sungai biyuku - KSDA Sumatera Selatan	55	116	61	110.91
		<i>Elephas maximus sumatrensis</i>	TWA Seblat (eks HPKH PLG seblat) kabupaten Bengkulu Utara - KSDA Bengkulu-Lampung	71	52	-19	-26.76
		<i>Elephas maximus sumatrensis</i>	Lansekab Bukit 30 Kab. Tebo - KSDA Jambi	73	103	30	41.10
3	Badak	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Tenumbang - Way Krui - Liwa - TNBBS	12	3	-9	-75.00
		<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	TERMA - TN Way Kambas	10	7	-3	-30.00
		<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Lembah Mamas (Kabupaten Aceh Tenggara) - TN G. Leuser	7	16	9	128.57

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
		<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Semenanjung Ujung Kulon - TN Ujung Kulon	58	69	11	18.97
4	Banteng	<i>Bos javanicus</i>	Perkebunan Trebasala (Banyuwangi) - KSDA Jatim	22	15	-32	-68.09
		<i>Bos javanicus</i>	Hutan Lindung Londo lampesan Perum Perhutani BKPH Wuluhan KPH Jember - KSDA Jatim	20			
		<i>Bos javanicus</i>	Hutan Lindung Lebakharjo Perum Perhutani KPH malang BKPH Dampit Blok Kalololo dan Blok Kaliganteng - KSDA Jatim	5			
		<i>Bos javanicus</i>	Blok Lodadi, Manung dan sekitarnya (Resort Bandalit, SPTN II ambulu) - TN Meru Betiri	43	65	5.00	8.33
		<i>Bos javanicus</i>	Blok 90an, Blok 60an, Blok Pantai dan sekitarnya (resort Sukamade, SPTN Wilayah I sarongan) - TN Meru Betiri	17			
		<i>Bos javanicus</i>	Padang rumput long tua SPTN wilayah II Long Alango - TN Kayan Mentarang	13	16	3	23.08
		<i>Bos javanicus</i>	Feeding ground sadengan - TN Alas Purwo	117	74	-43	-36.75
		<i>Bos javanicus</i>	Tj Laya, Cidaon, Nyiur, Nyawaan, Citelang, Cigenter, Ciermokla, Cikalajetan, Karang Ranjang, Cibandawoh, Cikeusik, Citadahan dan Cibunar; Luas 38.000 Ha - TN Ujung Kulon	124	74	-50	-40.32
		<i>Bos javanicus</i>	Blok Bekol, Bama dan sekitarnya (resort Bama SPTN I Bekol); Blok Palongan, Semiang, Dungbiru dan sekitarnya (resort Perengan, SPTN I Bekol); Blok Panjaitan, Curah Tangis dan sekitarnya (resort	33	112	79	150.00

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
			Bitakol, SPTN Wilayah II karangtekok) - TN Baluran				
5	Owa	<i>Hylobates moloch</i>	HL Petungkriyono, BKPH Doro, KPH Pekalongan Timur, Kab. Pekalongan - KSDA Jawa Tengah	25	19	-6	-24.00
		<i>Hylobates moloch</i>	Linggoasri, BPKH Kesesi, KPH Pekalongan Timur, Kabupaten Pekalongan - KSDA Jawa Tengah	10	7	-3	-30.00
		<i>Hylobates agilis albibarbis</i>	Stasiun riset cabang panti - TN Gunung Palung	21	25	4	19.05
		<i>Hylobates moloch</i>	Cikaniki, TN G. Halimun Salak	26	82	21	34.43
		<i>Hylobates moloch</i>	Ciptarasa-Ciptagelar, TN G. Halimun Salak	20			
		<i>Hylobates moloch</i>	G. Luhur, TN G. Halimun Salak	15			
		<i>Hylobates moloch</i>	Pasir Ipi, Cinibung, G. Honje, G. Ciung - TN Ujung Kulon	184	745	561	150.00
		<i>Hylobates moloch</i>	CA gunung Tilu - KSDA Jawa Barat	31	52	21	67.74
		<i>Hylobates moloch</i>	CA Burangrang - KSDA Jawa Barat	8	10	2	25.00
		<i>Hylobates moloch</i>	CA Luwung Sancang - KSDA Jawa Barat	19	29	10	52.63
		<i>Hylobates moloch</i>	Pusat Penelitian Konservasi Alam Bodogol (PPKAB), Resort PTN Bodogol - TN G. Gede Pangrango	31	117	86	150.00
		<i>Hylobates klosii</i>	Daerah Bojokan - TN Siberut	14	21	-36	-63.16
		<i>Hylobates klosii</i>	Daerah Cimpungan - TN Siberut	10			
		<i>Hylobates klosii</i>	Daerah simabugai - TN Siberut	10			
		<i>Hylobates klosii</i>	Daerah matotonan - TN Siberut	0			
		<i>Hylobates klosii</i>	Mongan Tepu, Sagulubek - TN Siberut	15			
		<i>Hylobates klosii</i>	Daerah Kaleak, Sagulubek - TN Siberut	8			
6	Orangutan	<i>Pongo pygmaeus</i>	Site Hulu, SM Sungai Imandau - KSDA Kalteng	34	25	-9	-26.47
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Site Buluh, SM Sungai Imandau - KSDA Kalteng	192	91	-101	-52.60

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Site Teringin, SM Sungai lamandau - KSDA Kalteng	21	31	10	47.62
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Site Mangkung/Rasau, SM Sungai Lamandau - KSDA Kalteng	23	119	96	150.00
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Resort Belaban (SPTN Wilayah I Nanga Pinoh) – TNBukit Baka Bukit Raya	25	8	-17	-68.00
		<i>Pongo abelii</i>	kawasan CA Hutan Pinus Jantho - KSDA Aceh	55	96	41	74.55
		<i>Pongo pygmaeus wrumbii</i>	Stasiun riset Cabang Panti - TN Gunung Palung	63	65	2	3.17
		<i>Pongo pygmaeus</i>	DAS Embaloh (sebabal dan Camp Derian) - TNBKDS	361	704	343	95.01
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Bukit Semujan - Bukit Semangit, Menyukung - Melingkung - TNBKDS	46	118	72	150.00
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Sangkima - TN. Kutai	341	382	41	12.02
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Mentoko - TN. Kutai	188	409	221	117.55
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Menamang - TN. Kutai	280	471	191	68.21
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Orangutan Sekonyer - TN Tanjung Puting	739	1192	453	61.30
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Tatah Jie (Baung) - TN Tanjung Puting	24	22	-2	-8.33
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Tatah Empa (Tanjung rengas) - TN Tanjung Puting	133	192	59	44.36
		<i>Pongo abelii</i>	CA Dolok Sibual Buali - KSDA Sumatera Utara	15	15	0	0.00
		<i>Pongo abelii</i>	Suaq Balimbing (kabupaten aceh selatan) - TN G. Leuser	21	45	24	114.29
		<i>Pongo pygmaeus</i>	G. Serang, CA Gunung Nyiut, Kab. Bengkayang, landak - KSDA Kalimantan Barat	39	2	-37	-94.87
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Laman Satong, APL (kawasan Essensial), Kab. Ketapang - KSDA Kalimantan Barat	10	0	-10	-100.00
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Gunung Putri, APL, HP (kawasan essensial), Kab.	47	588	541	150.00

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
			Ketapang - KSDA Kalimantan Barat				
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Sungai Lesan, HL Sungai Lesan, Kab. Barau - KSDA Kaltim	277	104	-173	-62.45
		<i>Pongo pygmaeus</i>	SSI, Resort mangkok, SPTN Wilayah II - TN Sebangau	103	112	9	8.74
		<i>Pongo pygmaeus</i>	Sungai Penggualas, Resort Baun Bango, SPTN Wilayah III - TN Sebangau	109	142	33	30.28
7	Bekantan	<i>Nasalis larvatus</i>	Sungai Batu Barat-Matan - TN G. Palung	455	363	-92	-20.22
		<i>Nasalis larvatus</i>	Sungai Tawang, S. Seputung, S. Batang Ketam, S. Batang Leboyan, S. Belitung - TNBKDS	679	757	78	11.49
		<i>Nasalis larvatus</i>	Sungai Pari, Teluk Lombok - TN. Kutai	16	17	1	6.25
		<i>Nasalis larvatus</i>	Sungai Sanggata - TN. Kutai	24	36	12	50.00
		<i>Nasalis larvatus</i>	Sungai Teluk Pandan, sungai selimpus dan sungai kanduung - TN. Kutai	22	74	52	150.00
		<i>Nasalis larvatus</i>	S. Sangkima - S. Padang - TN. Kutai	25	66	41	150.00
		<i>Nasalis larvatus</i>	TWA P. Bakut - KSDA Kalimantan Selatan	30	67	37	123.33
		<i>Nasalis larvatus</i>	TWA P. Kembang - KSDA Kalimantan Selatan	21	48	27	128.57
		<i>Nasalis larvatus</i>	SM P. Kaget - KSDA Kalimantan Selatan	74	78	4	5.41
		<i>Nasalis larvatus</i>	Handil Bahagia, mercu suar, SM Kuala Lupak - KSDA Kalimantan Selatan	170	331	161	94.71
		<i>Nasalis larvatus</i>	Bekantan Sekonyer - TN Tanjung Puting	431	488	57	13.23
		<i>Nasalis larvatus</i>	Cermai, Kab. Sambas, APL (kawasan essensial) - KSDA Kalimantan Barat	24	191	167	150.00
		<i>Nasalis larvatus</i>	Setinggak, APL (kawasan essensial), Kab. Sambas - KSDA Kalimantan Barat	47	122	75	150.00

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
		<i>Nasalis larvatus</i>	Air Hitam, CA Muara Kendawangan, Kab. Ketapang - KSDA Kalimantan Barat	73	128	55	75.34
		<i>Nasalis larvatus</i>	Kedang Rantau Kepala, CA Muara kaman Sedulang, Kab. Kukar - KSDA Kaltim	158	182	24	15.19
		<i>Nasalis larvatus</i>	Kuaro Mayang, CA Teluk Adang, Kab. Paser - KSDA Kaltim	103	301	198	150.00
		<i>Nasalis larvatus</i>	Sungai Musang dan Sungai Bulan, SPTN Wilayah III - TN Sebangau	123	153	30	24.39
8	Komodo	<i>Varanus komodoensis</i>	CA Wae Wuul - KSDA NTT	9	6	-3	-33.33
		<i>Varanus komodoensis</i>	kawasan Ekosistem Essensial Pota - KSDA NTT	6	5	-1	-16.67
		<i>Varanus komodoensis</i>	Pulau Ontobe TWA 17 Pulau - KSDA NTT	6	7	1	16.67
		<i>Varanus komodoensis</i>	Pulau Komodo - TN Komodo	2919	2897	-3036	-51.17
		<i>Varanus komodoensis</i>	Pulau Rinca - TN Komodo	2875			
		<i>Varanus komodoensis</i>	Pulau Padar - TN Komodo	5			
		<i>Varanus komodoensis</i>	Pulau Gili - TN Komodo	55			
		<i>Varanus komodoensis</i>	Pulau Gili Montang - TN Komodo	79			
9	Jalak Bali	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Lampu Merah/ Segara Rupek – TN Bali Barat	22	16	-6	-27.27
		<i>Leucopsar rothschildi</i>	Teluk Brumbun - TN Bali Barat	7	26	19	150.00
		<i>Leucopsar rothschildi</i>	Tanjung Gelap - TN Bali Barat	9	41	32	150.00
		<i>Leucopsar rothschildi</i>	Nusa Penida (Desa Ped), KSDA Bali	108	5	-103	-95.37
10	Maleo	<i>Macrocephala n maleo</i>	Tambun/SPTN Wilayah II Doloduo - TN Boganinani Wartabone	168	754	586	150.00
		<i>Macrocephala n maleo</i>	Muara Pusian/SPTN Wilayah I Suwawa - TN Boganinani Wartabone	156	499	343	150.00
		<i>Macrocephala n maleo</i>	Hungayono/SPTN Wilayah I Suwawa - TN Boganinani Wartabone	122	601	479	150.00
		<i>Macrocephala n maleo</i>	Sungai Pampaea (62,6 Ha); Savana Pampaea (12,6 Ha); dan Mempaho (9,6 Ha) - TN Rawa	24	37	13	54.17

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
			Aopa Watumohai				
		<i>Macrocephalon maleo</i>	Blok Hutan Maleo, SM Tanjung Batiko - KSDA Sulawesi Tenggara	30	36	6	20.00
		<i>Macrocephalon maleo</i>	Saluki (BPTNW I Saluki) – TN Lore Lindu	499	1018	372	57.59
		<i>Macrocephalon maleo</i>	Pakuli dan Hukurawa - TN Lore Lindu	87			
		<i>Macrocephalon maleo</i>	Taweki - TN Lore Lindu	60			
		<i>Macrocephalon maleo</i>	SM Bangkiriang, Kabupaten Banggai (luas 0.009 Ha) - KSDA Sulteng	22	26	4	18.18
		<i>Macrocephalon maleo</i>	SM Pinjan Tanjung Matop, Kabupaten Tolitoli - KSDA Sulteng	36	66	30	83.33
11	Babi Rusa	<i>Babyrousa babirussa</i>	Lereng Poniki/SPTN Wilayah II Doloduo - TN Boganinani Wartabone	3	6	3	100.00
		<i>Babyrousa babirussa</i>	Lokasi Ongka Desa Iolanan/SPTN Wilayah III Maelang - TN Boganinani Wartabone	26	2	-24	-92.31
		<i>Babyrousa babirussa</i>	Pinogu/SPTN Wilayah I Suwawa - TN Boganinani Wartabone	10	22	12	120.00
		<i>Babyrousa babirussa</i>	Pulau Togean - TN Togean	46	54	8	17.39
		<i>Babyrousa babirussa</i>	Pulau Batudaka - TN Togean	399	424	25	6.27
		<i>Babyrousa babirussa</i>	Lindu (Tumavu) - TN Lore Lindu	13	41	-36	-46.75
		<i>Babyrousa babirussa</i>	Rahmat dan Bobo (BPTNW II) - TN Lore Lindu	11			
		<i>Babyrousa babirussa</i>	Tuare (BPTNW III Poso) - TN Lore Lindu	53			
		<i>Babyrousa babirussa</i>	CA G. Tinombala, Kabupaten Parigi Moutong, kabupaten tolitoli, kabupaten buol (luas 80 Ha) - KSDA Sulteng	55	22	-33	-60.00
12	Anoa	<i>Bubalus quarlesi</i>	Site Pongko, cagar alam Faruhumpenai - KSDA Sulsel	162	104	-58	-35.80
		<i>Bubalus quarlesi</i>	Site Balabba, cagar alam Faruhumpenai - KSDA Sulsel	32	40	8	25.00
		<i>Bubalus quarlesi</i>	Gunung Imandi/SPTN Wilayah III Maelang - TN Boganinani	19	7	-12	-63.16

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
			Wartabone				
		<i>Bubalus depressicornis</i>	Lereng Poniki/SPTN Wilayah II Doloduo - TN Boganinani Wartabone	25	5	-20	-80.00
		<i>Bubalus depressicornis</i>	Pinogu/SPTN Wilayah I Suwawa - TN Boganinani Wartabone	15	5	-10	-66.67
		<i>Bubalus depressicornis</i>	Rawa Mandu-Mandula (4,3 Ha);Laea (4,1 Ha);Lahalo (4,2 Ha);Boolo (4,1 Ha);Rawa Lampopala (4,2 Ha) - TN Rawa Aopa Watumohai	10	11	1	10.00
		<i>Bubalus quarlesi</i>	Blok Hutan Elehaji SM Buton Utara, KSDA Sulawesi Tenggara	75	77	2	2.67
		<i>Bubalus quarlesi</i>	Blok Hutan Betau Ronta SM Buton Utara - KSDA Sulawesi Tenggara	44	40	-4	-9.09
		<i>Bubalus quarlesi</i>	Blok Hutan Tanjung Gomo SM Tanjung Peropa - KSDA Sulawesi Tenggara	38	42	4	10.53
		<i>Bubalus quarlesi</i>	Blok Hutan Tambeanga SM Tj Peropa - KSDA Sulawesi Tenggara	24	34	10	41.67
		<i>Bubalus quarlesi</i>	Toro (gunung Hananau - Kanawanto) BPTNW I Saluki - TN Lore Lindu	11	10	-67	-87.01
		<i>Bubalus quarlesi</i>	Gunung Sombu, Gunung Rorekatimbu, Gunung Tokoso (BPTNW II makmur)-TN Lore Lindu	33			
		<i>Bubalus quarlesi</i>	Torire (BPTNW III Poso) - TN Lore Lindu	33			
13	Elang	<i>Nisaetus bartelsi</i>	Blok Banyulinu, CA/TWA Kawah Ijen, Banyuwangi - KSDA Jawa Timur	3	8	-3	-27.27
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	Cagar Alam Gunung Picis, kabupaten Ponorogo - KSDA Jawa Timur	3			
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	Blok Pancur, Perkebunan Kaliasat-Jampit, PTPN XII,	5			

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
			Situbondo - KSDA Jawa Timur				
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	Blok Bendolawang, RPTN Jabung - TN Bromo Tengger Semeru	7	11	4	57.14
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	Blok Coban Trisula, RPTN Coban Trisula - TN Bromo Tengger Semeru	6	8	2	33.33
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	Blok Pringтали (resort Bandealit, resort Andongrejo) SPTN Wilayah II ambulu - TN Meru Betiri	3	8	2	33.33
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	Blok Teparan (resort Sukamade, resort rejegwesi) SPTN Wilayah I sarongan - TN Meru Betiri	3			
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	HL Petungkriono, BKPH Doro, KPH Pekalongan Timur, Kab. Pekalongan - KSDA Jawa Tengah	3	3	0	0.00
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	HL Gn. Slamet, BKPH Gunung Slamet Barat, KPH Banyumas Timur, Kab. Banyumas - KSDA Jawa Tengah	4	4	0	0.00
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	Plawangan-Turgo - TN Gunung Merapi	2	7	4	133.33
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	Tegal Mulyo - TN Gunung Merapi	1			
		<i>Nisaetus floris</i>	Senaru (130 Ha), Torean (130 Ha), Sembalun (130 Ha), Sajang (130 Ha) - TN Gunung Rinjani	3	3	0	0.00
		<i>Nisaetus floris</i>	Pos Moin (96,5 Ha), Waturaka (210 Ha), Wolojita (193 Ha) SPTN Wilayah I Moni - TN Kelimutu	2	8	4	100.00
		<i>Nisaetus floris</i>	Wolokoro (29,5 Ha), Okisobe (70 Ha) SPTN wilayah II Detusoko - TN Kelimutu	2			
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	Cikaniki, TN G. Halimun Salak	8	7	-1	-12.50
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	Jalur pengamatan burung resort rowobendo - TN Alas Purwo	2	3	1	50.00
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	CA Telaga Warna - KSDA Jawa Barat	9	7	-2	-22.22
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	CA/TWA Kamojang - KSDA Jawa Barat	2	9	7	150.00

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	CA/TWA Tangkuban Parahu - KSDA Jawa Barat	3	7	4	133.33
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	Citugunung, resort PTN Situgunung, seksi PTN wilayah IV Situgunung, bidang PTN wilayah II Sukabumi - TN G. Gede Pangrango	4	6	2	50.00
		<i>Nisaetus bartelsi</i>	Blok Cilengkrang (5,29 ha) dan blok awilwga (3,12 Ha), Kawasan TN Gunung Ciremai (ekosistem dataran rendah 1.000 luas 4.531,09 Ha), ekosistem sub pegunungan (ketinggian 1.000-1.500 luas 4.885,52 Ha), ekosistem hutan pegunungan (ketinggian 1.500-2.400 luas 5.986,51 Ha - TN G. Ciremai	7	25	18	150.00
14	Kakatua	<i>Cacatua sulphurea</i>	Pulau Masakambing, Kab. Sumenep - KSDA Jatim	23	25	2	8.70
		<i>Cacatua sulphurea</i>	Ai Manis - KSDA NTB	32	14	-18	-56.25
		<i>Cacatua sulphurea</i>	Brang Sedo - KSDA NTB	73	83	10	13.70
		<i>Cacatua sulphurea</i>	Brang Singa - KSDA NTB	32	34	2	6.25
		<i>Cacatua sulphurea</i>	Pura Sedihiang, KSDA Bali	1	1	0	0.00
		<i>Cacatua sulphurea</i>	Pura Dalam Karang, KSDA Bali	1	0	-1	-100.00
		<i>Cacatua sulphurea</i>	Ubukora, TN Matalawa	6	36	30	150.00
		<i>Cacatua sulphurea</i>	Lokuwatungodu, TN Matalawa	8	2	-6	-75.00
		<i>Cacatua sulphurea</i>	Lokuhuma, TN Matalawa	11	2	-9	-81.82
		<i>Cacatua sulphurea</i>	Kokur, TN Matalawa	17	32	15	88.24
		<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	Billa, TN Matalawa	17	10	-7	-41.18
		<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	Praingkareha, TN Matalawa	10	12	2	20.00
		<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	Mahaniwa, TN Matalawa	9	12	3	33.33

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
		<i>Cacatua sulphurea</i>	Hoki-Hokio (8,5 Ha); Tali-Taliawa-Hukaea (8,2 Ha); pampaea (8,1 Ha) - TN Rawa Aopa Watumohai	19	22	3	15.79
		<i>Cacatua alba</i>	Resort Tayawi (SPTN Wilayah I Weda), kawasan hutan Tayawi Bakim - TN Aketajawe Lolobata	32	88	56	150.00
		<i>Cacatua alba</i>	Resort Binagara /Subaim (SPTN Wilayah III Subaim), kawasan hutan Akejawi - TN Aketajawe Lolobata	12	26	14	116.67
		<i>Cacatua alba</i>	Resort Akejira/SPTN I Weda, Kawasan Hutan Wuekob - TN Aketajawe Lolobata	49	50	1	02.04
		<i>Cacatua alba</i>	Resort Buli/SPTN II Maba/kawasan Hutan Uni-Uni - TN Aketajawe Lolobata	9	76	67	150.00
		<i>Cacatua moluccensis</i>	Suaka Alam Gunung Sahuwai di kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku - KSDA Maluku	187	4414	4227	150.00
		<i>Cacatua moluccensis</i>	Blok Hutan Ilie (Seksi PTN Wilayah I) - TN Manusela	4	18	14	150.00
		<i>Cacatua moluccensis</i>	Blok Hutan Waelomatan (Seksi PTN Wilayah II) - TN Manusela	6	11	5	83.33
		<i>Cacatua galerita triton</i>	CA. Pulau Waegio Timur - KSDA Papua Barat	140	12	-128	-91.43
		<i>Cacatua galerita triton</i>	CA. Pegunungan Fakfak - KSDA Papua Barat	16	6	-10	-62.50
		<i>Cacatua sulphurea</i>	SM Harlu - KSDA NTT	35	58	23	65.71
		<i>Cacatua sulphurea</i>	Pulau Manipo - KSDA NTT	8	41	33	150.00
		<i>Cacatua sulphurea parvula</i>	Pulau Komodo - TN Komodo	524	802	156	24.15
		<i>Cacatua sulphurea parvula</i>	Pulau Rinca - TN Komodo	40			
		<i>Cacatua sulphurea parvula</i>	Pulau Bero - TN Komodo	82			

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
15	Macan Tutul Jawa	<i>Panthera pardus melas</i>	Blok Pantai, Blok Parangkulon dan sekitarnya (resort Sukamade, SPTN Wilayah I Sarongan) - TN Meru Betiri	1	5	4	150.00
		<i>Panthera pardus melas</i>	Cikaniki, TN G. Halimun Salak	3	12	4	50.00
		<i>Panthera pardus melas</i>	Gunung Luhur (luas 975.5), TN G. Halimun Salak	3			
		<i>Panthera pardus melas</i>	Wates Cisoka (luas 271.6), TN G. Halimun Salak	2			
		<i>Panthera pardus melas</i>	Resort Pancur - TN Alas Purwo	4	4	0	0.00
		<i>Panthera pardus melas</i>	Jublegan, resort PTN Tagellega, Seksi PTN Wilayah II Gedeh, Bidang PTN Wilayah I Cianjur - TN G. Gede Pangrango	2	5	3	150.00
		<i>Panthera pardus melas</i>	Kawasan TN Gunung Ciremai (ekosistem dataran rendah 1.000 luas 4.531,09 Ha), ekosistem sub pegunungan (ketinggian 1.000-1.500 luas 4.885,52 Ha), ekosistem hutan pegunungan (ketinggian 1.500-2.400 luas 5.986,51 Ha - TN G. Ciremai	1	2	1	100.00
		<i>Panthera pardus melas</i>	Blok Evergreen, Blok Sumur Tua dan sekitarnya (resort Bama, SPTN Wilayah I Bekol) - TN Baluran	2	35	33	150.00
		<i>Panthera pardus melas</i>	CA Nusakambangan Barat, Kabupaten Cilacap - KSDA Jateng	2	2	0	0.00
16	Rusa Bawean	<i>Axis kuhlii</i>	Blok Gunung Nangka (CA Pulau Bawean); blok Kumasala, Blok gunung batu, Blok Gunung Besar, Blok Tanah Poteh (SM Pulau Bawean) - KSDA Jawa Timur	275	307	32	11.64
17	Cendrawasih	<i>Macgregoria pulchra</i>	Baraway - KSDA Papua	16	22	6	37.50
		<i>Paradisaeae minor</i>	Amay - KSDA Papua	9	10	1	11.11

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
		<i>Paradiseae minor</i>	Danau Haberna, Kabupaten Jayawijaya - TN Lorentz	6	8	2	33.33
		<i>Paradisaea rubra</i>	CA Pulau Waigeo barat - KSDA Papua Barat	10	76	66	150.00
		<i>Paradisaea rubra</i>	CA. Pulau Banta Barat - KSDA Papua Barat	7	32	25	150.00
18	Surili	<i>Presbytis fredericae</i>	Blok Sikendi (Jalur Pendakian Wekas) - TN Merbabu	10	8	-2	-20.00
		<i>Presbytis fredericae</i>	Blok Pandean (Jalur pendakian Selo) - TN Merbabu	5	18	13	150.00
		<i>Presbytis comata</i>	Kawasan TN Gunung Ciremai (ekosistem dataran rendah 1.000 luas 4.531,09 Ha), ekosistem sub pegunungan (ketinggian 1.000-1.500 luas 4.885,52 Ha), ekosistem hutan pegunungan (ketinggian 1.500-2.400 luas 5.986,51 Ha - TN G. Ciremai	169	192	23	13.61
19	Tarsius	<i>Tarsius fuscus</i>	Sungai Pattanuang, luas 86,75 Ha - TN Bantimurung Bulusaraung	82	104	22	26.83
20	Monyet Hitam Sulawesi	<i>Macaca maura</i>	Karaenta (kelompok), luas 29,27 Ha - TN Bantimurung Bulusaraung	31	38	7	22.58
		<i>Macaca maura</i>	Mario, KSDA Sulawesi Selatan	17	37	20	117.65
		<i>Macaca maura</i>	Lejja, KSDA Sulawesi Selatan	15	72	57	150.00
21	Julang Sumba	<i>Rhyticeros everetii</i>	Billa, TN Matalawa	10	30	20	150.00
		<i>Rhyticeros everetii</i>	Ubukora, TN Matalawa	12	11	-1	-8.33
		<i>Rhyticeros everetii</i>	Taman Mas (Maloba), TN Matalawa	3	13	10	150.00
		<i>Rhyticeros everetii</i>	Wacutidung, TN Matalawa	3	4	1	33.33
		<i>Rhyticeros everetii</i>	Lokuhuma, TN Matalawa	2	18	16	150.00
22	Kasturi Tengku Ungu	<i>Lorius domicella</i>	Blok Hutan Ilie (Seksi PTN Wilayah I) - TN Manusela	4	9	5	125.00
		<i>Lorius domicella</i>	Blok Hutan Waelomatan (Seksi PTN Wilayah II) - TN Manusela	4	4	0	0.00

No	Satwa	Spesies	Site monitoring	Baseline (jml)	2018 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2018 (%)
23	Penyu	<i>Chelonia mydas</i>	Pulau Wairundi, TN Cendrawasih	71	4	-67	-94.37
		<i>Eretmochelys imbricata</i>	SPTN Wilayah I Tarupa - TN Taka Bonerate	135	3	-132	-97.78
		<i>Eretmochelys imbricata</i>	Pulau Peteloran Barat - TN Kepulauan Seribu	1819	35	-1784	-98.08
		<i>Eretmochelys imbricata</i>	Pulau Peteloran Timur - TN Kepulauan Seribu	2272	5206	2934	129.14
		<i>Eretmochelys imbricata</i>	pulau bunaken (Tawara dan Bunaken Timur) - TN Bunaken	14	5	-9	-64.29
		<i>Eretmochelys imbricata</i>	seluruh pulau di kawasan TN Karimunjawa	42	35	-7	-16.67
		<i>Eretmochelys imbricata</i>	Pulau Anano (luas 39.148 ha) - TN Wakatobi	46	39	-7	-15.22
		<i>Eretmochelys imbricata</i>	Pulau Kentiole (luas 14.267 Ha) - TN Wakatobi	29	25	-4	-13.79
		<i>Eretmochelys imbricata</i>	Pulau Cowo-Cowo (luas 22.950 Ha) - TN Wakatobi	39	22	-17	-43.59
		<i>Eretmochelys imbricata</i>	Pulau Ndaa (luas 4.626 Ha) - TN Wakatobi	19	7	-12	-63.16
		<i>Eretmochelys imbricata</i>	Pulau Runduma (luas 7.131 Ha) - TN Wakatobi	15	7	-8	-53.33
		<i>Chelonia mydas</i>	Pantai Sukamade (resort Sukamade, SPTN Wilayah I Sarongan) - TN Meru Betiri	2662	1946	-716	-26.90
24	Kangguru Pohon	<i>Dendrolagus mbaiso</i>	Sugapa, Kabupaten Intan jaya - TN Lorentz	10	22	12	120.00
25	Celepuk Rinjani	<i>Otus jolandae</i>	Senaru kembang Kuning - TN Gunung Rinjani	27	268	241	150.00
Rata-rata							37.10
Peningkatan populasi tahun 2017-2018					0.82		

Lampiran 5

Realisasi Anggaran DIPA BA 29 Tahun 2018 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

NO	Kode Satker	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
SATUAN KERJA PUSAT					
1	400197	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	6.091.000.000	5.968.684.390	97,99
2	500652	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	49.241.165.000	48.559.213.096	98,62
3	500674	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	8.160.000.000	7.995.898.760	97,99
4	500668	Direktorat Kawasan Konservasi	75.572.478.000	72.030.591.064	95,31
5	400196	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	19.671.700.000	19.273.885.242	97,98
6	427366	Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	79.657.029.000	70.876.985.269	88,98
JUMLAH PUSAT			238.393.372.000	224.705.257.821	94,26

SATUAN KERJA BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

1	238488	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	46.915.000.000	46.039.787.024	98,13
2	238514	Balai Besar KSDA Riau	28.305.553.000	28.048.766.011	99,09
3	238399	Balai Besar KSDA Jawa Barat	54.636.088.000	52.827.978.726	96,69
4	238432	Balai Besar KSDA Jawa Timur	37.094.357.000	36.317.446.970	97,91
5	238645	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	29.792.600.000	28.839.733.414	96,80
6	239881	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	31.881.817.000	31.046.586.750	97,38
7	239917	Balai Besar KSDA Papua	34.263.840.000	31.524.713.777	92,01
8	239921	Balai Besar KSDA Papua Barat	29.025.900.000	28.757.254.294	99,07
9	238322	Balai KSDA DKI Jakarta	20.581.000.000	19.472.861.115	94,62
10	238411	Balai KSDA Jawa Tengah	36.293.153.000	34.593.243.971	95,32
11	613150	Balai KSDA Yogyakarta	18.309.500.000	17.506.089.894	95,61
12	238467	Balai KSDA Aceh Darusalam	23.704.517.000	21.520.591.871	90,79
13	238500	Balai KSDA Sumatera Barat	20.002.000.000	19.195.758.364	95,97
14	238521	Balai KSDA Jambi	14.640.000.000	14.283.109.468	97,56
15	238542	Balai KSDA Sumatera Selatan	33.143.800.000	31.046.395.265	93,67
16	238713	Balai KSDA Bengkulu	31.833.000.000	31.291.127.563	98,30
17	238577	Balai KSDA Kalimantan Barat	20.573.500.000	19.219.910.982	93,42
18	549519	Balai KSDA Kalimantan Tengah	19.265.605.000	17.624.370.066	91,48
19	238598	Balai KSDA Kalimantan Selatan	18.679.000.000	18.033.623.104	96,54
20	549523	Balai KSDA Kalimantan Timur	19.787.000.000	18.450.815.837	93,25
21	238610	Balai KSDA Sulawesi Utara	24.834.000.000	22.831.849.666	91,94

NO	Kode Satker	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
22	238624	Balai KSDA Sulawesi Tengah	20.639.900.000	19.393.974.773	93,96
23	238652	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	20.430.692.000	20.325.195.981	99,48
24	238666	Balai KSDA Maluku	17.873.110.000	17.050.579.262	95,40
25	238687	Balai KSDA Bali	23.476.010.000	22.951.644.586	97,77
26	238691	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	48.550.500.000	44.607.567.893	91,88
JUMLAH KSDA			724.531.442.000	692.800.976.627	95,62

SATUAN KERJA BALAI TAMAN NASIONAL

1	239828	Balai Besar TN Gunung Leuser	32.393.800.000	30.471.229.717	94,07
2	549530	Balai Besar TN Kerinci Seblat	36.580.150.000	35.094.316.054	95,94
3	239853	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	27.579.300.000	26.252.710.823	95,19
4	239807	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	51.172.190.000	50.207.826.248	98,12
5	549544	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	31.639.182.000	30.846.057.905	97,49
6	604299	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	29.771.835.000	27.660.218.737	92,91
7	604193	Balai Besar TN Lore Lindu	29.535.450.000	23.108.175.345	78,24
8	604236	Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	20.965.300.000	20.901.954.498	99,70
9	604222	Balai TN Kepulauan Seribu	17.525.715.000	16.783.374.686	95,76
10	574315	Balai TN Gunung Ceremai	21.233.432.000	20.289.123.977	95,55
11	604240	Balai TN Gunung Halimun	26.421.300.000	26.187.634.253	99,12
12	574317	Balai TN Gunung Merbabu	22.006.300.000	21.715.496.644	98,68
13	604257	Balai TN Karimun Jawa	17.932.870.000	17.442.048.894	97,26
14	574316	Balai TN Gunung Merapi	24.854.300.000	23.850.530.626	95,96
15	238446	Balai TN Baluran	39.621.300.000	38.527.453.212	97,24
16	604172	Balai TN Meru Betiri	20.739.700.000	20.314.701.707	97,95
17	604201	Balai TN Alas Purwo	25.386.496.000	24.984.429.861	98,42
18	574311	Balai TN Batang Gadis	14.218.000.000	13.820.133.954	97,20
19	604278	Balai TN Siberut	16.100.794.000	15.659.554.974	97,26
20	574313	Balai TN Teso Nilo	17.600.700.000	16.069.633.437	91,30
21	604350	Balai TN Bukit Tiga Puluh	14.903.000.000	14.179.573.811	95,15
22	574314	Balai TN Bukit Dua Belas	13.931.600.000	13.536.800.077	97,17
23	604282	Balai TN Berbak dan Sembilang	22.563.700.000	20.940.353.750	92,81
24	604189	Balai TN Way Kambas	34.535.300.000	34.015.595.410	98,50
25	604332	Balai TN Gunung Palung	13.684.275.000	13.581.072.065	99,25
26	604371	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	17.433.300.000	16.747.623.775	96,07
27	238581	Balai TN Tanjung Putting	17.965.881.000	16.529.825.161	92,01
28	445965	Balai TN Sebangau	18.235.700.000	16.939.267.408	92,89
29	238603	Balai TN Kutai	21.200.300.000	20.640.520.577	97,36
30	445971	Balai TN Kayan Mentarang	14.810.491.000	13.551.424.929	91,50
31	427372	Balai TN Bogani Nani Wartabone	21.869.300.000	20.721.863.057	94,75
32	604215	Balai TN Bunaken	15.286.200.000	14.906.072.815	97,51

NO	Kode Satker	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
33	574323	Balai TN Kepulauan Togean	13.571.300.000	13.497.898.080	99,46
34	574325	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	23.073.300.000	22.719.907.055	98,47
35	604346	Balai TN Takabone Rate	20.344.700.000	18.931.247.939	93,05
36	604304	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	17.741.300.000	17.733.313.858	99,95
37	604325	Balai TN Wakatobi	15.985.300.000	15.863.958.935	99,24
38	604367	Balai TN Manusella	16.974.935.000	14.315.433.723	84,33
39	427381	Balai TN Bali Barat	30.176.300.000	29.202.705.959	96,77
40	604388	Balai TN Gunung Rinjani	25.642.360.000	23.420.641.489	91,34
41	239895	Balai TN Komodo	29.248.697.000	27.712.162.434	94,75
42	574318	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi manggameti	22.481.300.000	21.539.003.197	95,81
43	604311	Balai TN Kelimutu	15.908.300.000	15.141.593.194	95,18
44	574327	Balai TN Lorenzt	15.246.860.000	15.132.122.895	99,25
45	604261	Balai TN Wasur	19.797.300.000	18.330.659.959	92,59
46	574326	Balai TN Aketajawe Lolobata	17.390.494.000	16.806.124.470	96,64
47	238382	Balai TN Ujung Kulon	24.511.300.000	23.871.712.301	97,39
48	230645	Balai TN Tambora	21.306.900.000	19.682.067.989	92,37
		JUMLAH TN	1.079.097.807.000	1.030.377.151.864	95,49
		TOTAL	2.042.022.621.000	1.947.883.386.312	95,39

Lampiran 6

Realisasi Capaian Prioritas Nasional

No	Proyek Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas	Rincian Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi		Keterangan
					Fisik	%		Rp	%	
1	Prioritas Nasional : Kesehatan									
	Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ Neglected Tropical Diseases salah satunya Schistosomiasis	Penerapan intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu	Ha	1	0,00	0	3.450.050.000	1.953.277.960	56,62	Dilakukan revisi anggaran dan target dari 500 ha menjadi 1 ha, karena kegiatan tidak dapat dilaksakan disebabkan adanya bencana alam
		Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu	Ha	300	5	1,67	5.483.000.000	2.291.570.774	41,79	Dataran Tinggi Napu (Desa Dodolo dan desa Sedoa); Dataran Tinggi Lindu (desa Anca)
		Pengamanan kawasan TN Lore Lindu	Ha	217.991	66.105,29	30,32	4.000.000.000	3.760.450.182	94,01	Pengamanan kawasan telah dilaksanakan di SPTNW I Mataeu dan SPTNW III Tongoa

No	Proyek Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas	Rincian Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi		Keterangan
					Fisik	%		Rp	%	
2	Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata									
	Pengembangan Danau Toba	Pembangunan sarpras ekowisata pada Taman Wisata Alam di kawasan Danau Toba	Unit TWA	7	7	100,00	26.973.530.000	25.933.125.805	96,14	- KSDA Sumut, realisasi 4 unit (TWA Sicike-cike, TWA Lau Debuk-debuk, TWA Sibolangit, TWA Sijaba Hutaginjang) - KSDA Aceh, realisasi 3 unit (TWA Pulau Weh Sabang, TWA Kep Banyak, dan TWA Jantho)
		Pembangunan sarpras pariwisata pada TN di kawasan Danau Toba	unit TN	2	2	100	10.643.164.000	10.576.476.848	99,37	BBTN Leuser, realisasi ODTWA Bukit Lawang, ODTWA Tangkahan BTN Batang Gadis, realisasi 1 unit
	Pengembangan Borobudur dan sekitarnya	Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Wisata Alam di kawasan Borobudur dan sekitarnya	Unit TWA	4	4	100	13.599.008.000	13.382.840.139	98,41	BKSDA Jateng :TWA Guci, TWA Sumber Semen, TWA Telogo Warno Telogo Pengilon, TWA Gn Selok,

No	Proyek Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas	Rincian Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi		Keterangan
					Fisik	%		Rp	%	
		Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Nasional di kawasan Borobudur dan sekitarnya	unit TN	2	2	100	13.579.955.000	13.160.640.497	96,91	BTN Merbabu: Sarpras wisata dan toilet di Resort Selo dan Sarpras Wisata Umbul 9 Kopeng Semarang) BTN Merapi: Realisasi di Kali Kuning-Plunyon, Jurang Jero,
	Pengembangan Mandalika	Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Wisata Alam di kawasan Mandalika dan sekitarnya	Unit TWA	7	7	100,00	25.161.500.000	23.432.197.349	93,13	BKSDA NTB: TWA Kerandangan, TWA Suranadi, TWA Gunung Tunak, TWAL Pulau Moyo, TWA Semongkat, TWA Danau Rawa Taliwang, dan TWA Pulau Satonda
		Pembangunan sarpras pariwisata pada Taman Nasional di kawasan Mandalika dan sekitarnya	unit TN	3	3	100	23.180.450.000	22.223.572.134	95,87	BTN Rinjani: Sarpras Gunung Kukus BTN Tambora: Visitor Center, Shelter di Jalur Pendakian BTN Bali Barat: Pulau menjangan, Teluk Brumbun, Pengembangan Dermaga Karang Sewu, Manara Pantau Pos Jaga Wisata

No	Proyek Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas	Rincian Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi		Keterangan
					Fisik	%		Rp	%	
	Pengembangan Sarpras Ekowisata pada Kawasan Konservasi	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi	UPT KSDA	22	22	100,00	97.615.614.000	93.058.891.686	95,33	
	Pengembangan Sarpras Ekowisata pada Taman Nasional	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional	UPT TN	38	38	100	147.579.664.000	141.977.401.511	96,20	
3	Prioritas Nasional Ketahanan Energi									
	Proyek penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro) di kawasan konservasi sebesar 1.500 Kw	Pembangunan mini/mikro hidro di kawasan konservasi non TN	Kwatt	70	210	300,00	5.100.000.000	4.992.011.297	97,88	Jabar= 5 Kwh Sulsel= 100 Kwh (2 unit 50 Kwh) Sultra = 70 Kwh Papua = 35 Kwh
		Pembangunan mini/mikro hidro di TN	Kwatt	9.145	10.090	110,33	7.609.710.000	5.374.449.990	70,63	IPEA : 1 unit PT Energi Hidro Investama (10 MW/ 10.000 KWh) di TN BBS; TN Matalawa = 45 Kwh; TN Batang Gadis= 10 Kwh; TN Bukit Baka Bukit Raya = 25 Kwh; BTN Gunung Palung = 10 Kwh
4	Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah									
	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan di kawasan konservasi	Unit KSDA	26	26	100,00	27.300.173.000	26.260.978.314	96,19	
		Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional	unit TN	48	48	100,00	57.154.085.000	55.913.495.760	97,83	

No	Proyek Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas	Rincian Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi		Keterangan
					Fisik	%		Rp	%	
	Pembangunan Pedesaan	Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat	Unit	176	181	102,84	40.672.544.000	37.339.350.606	91,80	
		Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan Konservasi	Ha	100.425,92	78.427,97	78,10	56.589.819.000	51.985.976.964	91,86	
		Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi	Kelompok	365	406	111,23	88.927.071.000	82.621.721.272	92,91	
		Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat	Kejadian	268	236	88,06	105.850.012.000	101.056.965.114	95,47	
		Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat	Ha	40.085	32.582,29	81,28	69.585.241.000	64.254.816.012	92,34	
		Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat	%	2	37,1	1855,00	73.419.536.000	69.840.627.312	95,13	

No	Proyek Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas	Rincian Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi		Keterangan
					Fisik	%		Rp	%	
		Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi (Sarana prasarana Wildlife Rescue Unit (WRU))	Unit	12	64	533,33	25.256.000.000	24.818.356.428	98,27	
		Jumlah Wildlife Rescue Unit yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat	Unit	12	12	100,00	9.318.714.000	8.861.261.198	95,09	



**Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem**

Gedung Manggala Wanabakti
Blok 1 LT.8
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270
(021) 5730301
evaluatorksdae@gmail.com